

# PENGEMBANGAN MASYARAKAT

WACANA & PRAKTIK



 Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd.

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT:**

**Wacana dan Praktik**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2013

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-9413-79-3 307.14

15 x 23 cm

xii, 270 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2013

**Kencana. 2013.0415**

**Penulis**

Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd.

**Desain Cover**

tambra23@yahoo.com

**Penata Letak**

Jefry

**Percetakan**

PT Fajar Interpratama Mandiri

**Penerbit**

K E N C A N A

PRENADA MEDIA GROUP

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
----------------------	---

## 1

<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SEBUAH OVERVIEW TEORETIS</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pengembangan Masyarakat .....	4
B. Keadilan Sosial: Sebuah Visi Pengembangan Masyarakat .....	21
C. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat .....	35
D. Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat .....	53
E. Pengembangan Masyarakat Menuju Pemberdayaan Masyarakat .....	72
F. Manajemen Pengembangan Masyarakat .....	83

## 2

<b>LSM DAN DISKURSUS PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>89</b>
A. LSM sebagai Sebuah Gerakan Sosial .....	90
B. Keberpihakan LSM Terhadap Masyarakat Lapis Bawah .....	95
C. Model-model Pengembangan Masyarakat .....	120
D. Spektrum Keterlibatan LSM dalam Pengembangan Masyarakat .....	129

### 3

#### **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF 137**

A. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat .....	140
B. Memerhatikan Dimensi Keberlanjutan.....	145
C. Menekankan Partisipatori .....	151
D. Mengembangkan Modal Sosial.....	157
E. Menghapus Ketimpangan Gender.....	172

### 4

#### **MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GERAKAN KEAGAMAAN (STUDI KASUS BPPM PESANTREN MASLAKUL HUDA KAJEN PATI) 183**

A. Pendahuluan.....	183
B. Ide Pengembangan Masyarakat .....	184
C. Aksi-aksi Pengembangan Masyarakat .....	189

### 5

#### **MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (STUDI KASUS LSM DIAN DESA YOGYAKARTA) 205**

A. Visi Dian Desa tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	206
B. Manajemen Pengembangan Masyarakat yang Dilakukan Dian Desa .....	214

### 6

#### **MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GERAKAN PEREMPUAN (STUDI KASUS LSM YASANTI DAN RIFKA ANNISA) 229**

A. Pendahuluan .....	229
B. Upaya-upaya Pemberdayaan Perempuan .....	238

DAFTAR PUSTAKA	251
INDEKS	257
TENTANG PENULIS	267

## KATA PENGANTAR

Isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Sejalan dengan semangat keterbukaan dan penerapan otonomi telah menempatkan kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai *stakeholders* pembangunan. Kondisi ini telah berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluangnya bagi aktivis-aktivis social untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau akar rumput melakuai skema aksi-aksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi dan emansipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global. Dari sini, upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, partisipasi dan emansipasi para warganya dalam proses pembangunan.

Pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro-pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat.

Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), bersifat *bottom up* dan lokalitas. Munculnya pola pembangunan alternatif seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang menekankan prinsip keadilan maupun program implementatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.

Dari segi isu yang dibahas, buku ini memfokuskan pada tinjauan tentang konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan terapan pengembangan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial baik, baik yang diinisiasi oleh LSM maupun pondok pesantren. Disusul dengan pembahasan kebijakan (*policy*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yakni mengenai apa yang harus dilakukan (*what to do*); bagaimana implementasinya (*how to do it*); serta apa yang telah dilakukan (*what is actually done*).

Pembahasan konsep pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat perlu didahulukan untuk memberi penjelasan tentang apa makna sesungguhnya kegiatan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Secara substansial, pengembangan masyarakat adalah sebuah proses restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi sehingga akan lebih memungkinkan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Munculnya ide pengembangan masyarakat didasari sebuah idealisme bahwa masyarakat mampu dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, mengelola sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, pekerja dalam layanan kemanusiaan dan anggota kepanitiaan masyarakat lokal yang tidak dibayar.

Pengembangan masyarakat adalah tahapan awal menuju proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan mengandung terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. *Kedua*, melakukan konsientisasi/*conscientization*. Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan diidentikkan dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Dalam karya ini, diasumsikan bahwa antara kegiatan pengembangan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat memiliki jalinan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengingat bahwa pengembangan masyarakat adalah proses dan tindakan awal yang harus dilalui dan diupayakan menuju pemberdayaan masyarakat.

Hadirnya buku ini diharapkan bisa menjadi teman dialog yang baik bagi para pembaca sekaligus menambah referensi dalam memahami diskursus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan perspektif yang lebih beragam. Bagi para teori dan praktisi pengembangan masyarakat dan pendidikan luar sekolah, hadirnya buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mereka tentang model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari betul bahwa sebagai sebuah pembacaan, apa yang tertulis dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Di dalamnya masih banyak kekurangan dan (mungkin) juga kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, koreksi dan kritik dari para pembaca semuanya sehingga buku ini di masa-masa mendatang bisa hadir dengan isi yang lebih baik.

**Bengkulu, 10 Oktober 2012**

**Zubaedi**

## **BAB I.**

### **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SEBUAH OVERVIEW TEORITIS**

Gagasan *community development* (pengembangan masyarakat) muncul dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respon terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke 20. Beberapa ahli menyatakan, pengembangan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format politik baru pada awal abad ke-20. Pengembangan masyarakat mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan sosial pada tahun 1970-an menyusul mulai bangkitnya kesadaran progresif dari sebagian komunitas internasional untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang lemah (*disadvantage*), menerima model kesejahteraan redistributif secara radikal, memberlakukan model kewarganegaraan aktif dan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan (*participatory model*) (Winsome Robert, 2005: 47).

Keberpihakan terhadap nasib orang-orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial dari kontrol sosial ke metode praktek yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kemasyarakatan secara kolaboratif-partisipatoris. Dari sini, aksi pengembangan masyarakat, perencanaan sosial dan advokasi sosial untuk pertama kalinya menjadi metode praktek *social work* yang khusus dan menyempurnakan model kerja kemasyarakatan tradisional yang pernah ada.

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, pekerja dalam layanan kemanusiaan dan anggota kepanitian masyarakat lokal yang tidak dibayar (Kenny, Susan, 1994: 5-7)

Terminologi pengembangan masyarakat dalam perjalanannya merujuk pada: sebuah pekerjaan profesional, sebuah metode atau pendekatan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, sebuah komponen dalam kerja pelayanan kemanusiaan, sebuah pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia dan sebuah aktivitas politik.

Pengembangan masyarakat menghadapi isu-isu baru, namun pendekatan yang dipakai dalam organisasi kemanusiaan didasarkan pada ide untuk kembali kepada zaman masa lalu. Ide ini menekankan bahwa manusia dapat dan harus menyumbang secara kolektif bagi cara sebuah masyarakat bertahan, melalui keikut-sertaan dalam mengambil keputusan, mengembangkan perasaan memiliki terhadap kelompok dan menghargai sesama manusia.

Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.

Kerja pengembangan masyarakat pada hakekatnya menjadi proses aktualisasi komitmen para aktivis sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidak-seimbangan antar kelompok dalam masyarakat, termasuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan serta menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial. Setiap program pengembangan masyarakat dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya, ketrampilan dan peluang untuk hidup secara lebih baik bagi rakyat kecil. Setiap upaya mengatasi kesenjangan dan alienasi sosial dilaksanakan oleh para aktivis sosial dengan menggunakan *outreach methods* (kegiatan keorganisasian yang sifatnya melakukan kontak, memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anggota masyarakat). Cara ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berorientasi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.

Pengembangan masyarakat dalam kerangka ini menjadi sebuah proses restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi sehingga akan lebih memungkinkan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. (Ife, Jim, 1997: .2). Kegiatan pengembangan masyarakat biasanya berlangsung dalam sebuah kelompok, satuan sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada konteks ini, pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dan aksi sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan, menjalankan, menentukan kebutuhan dan memecahkan permasalahan individual maupun masyarakat.

#### **A. Pengertian Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan

saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka (FCDL, 2003:1).

Pengembangan Masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas: kaum buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang-orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan jender, ras dan etnis.

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165). Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*” Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan (Edi Suharto, 2003: 12).

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipatisi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, soliditas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara

berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindak-lanjuti dengan aksi sosial nyata.

Para aktivitis pengembangan masyarakat menolak ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ia memunculkan ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan hubungan kemanusiaan. Sejauh ini, pola pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan dianggap telah menciptakan pertumbuhan yang tidak terkendalikan.

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini berbeda dengan kerja masyarakat (*community work*). Dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan transformasi atau perubahan sosial. Konsep pengembangan masyarakat berhubungan dengan penentangan secara kuat terhadap jalannya konsep *community work* yang sekarang sering diterapkan oleh penguasa. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan umumnya menggunakan *community work* dengan merujuk pada pekerjaan sukarela yang dilaksanakan oleh anak-anak muda pengangguran dan anak-anak sekolah. Aparat pengadilan mengidentifikasi *community work* sebagai pelayanan masyarakat bagi para pelanggar hukum sebagai salah satu alternatif kegiatan untuk satu periode di penjara (Susan Kenny, 1994: 9).

Merujuk pendapat Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu (Darkenwald, Gordon, G, dan Merriam, Sharan, B, 1982: 13).

Gagasan pengembangan masyarakat bisa dicermati eksistensinya dengan menggunakan perspektif ekologis (*ecological perspective*) dan perspektif keadilan sosial (*social justice perspective*). Munculnya perspektif ekologis bersumber dari kritik kelompok pecinta lingkungan “Green” terhadap tatanan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini yang dianggap kurang peduli terhadap krisis lingkungan. Kritik kelompok Green merupakan bentuk penentangan terbesar dan mendasar terhadap norma-norma mapan dalam diskursus sosial dan politik pada di era 1990-an dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi masa depan tatanan ekologis di bumi.

Masyarakat dunia mulai menghadapi krisis lingkungan pada akhir abad 20. Perhatian publik terhadap pentingnya penanganan suatu krisis berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada era 1970-an, perhatian publik lebih tersita pada masalah krisis sumber daya alam; sedangkan pada era 1980-an lebih tersita pada masalah perubahan keseimbangan ekologis khususnya masalah pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon.

Krisis lingkungan yang dialami oleh masyarakat dunia telah mendapat perhatian serius dari para aktivis lingkungan. Respon yang muncul terhadap krisis lingkungan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu: respon lingkungan (*environmental responses*) dan respon dari kelompok hijau (*Green responses*). Keduanya kadang-kadang muncul dengan istilah yang lain seperli

*light green* dan *dark green*, atau *environmental* dan *ecological* atau *deep ecology* dan *shallow ecology*.

Respon lingkungan (*environmental responses*) sering menggunakan pendekatan linear konvensional dalam memandang problem lingkungan. Para ahli dari kalangan ini mengembangkan dua karakteristik pemikiran sebagai berikut:

- (1) Memecahkan masalah spesifik dengan solusi terpisah dan spesifik pula. Misalnya, problem kerusakan sumber daya alam dipecahkan dengan teknologi alternatif, problem polusi dipecahkan dengan teknologi anti polusi dan lain-lain. Setiap problem diisolasi dari problem lain, lalu dicarikan pemecahannya.
- (2) Mencari solusi dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung. Mereka tidak memandang penting untuk merubah semua sistem tersebut.

Kebalikan dari pemikiran *environmental responses* dikembangkan oleh kelompok *Green responses*. *Green responses* cenderung menggunakan pendekatan radikal dan fundamental. Inti pandangannya menenakankan bahwa problem lingkungan tidak dianggap terpisah dari problem lainnya, namun merupakan konsekuensi dari tatanan sosial, ekonomi dan politik yang “sakit” dan tidak mendukung lingkungan. Oleh karena itu, tatanan-tatanan tersebut perlu dirombak dalam rangka memecahkan masalah lingkungan. Dengan demikian, pemecahan problem lingkungan sama penting dengan pemecahan problem sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam perspektif *Green*, terdapat kesepakatan bahwa krisis ekologi berakar dari kerusakan sistem sosial-ekonomi-politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem tersebut. Meskipun demikian, di kalangan penganut perspektif *Green* terdapat ketidaksepakatan tentang basis analisis atau tepatnya apakah yang perlu untuk dirubah; apakah sumber utama masalah ekologi, dan solusi apa yang diajukan yang diajukan untuk memecahkan masalah lingkungan.

Perspektif *Green* memiliki sepuluh aliran pemikiran (Ife, Jim, 1997: 26-41). *Pertama*, aliran *eco-sosialism* (sosialisme lingkungan) yang berpendapat bahwa munculnya krisis lingkungan sebagai konsekuensi dari sistem kapitalisme. Dengan menggunakan analisis marxis, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang menemani pengembangan kapitalisme dilihat telah menghasilkan pemborosan, over konsumsi dan polusi serta secara bersamaan telah melupakan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan planet ini. Dalam perspektif ini, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi krisis adalah dengan paham sosialisme (kebersamaan). Perlindungan secara memadai terhadap lingkungan dan konservasi terhadap sumber-sumber alam dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem kolektifitas atau kebersamaan.

*Kedua*, aliran *eco-anarchisme* (anarkisme lingkungan). Pendapat yang dikembangkan oleh para penganut aliran ini sedikit berlawanan dengan *eco-sosialism*. Menurut mereka, krisis lingkungan dihasilkan dari struktur yang

didominasi dan dikontrol oleh pemerintah, dunia usaha, kekuatan militer dan berbagai bentuk aturan yang lain. Struktur ini menolak kebebasan manusia dan kesanggupan manusia untuk menikmati alam. Mereka membatasi kemurnian interaksi manusia dan potensi manusiawi. Mereka mengasingkan manusia dari dunia alam, sebagai hasilnya orang-orang mengembangkan praktek yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, *eco-anarchisme* akan menolong masyarakat yang kurang atau tidak memiliki kekuatan kontrol, di mana keputusan diambil oleh individu-individu atau sekelompok kecil masyarakat lokal. Berlawanan dengan bentuk-bentuk hirarki organisasi sosial, para penganut aliran *eco-anarchisme* menekankan desentralisasi, otonomi dan bentuk-bentuk organisasi lokal, berdasarkan prinsip ekologis atau ekologi sosial.

*Ketiga*, aliran *eco-feminism* (feminisme lingkungan). Para penganut aliran ini melihat problem kerusakan lingkungan berhubungan terutama dengan paham patriarki dengan segala konsekuensinya. Cheri Kramarae dan Paula A. Treichler dalam *A Feminist Dictionary* menjelaskan bahwa patriarki merupakan term penting yang digunakan sebagai cara untuk mengelaborasi tertindasnya perempuan berdasarkan struktur dan susunan masyarakat. Ideologi patriarki dibangun berdasarkan kekuatan sebagai simbol utama laki-laki, simbol kekuasaan ayah dan sebagai simbol pemegang kontrol terhadap seks dan pikiran perempuan (Nurohmah, Lely, 2000: 1-2). Sistem patriarki merupakan suatu mekanisme yang menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau memegang peranan lebih dominan. Sistem tersebut menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perlindungan laki-laki.

Dari sudut pandang ini, patriarki menciptakan dominasi, penekanan dan kontrol yang menghasilkan masyarakat eksploitatif, serakah dan penuh persaingan. Masyarakat patriarki pada akhirnya terbukti menjadi tidak berkesinambungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perubahan yang dirasakan penting adalah perubahan yang dibentuk oleh gerakan feminisme, di mana struktur-struktur patriarki diubah dan digantikan. Mereka menekankan bahwa kaum perempuan harus didorong dan didukung untuk bersaing secara efektif dengan kaum laki-laki dalam struktur sosial yang ada.

Kaum feminis dalam karya-karyanya menekankan analisis yang menuntut pengembangan sebuah masyarakat berdasarkan prinsip organisasi yang berbeda-beda, berupaya mengganti struktur yang penuh persaingan menjadi struktur yang menekankan kerja sama, mengganti individualisme dengan pengambilan keputusan secara kolektif, menghargai semua orang serta tidak mendukung praktek dominasi, kontrol, penekanan dan eksploitasi satu kelompok oleh kelompok lain. Kaum feminisme menghargai pentingnya sifat-sifat naluriah yang melekat pada kaum perempuan seperti mengasuh, memberi perhatian, berbagi, bermasyarakat dan suka damai, bukan sifat-sifat naluriah yang melekat pada kaum laki-laki seperti melakukan persaingan secara individual, agresi, dominasi, eksploitasi dan perang. Kehidupan politik jika ditangan kaum perempuan barangkali akan lebih bermoral; karena mereka

lebih mementingkan “*conventional politics*” seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial bukan “*hard politics*” seperti perlombaan senjata, perang, konfrontasi fisik dan sebagainya (Soetjipto, 1997).

*Keempat*, aliran *eco-ludism*. Perspektif ini melihat bahwa perkembangan teknologi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Dari perspektif ini, respon yang seringkali dimunculkan oleh kaum environmentalis tradisional terhadap problem lingkungan dengan cara mengupayakan sebuah solusi secara teknologis justru dianggap telah merusak lingkungan. Menurut para penganut aliran ini, kemajuan teknologi dilihat sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dari pemecahan masalah. Pengembangan dan penelitian teknologi lebih jauh, yang diyakini memberikan beberapa keuntungan, hanya akan meningkatkan ongkos lingkungan dan ongkos sosial, tidak memberikan manfaat secara langsung bagi kemanusiaan. Mereka memperjuangkan pengembangan teknologi tingkat rendah bukan teknologi tinggi, agar dapat digunakan dan dikendalikan oleh orang-orang awam serta berhubungan secara langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

*Kelima*, aliran *anti-growth* (anti pertumbuhan). Beberapa penulis dari gerakan Hijau merasakan bahwa pertumbuhan menjadi masalah besar. Keteraturan keadaan menjadi dasar pemikiran dalam konsep pertumbuhan baik dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, pertumbuhan wilayah perkotaan, pertumbuhan kekayaan, pertumbuhan organisasi dan lain-lain. Di sini ada sebuah upaya menyamakan antara “lebih besar” dengan “lebih baik”.

Dalam pespektif pertumbuhan, salah satu kriteria pokok dari kesuksesan dan kualitas adalah pertumbuhan segala sesuatu. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama dari kebijakan perekonomian dan pertumbuhan dianggap sebagai mekanisme di mana ketersediaan lapangan kerja, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan.

Tentu saja, permasalahannya adalah bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang terbatas. Pertumbuhan tidak berjalan secara abadi. Sebagai alam terbatas, bumi dibatasi oleh ketersediaan dan jumlah sumber daya alam untuk membiayai pertumbuhan yang akan dihasilkan. Para penulis seperti David Suzuki berpendapat bahwa alam membatasi pertumbuhan yang akan dicapai dan pertumbuhan tidak tidak berlangsung terus-menerus. Krisis lingkungan yang dihasilkan oleh pertumbuhan telah melebihi kemampuan bumi untuk menanggung lonsekuensi dari pertumbuhan. Kritik terhadap pertumbuhan ini memiliki hubungan dekat dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*). Sistem yang ada dianggap tidak berkesinambungan, pertumbuhan yang terus menerus hanya membuat alam lebih tidak berkesinambungan. Sebuah alternatif berdasarkan prinsip berkesinambungan melalui aliran *anti-growth* menjadi agenda utama untuk diperjuangkan. Alternatif ini ingin membatasi pertumbuhan secara efektif dan ingin menjamin penggunaan sebanyak-banyaknya terhadap kekayaan alam yang dapat digantikan atau diperbaharui.

*Keenam*, aliran *alternative economics* (perekonomian alternatif). Perspektif ini

melihat masalah utama yang melekat dalam sistem ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme industri adalah karena sistem ekonominya yang mendorong konsumsi berlebihan, pemborosan, pertumbuhan dan kemerosotan nilai lingkungan. Oleh karena itu, para penganut aliran ini berupaya mengembangkan perekonomian baru berdasarkan prinsip lingkungan. Ada dua aliran utama dalam perspektif ini.

**Pertama**, perspektif *alternative economics* yang berupaya mendefinisikan kembali analisis ekonomi konvensional untuk memasukkan kepedulian terhadap lingkungan. Analisis konvensional, dalam menghitung biaya dan keuntungan, telah memperlakukan lingkungan sebagai faktor luar. Oleh karena itu ia tidak memasukkan faktor lingkungan ketika membandingkan biaya dengan keuntungan. Dengan demikian, sebuah industri akan mudah melepaskan pembuangan racun ke lingkungan karena tidak memasukkan biaya dan ongkos lingkungan dalam penghitungan keuntungan bersih dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, perspektif *Green* mengkritik perekonomian konvensional dengan menekankan bahwa kegiatan perekonomian yang tidak menghargai fenomena sosial dan lingkungan berarti ia mengingkari netralitas nilai, karena dalam kenyataannya ia memperkuat tatanan yang merusak sosial dan lingkungan yang ada. Para penganut perspektif ini berusaha mengembangkan sebuah perekonomian alternatif yang memperhitungkan faktor-faktor sosial dan lingkungan, dengan mengembangkan cara-cara yang memungkinkan faktor-faktor sosial dan lingkungan diukur dan dimasukkan dalam analisis ekonomi yang benar-benar mencerminkan realitas sosial dan lingkungan.

**Kedua**, perspektif *alternative economics* yang mengupayakan sebuah perubahan lebih fundamental dengan mengembangkan sistem perekonomian berbasis masyarakat dan lebih terdesentralisasikan. Menurut mereka, aktivitas perekonomian konvensional tidak menjangkau masyarakat lapis bawah, yang tidak berdaya dan dimiskinkan oleh kapitalisme trans-nasional. Sistem ini mentransfer keuntungan dari wilayah miskin (negara-negara di selatan atau masyarakat di utara yang kurang beruntung secara ekonomi) kepada wilayah lebih kaya, yang cara demikian meningkatkan kesenjangan dan ketidak-adilan perekonomian. Sistem ini juga menyumbang kerusakan lingkungan dengan mengembangkan aktivitas perekonomian yang tidak berhubungan secara dekat dengan kehidupan dan pengalaman masyarakat lapis bawah dan tidak memperhitungkan kepekaan lingkungan. Analisis ini cenderung untuk memperjuangkan pengembangan perekonomian alternatif yang bersifat lokal seperti skema kredit dan perbankan masyarakat, sistem barter, sistem mata uang lokal dan penciptaan pekerjaan.

*Ketujuh*, aliran *work, leisure and the work ethic* (kerja, waktu luang dan etika kerja). Menurut perspektif ini, pemahaman terhadap kerja dan waktu luang, peranan pekerjaan, pembagian tenaga kerja dan pasaran kerja adalah bagian dari masalah yang menyebabkan krisis lingkungan yang sekarang dihadapi oleh dunia. Tentu saja dunia kerja dan pekerjaan menghadapi perubahan besar dan

tampaknya perubahan akan berjalan terus. Pengangguran adalah salah satu masalah sosial besar dalam masyarakat modern. Sistem perekonomian konvensional tampaknya hanya dapat mengatasi masalah pengangguran secara efektif dengan menggenjot tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara ekologis bertentangan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam.

Oleh karena itu, para penganut perspektif *Green* menyatakan bahwa reformulasi secara radikal terhadap kerja dan waktu luang adalah hal mendasar untuk sebuah kesuksesan. Keinginan ini bisa diwujudkan dengan membuat pekerjaan lebih berbasis masyarakat dan diupayakan bentuk-bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pokok masyarakat misalnya melalui skema penjaminan pendapatan minimum, yang cara demikian akan memungkinkan masyarakat memperoleh status dari pekerjaan tidak bayar seperti halnya kegiatan yang dibayar.

*Kedelapan*, aliran *global development* (pembangunan global). Problem kerusakan lingkungan umumnya dihadapi oleh negara-negara selatan atau negara-negara berkembang, yang ditandai dengan tingginya tingkat polusi di wilayah perkotaan, penurunan kualitas tanah secara massif, tingginya tingkat pertumbuhan polusi dan rusaknya wilayah hutan belantara sebagai hutan tropis secara cepat. Kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan negara-negara berkembang yang melaksanakan pembangunan ekonomi melalui pengembangan industri, pemanfaatan tanah secara lebih efisien dan eksploitasi kekayaan alam.

Di sini, penting untuk ditekankan bahwa pemerintahan di negara-negara berkembang hanya berupaya menyamai suksesnya perekonomian yang dicapai oleh kebanyakan negara maju, dengan mengikuti jalur yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian melalui proses industrialisasi. Untuk itu, dapat dimengerti jika mereka marah terhadap kritik para pemerhati lingkungan dari negara-negara kaya, dengan menekankan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi. Tentu saja permasalahannya menjadi jelas bahwa bumi tidak dapat menopang kekayaan negara-negara maju dalam waktu yang sangat lama. Jika seluruh dunia membangun dengan level yang sama seperti negara-negara industri maju tentu saja akan mempercepat eskalasi krisis lingkungan.

Analisis ini menciptakan sebuah problem moral bagi kalangan pencinta lingkungan di negara-negara maju. Berbagai kebijakan pemerintahan di negara-negara berkembang yang merusak lingkungan seperti pembangunan bendungan, penabangan kayu, pembukaan hutan untuk lahan pertanian, pengembangan kekuatan nuklir, mendorong industri yang berpolusi tinggi dan lain-lain harus ditentang demi menjaga planet ini. Di sini lain, para pecinta lingkungan negara-negara berkembang bertanggung jawab untuk mengadakan perubahan dan menunjukkan bagaimana mengembangkan lingkungan yang berkesinambungan bersama masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan yang membebani negara-negara berkembang tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintahan di wilayah ini, sebab mereka

menerima akibat dari kebijakan negara-negara maju. Dalam hal ini, dibutuhkan kesadaran lintas negara untuk bersama-sama memecahkan problem lingkungan melalui gagasan pembangunan global. Pembangunan global tidak hanya menyediakan suntikan modal pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang, namun lebih dari itu ia menyediakan kebutuhan modal lintas bangsa dalam mengatasi masalah lingkungan. Dengan demikian, negara-negara maju dianggap turut bertanggung-jawab secara langsung terhadap munculnya problem lingkungan di negara-negara berkembang.

Dari perspektif ini, ada dua poin pemikiran penting yang dibuat. Pertama bahwa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan secara berkesinambungan di negara-negara berkembang menuntut perubahan sikap mendasar dari negara-negara maju. Kedua, pendekatan holistik dan sistematis dari perspektif *Green* menekankan bahwa kita hidup di bumi yang terbatas dan bahwa semua orang adalah saling berhubungan demi kehidupan sekarang dan sampai akhir.

*Kesembilan*, aliran *eco-philosophy* (filsafat lingkungan). Aliran ini berupaya membangun basis filosofis untuk kalangan pecinta lingkungan. Para pengembang aliran ini seperti Robyn Eckersley dan Warwick Fox telah mengidentifikasi bahwa hal esensial dari sifat antroposentris yang mendominasi cara pandang orang-orang Barat adalah menganggap manusia sebagai spesies yang khusus dan berbeda dari makhluk hidup yang lain. Dari perspektif ini dikembangkan pandangan bahwa species manusia bisa dan harus mendominasi dunia dan mensubordinasikan kepentingan spesies lain pada kepentingan manusia. Sikap mental eksploitatif ini juga diterapkan pada alam materi. Oleh karena itu, tindakan manusia dihargai sehubungan dengan pengaruhnya terhadap manusia yang lain, bukan spesies lain atau planet secara keseluruhan. Manusia dalam kerangka antroposentris, tidak dilihat sebagai bagian dari jaringan interaksi yang kompleks dari alam semesta.

Hubungan antara cara pandang antroposentris dengan kerusakan lingkungan cukup jelas. Untuk itu, dalam pandangan Robyn Eckersley dan Warwick Fox, perlu dikembangkan sebagai sebuah alternatif kerangka kerja filosofis dalam menjustifikasi tindakan. Mereka mengembangkan pendekatan yang dinamai *eco-centrism* (sebagai penentangan terhadap *antroposentrism*), yang menekankan bahwa manusia tidak diperlakukan secara khusus ketika membandingkannya dengan makhluk hidup yang lain, namun ia tidak lebih sebagai bagian dari sistem lingkungan secara menyeluruh dengan dilengkapi nilai-nilai keutamaan. Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan nilai-nilai intrinsik bagi alam, tidak menilai spesies manusia dengan nilai-nilai instrumental yang sederhana. Pendekatan ini diperlukan jika kita ingin mewujudkan kesinambungan ekologis. Sebagai analisis, pandangan ini juga digunakan untuk mendasari gerakan yang membela hak-hak binatang. Aliran *eco-philosophy* dalam perkembangannya melahirkan konsep *deep ecology*. *Deep ecology* adalah sebuah istilah yang diterapkan sebagai pendekatan dalam ilmu lingkungan dengan karakteristik yang menekankan integrasi secara mendalam antara nilai sosial, ekonomi, kepribadian dan spiritual dalam perspektif ekosentris.

*Kesepuluh*, aliran *new paradigma thinking* (paradigma pemikiran baru). Paradigma artinya cara pandang di mana di dalamnya teori, praktek, pengetahuan, sains, tindakan dan lain-lain dikonseptualisasikan. Paradigma adalah seperangkat asumsi, gagasan, pemahaman dan nilai-nilai yang menyusun aturan terhadap apa yang dinilai relevan atau tidak relevan, pertanyaan apa yang harus dan tidak ditanyakan, apakah pengetahuan dianggap sebagai sah dan apakah praktek dapat diterima. Thomas S. Kuhn, yang menyatakan pentingnya paradigma dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1970) telah menjelaskan bahwa kegiatan ilmiah senantiasa berjalan dalam sebuah paradigma tertentu. Setelah perjalanan waktu, sebuah paradigma terbukti tidak memadai sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan pengetahuan baru. Sebagai akibatnya, terjadi revolusi yang menghasilkan pengembangan paradigma baru dan reorientasi pemikiran ilmiah dalam sebuah pandangan yang baru. Peralihan dari fisika Newtonian ke fisika relativitas dan teori kuantum adalah contoh nyata tentang perubahan paradigma.

Paradigma ini bisa diterapkan dalam bidang yang lebih luas. Para penulis dari berbagai disiplin ilmu mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang sekarang dihadapi oleh dunia bisa dipahami sebagai akibat dari tidak memadainya paradigma dominan yang secara beraneka-ragam didefinisikan sebagai Barat, industrial, Cartesian, Newtonian, mekanistik dan nama-nama lain. Mereka berpendapat bahwa paradigma atau cara pandang ini di era sekarang sudah semakin tidak berfungsi.

Kita mungkin tidak dapat mengatasi tekanan masalah jika tidak mengembangkan sebuah alternatif paradigma pemikiran baru. Ketika tidak semua penulis memiliki kepedulian terhadap keadaan ini muncullah gerakan *Green* yang memfokuskan pada upaya pencarian paradigma pemikiran baru. Beberapa penulis dari perspektif *Green* mengkritisi paradigma ilmiah yang mendominasi peradaban masyarakat modern seperti filsafat dari masa pencerahan (*Enlightenment*), fisika Issac Newton, filsafat dan matematik Rene Descartes, teori ilmiah Bacon utilitarianisme Bentham, teori politik John Locke dan pemikiran ekonomi Adam Smith. Paradigma yang dominan ini menekankan obyektifitas, rasionalitas ilmiah dan tidak menghargai pengalaman subyektif, intuitif dan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain. Metode ilmiah melihat alam sebagai sebuah mekanisme teratur dan tugas sains adalah menemukan hukum-hukum yang di dalamnya alam bekerja, melalui sebuah proses rasional dan linear. Untuk mengerjakan ini, sains memecah mesin itu menjadi bagian-bagian komponen, meneliti masing-masing bagian secara mendetail, bagian-bagian ini secara bersama-sama menyusun keseluruhan. Pemahaman terhadap bagaimana mesin bekerja seperti ini memungkinkan manusia untuk memahami, mendominasi dan mengeksploitasi alam.

Sungguh, kemajuan dilihat sebagai tujuan utama dari peradaban manusia. Seperti halnya susunan mesin yang dipecah dalam bagian-bagian komponen, masyarakat dilihat sebagai susunan dari individu-individu. Tindakan dan keinginan individu adalah hal yang paling penting. Dengan demikian, sistem

ekonomi dan sosial cenderung dilihat dalam kaitan antara individu dan tindakan individu-individu dalam kepentingan mereka sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Pandangan ini didasarkan atas rasionalitas ilmiah, kemajuan, individualisme, dominasi terhadap alam, teknologi, eksploitasi dan lain, yang menjadi konteks bagi meningkatnya kapitalisme, revolusi industri, inovasi teknologi, pertumbuhan, perusakan alam, penguatan patriarki dan pengembangan alienasi struktur secara lebih luas. Semuanya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya krisis lingkungan sekarang, kemerosotan nilai-nilai yang mengikat masyarakat, meluasnya kecenderungan keluarga untuk menjadi invidual dan meningkatnya bentuk-bentuk perpecahan dalam keluarga kecil.

Perlawanan terhadap paradigma dominan ini muncul dari berbagai sumber. Secara signifikan, salah satu kekuatan penting yang menentang paradigma dominan berasal dari ilmu eksakta. Prinsip *uncertainty* (tidak menentu) Heisenberg, fisika Kuantum, teori ketidak teraturan (*chaos*) dan relativitas adalah representasi dari gugatan para saintis belakangan terhadap paradigma sains tradisional yang menekankan bahwa gejala alam dapat diramalkan, teratur dan tertentu. Sebaliknya mereka mengakui eksistensi yang tidak dapat diramalkan dan tidak menentu.

Dalam ilmu sosial, kritik terhadap positivisme dan empirisme mempunyai pengaruh sama terhadap paradigma dominan. Ilmu sosial dibangun di atas analogi ilmu eksakta tradisional, dengan kajian empirik obyektif terhadap fenomena sosial, seolah-olah mereka adalah susunan benda-benda yang dapat diukur menurut hukum-hukum universal. Cara ini menunjukkan inkonsistensi logika dan kurang memadainya dalam membahas interaksi yang kompleks dari fenomena sosial. Pengembangan paradigma penafsiran alternatif serta teknik-teknik penelitian kualitatif dan naturalistik mewakili upaya untuk sebuah alternatif terhadap paradigma dominan.

Dari kajian humanities muncul post modernisme yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran sosial dan politik serta memiliki pengaruh penting terhadap pencarian formulasi alternatif paradigma pemikiran. Ia menolak paradigma dominan sebagai sesuatu yang esensi dari modern, mengupayakan model produksi budaya yang berbeda-beda dan non-linear serta menolak bentuk-bentuk logika dan wacana konvensional. Menurut post modernisme, realitas tidak bisa lagi dipahami dalam hubungan meta narrative tunggal namun ia disifati dengan wacana yang ganda, makna yang bermacam-macam, redefinisi simultan terus menerus serta mengupayakan model penyatuan dan perpaduan tunggal.

Dalam berbagai disiplin, gerakan lain seperti post industrialisme, feminisme, post positivisme, teori kritik dan post kolonialisme dapat juga dianggap sebagai bagian dari sebuah gerakan besar yang mempertanyakan validitas dan relevansi paradigma dominan atau pandangan Barat. Jadi, istilah *new paradigm thinking* mencakup upaya intelektual yang luas dan melakukan identifikasi hubungan yang penting antara analisis yang muncul dalam berbagai disiplin.

Salah satu penulis terkenal yang berpendapat perlunya paradigma pemikiran baru dalam memandang alam, bagaimana alam bekerja dan menempatkan dimensi kemanusiaan pada alam adalah Fritjof Capra. Capra dalam bukunya yang terkenal *The Turning Point* (1982), mengembangkan paradigma pemikiran baru yang menekankan pentingnya perspektif holistik bukan pandangan linear terhadap alam dan paradigma yang menghargai keseimbangan manusia dengan alam, bukan menekankan paradigma yang membiarkan pengrusakan alam.

Kelompok *Green* juga dikenal mengembangkan paradigma pemikiran baru, sebuah paradigma pemikiran yang secara esensial berhubungan dengan proses pemikiran, intelektualisasi, penelitian dan cara kita memperhatikan alam. Paradigma baru ini yang dikembangkan oleh kelompok *Green* antara lain: eco-feminism, alternative economics dan kritik terhadap teknologi. Pembahasan tentang hal ini sudah diuraikan dimuka.

. Sebagai kristalisasi penjelasan, kesepuluh aliran pemikiran *Green* di atas dapat disederhanakan melalui tabel di bawah ini:

**Berbagai Aliran Pemikiran Green**

No.	Aliran	Pandangan tentang sumber utama masalah ekologi	Solusi yang diinginkan
1	Eko-sosialisme	Ideologi kapitalis.	Sistem masyarakat sosialis
2	Eko-anarkisme	Hirarki, birokrasi, pemerintahan	Desentralisasi, kontrol oleh lokal, dan penghapusan kontrol pemerintah pusat.
3	Eko-feminisme	Sistem patriarkhi	Revolusi feminis, penghargaan kepada kewanitaan, dan penghapusan penindasan jender.
4	Eko-ludisme	Teknologi	Teknologi berskala kecil, mengakhiri "kemajuan" teknologi tanpa batas.
5	Anti-pertumbuhan	Pertumbuhan (ekonomi, penduduk, konsumsi, dan lain-lain.	Masyarakat tanpa pertumbuhan.
6	Prinsip-prinsip ekonomi Kelompok <i>Green</i>	Teori ekonomi konvensional	1. ekonomi berkelanjutan termasuk eksternalitas. 2. Ekonomi desentralisasi.
7	Pekerjaan dan	Definisi tentang	Definisi baru ttg. "kerja"

	pasar buruh	“kerja”, pengutamakan pasar buruh sebagai mekanisme distribusi.	dan “waktu luang”, pendapatan dasar yang terjamin.
8	Pembangunan global	Dominasi an eksploitasi	Keadilan global.
9	Filsafat Lingkungan	Pandangan dunia yang antroposentris.	Pandangan dunia yang egosentris.
10	Pemikiran paradigma baru	Cartesian, <i>linear- thinking</i>	Sistemik

(Ife Jim, 1997: 41).

Berbagai aliran dalam perspektif *Green ini* tidaklah saling menolak (*mutually exclusive*) antara satu dengan lainnya. Aliran-aliran itu saling memperkuat atau tidak saling kontradiktif. Unsur-unsur dari setiap aliran itu dapat diringkaskan ke dalam empat prinsip dasar dari perspektif ekologi berikut:

Prinsip pertama, holisme. Prinsip ini menuntut bahwa setiap peristiwa atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan hanya bisa dipahami secara tepat dengan merujuk kepada setiap bagian lain dalam sistem yang lebih besar. Prinsip ini memberi beberapa konsekuensi, yaitu: (a) filsafat yang berpusat pada ekologi, (b) respek pada kehidupan dan alam, (c) penolakan terhadap solusi-solusi linear dan (d) penekanan perubahan organik.

Prinsip kedua, sustainabilitas. Prinsip ini berarti bahwa sistem-sistem harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang; bahwa sumber daya alam seharusnya digunakan hanya dalam ukuran yang bisa diperbaharui lagi; bahwa sumber daya energi yang bisa diperbaharui lah yang digunakan; bahwa output terhadap lingkungan dibatasi pada tingkat yang bisa diserap; dan bahwa konsumsi haruslah dibatasi. Artinya, prinsip ini memberi beberapa konsekuensi, yaitu: (a) konservasi, (b) konsumsi terbatas, (c) ekonomi tanpa pertumbuhan, (d) pembatasan pengembangan teknologi, dan (e) anti kapitalis.

Prinsip ketiga, diversitas atau kemajemukan. Prinsip ini menekankan bahwa tidak perlu hanya satu jawaban atau satu cara yang benar dalam memecahkan masalah. Sebagai konsekuensinya, prinsip ini menghargai keragaman, tidak ada jawaban tunggal, adanya desentralisasi, komunikasi literal, jaringan kerja serta pengembangan teknologi sederhana.

Prinsip keempat, ekuilibrium atau keseimbangan. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan antara sistem-sistem dan kebutuhan akan keseimbangan di antara semua sistem itu. Sistem-sistem yang memiliki potensi konflik harus dikendalikan menjadi interaksional sehingga semua sistem itu dapat hidup bersama, koeksistensi, bahkan saling tergantung, interdependen.

Keempat prinsip yang merangkum berbagai perbedaan aliran pemikiran *Green Responses* di muka sangat diperlukan dalam mendasari berbagai model

pengembangan masyarakat. Namun di sini perlu diingatkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum merangkum isu-isu lain yang mendasar bagi pengembangan masyarakat seperti prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, pemberdayaan dan lain-lain. Perspektif *social justice* (keadilan sosial) perlu diungkapkan sebagaimana mestinya karena ia akan menyempurnakan sudut pandang kita ketika menangani krisis lingkungan.

## **B. Keadilan Sosial : Sebuah Visi Pengembangan Masyarakat**

Keadilan sosial menjadi prinsip penting dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Keadilan sosial (*social justice*) bekerja saling melengkapi dengan perspektif ekologi. Keduanya sesungguhnya tidak bisa saling dipisahkan. Keadilan sosial tidak lengkap tanpa adanya perlindungan terhadap kelestarian ekologi (perspektif ekologis). Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat.

Kebijakan kenaikan pajak minyak bumi bagi kendaraan bisa menimbulkan masalah bagi para pengguna kendaraan bermotor. Dampaknya adalah orang-orang dengan standar kehidupan menengah ke bawah akan semakin “sulit hidup dan orang-orang tersebut tidak bisa dengan nyaman menggunakan minyak bumi untuk transportasi, perumahan dan lain-lain. Dalam hal ini, perspektif keadilan sosial melihat permasalahan diatas hanya dari satu elemen yang melibatkan sektor transportasi.

Perspektif global menempatkan pertimbangan implikasi global dalam aktualisasi keadilan sosial (*social justice*). Perspektif global menjadi perhatian utama dari gerakan “*Green Peace*”, sebagai bagian dari upaya mereka dalam menyelamatkan planet bumi dari kehancuran/kepunahan. Mereka menekankan bahwa para penguasa dan pemimpin harus melihat dunia secara global, sebagai “*single system*”. Dengan perspektif global maka masalah-masalah lingkungan/pembangunan akan bisa dipecahkan bersama-sama secara internasional. Ketika dunia dihadapkan pada masalah hujan asam, rumah kaca (*green house*”, penipisan ozon dan lain-lain akan di pikirkan dan dipecahkan secara bersama-sama oleh semua bangsa.

Globalisasi seringkali dikaji dan dipahami hanya dari aktifitas ekonomi. Pemahaman yang dikenal hingga kini adalah melihat globalisasi hanya dari kaca mata ideologi tentang perdagangan bebas (*free trade*) dan rasionalisasi ekonomi. Namun belakangan, ada pemahaman/kajian yang menunjukkan suatu kemungkinan adanya globalisasi dari bawah (*globalization from below*). Globalisasi dari bawah ini mengupayakan suatu integrasi antara *Green movement* (gerakan hijau) dengan perspektif keadilan sosial (*social justice*), dengan mengembangkan paham-paham internasional (perspektif global) yang diangkat dari bawah (*below*). Tampaknya integrasi ini berdampak positif dan signifikan bagi pengembangan masyarakat.

Term keadilan sosial sering digunakan dalam berbagai makna. Dalam kerangka pengembangan masyarakat, term keadilan sosial dibangun di atas enam prinsip yaitu: ketimpangan (*structural disadvantage*), pemberdayaan

(*empowerment*), kebutuhan (*needs*), hak asasi manusia (*human rights*, perdamaian tanpa kekerasan (*peace non-violence*) dan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) (Ife, Jim, 1997: 51).

#### 1. Ketimpangan Struktural

Teori keadilan yang dikonsepsikan oleh John Rawls (1972) biasanya menjadi *starting point* (titik berangkat) dalam diskusi tentang keadilan sosial. Dia menyimpulkan, ada beberapa prinsip yang menjadi kriteria sebuah keadilan. *Pertama*, persamaan dalam kebebasan-kebebasan dasar. *Kedua*, persamaan kesempatan untuk maju. *Ketiga*, diskriminasi positif bagi rakyat jelata untuk memastikan persamaan. Ketiga prinsip ini dalam perkembangannya dirasakan belum memadai dalam merespon semua problem sosial dan isu sosial yang muncul di era kontemporer. Oleh karena itu, Taylor Gooby dan Dale (1991) membangun beberapa perspektif dalam membahas isu-isu sosial, yang meliputi: perspektif individual, reformis struktural, struktural dan sesuai dengan perkembangan literatur terbaru bisa ditambahkan dengan perspektif post struktural.

Dengan perspektif individual, masalah-masalah sosial dilihat sebagai masalah individu. Oleh sebab itu, perlu diupayakan solusi-solusi yang berbasis individual. Misalnya: kemiskinan, kejahatan, bunuh diri, depresi dan pengangguran dilihat sebagai akibat dari pengaruh penyakit (baik psikologis, biologis atau moral) dalam diri individu. Solusi yang dilakukan berpijak pada terapi atau pengobatan secara individual seperti bimbingan, nasihat moral, hukuman, pengobatan medis atau penyesuaian perilaku.

Dengan perspektif reformis institusional, problem sosial ditempatkan dalam struktur kelembagaan dari sebuah tatanan masyarakat. Dengan demikian, kurang memadainya sistem (peradilan, kepolisian dan penjara dan lain-lain) dilihat sebagai penyumbang terjadi masalah kejahatan dan penyimpangan. Tidak memadainya atau tidak efektifnya sistem jaminan sosial dianggap telah mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial itu adalah dengan melakukan perbaikan, penguatan dan pengembangan kelembagaan seperti rumah sakit, sekolah, lembaga peradilan, klinik, kantor sosial, lembaga amal dan pelayanan bagi para pengangguran.

Adapun perspektif struktural melihat problem sosial bersumber dari struktur sosial yang timpang dan menindas. Pendekatan ini cenderung menyalahkan sistem yang melanggengkan budaya patriarki, kapitalisme, rasisme kelembagaan, ketidak-adilan pembagian income dan lain-lain. Sistem yang bercorak demikian diidentifikasi telah menyebabkan terjadinya penindasan dan ketidak-adilan struktural. Oleh karena itu, resep mereka untuk memecahkan masalah sosial dan membuat perubahan adalah melakukan penataan kembali struktur masyarakat seperti kelas sosial, ras maupun gender.

Perspektif yang terakhir adalah pos-strukturalis. Perspektif ini

merujuk pada karya-karya Foucault (1972, 1973, 1979) dan beberapa penulis pos modernis. Mereka adalah penulis yang menaruh perhatian tentang “*discourse* (wacana)” yang berhubungan dengan problem khusus. Menurut mereka, problem muncul akibat penggunaan bahasa, pemilihan makna, pembentukan dan akumulasi pengetahuan dan berbagai cara yang digunakan untuk mengontrol dan mendominasi melalui penentuan konformitas (kecocokan), perbuatan yang pantas dan lain-lain. Perspektif ini menolak pemahaman bahwa realitas adalah obyektif dan pasti sebagaimana dianut oleh kebanyakan penganut perspektif struktural. Perspektif post struktural menyalahkan wacana yang dipakai oleh perspektif struktural. Perspektif ini kurang peduli dengan pemecahan masalah. Akan tetapi, ia cenderung mengarah pada upaya mendefinisikan kembali wacana, melakukan pemahaman dengan sharing pengetahuan dan makna-makna, membolehkan orang-orang mengakses wacana dan pemahaman serta melakukan pemahaman dalam rangka mencari titik-titik kelemahan pada aturan-aturan pokok berwacana yang mungkin telah dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

Kajian tentang isu-isu sosial dalam empat perspektif di atas bisa dirangkum melalui skema berikut:

<b>Perspektif</b>	<b>Sumber “Kesalahan”</b>	<b>Persepsi tentang Masalah</b>	<b>Solusi yang Ditawarkan</b>
Individual	Korban	Patologi individual, penyakit psikologis, biologis dan moral atau karakter	Terapi, perlakuan medis, penyesuaian perilaku, nasehat moral dan kontrol
Reformis institusional	Pelindung	Institusi-institusi yang dibangun untuk menangani masalah sosial: pengadilan, sekolah, badan-badan kesejahteraan dan	Reorganisasi institusi-institusi, memperkuat sumber daya, memperbanyak pelayanan, memperbaiki pelatihan dan lain-

		lain-lain.	lain
Struktural	Sistem	Penindasan, ketidak-adilan struktural: kelas, ras, jender, pembagian pendapatan, kekuasaan dan sebagainya.	Perubahan struktural, mengubah basis penindasan, gerakan pembebasan, revolusi
Pos-struktural	Diskursus	Modernitas, bahasa, formasi dan akumulasi pengetahuan, pembagian pemahaman	Analisis dan pemahaman diskursus, akses terhadap pemahaman, menentang aturan-aturan dan lain-lain.

### 3. Pemberdayaan (*empowerment*)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post-strukturalis*.

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya

pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan (*how to compete within the rules*)

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.

2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumberdaya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi (Ife, Jim, 1997: 60-62).

Faktor lain yang menyebabkan ketidak-berdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang seringkali terjadi di masyarakat meliputi:

1. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti: perbedaan kelas seperti antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan; ketidaksetaraan jender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas.
2. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah *gay-lesbi*, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan).
3. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidak-berdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*,

pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Ife, Jim, 1997: 63-64).

### 3. Kebutuhan

Ada dua cara yang perlu dilihat sebagai dasar bagi keadilan sosial dan pengembangan masyarakat. Pertama, adanya sebuah keyakinan bahwa orang atau masyarakat menginginkan agar kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi. Kedua, orang atau masyarakatnya seharusnya bisa menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan positivis tradisional, kebutuhan dianggap sebagai realitas obyektif, bebas nilai dan diukur. Dengan demikian, "*need assessment* (pengukuran kebutuhan) dianggap sebagai teknis yang sudah teruji secara metodologis dalam mengukur sebuah kebutuhan. Berdasarkan pada metodologi dan keahlian teknis, kebutuhan masyarakat pada suatu situasi hanya bisa diukur dan ditentukan secara memadai oleh para ahli yang trampil dalam menggunakan metodologi *need assessment*. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan tidak dilakukan oleh warga masyarakat yang memiliki kebutuhan dan diletakkan di tangan para penentu kebutuhan yang profesional seperti pekerja sosial, peneliti sosial, ahli psikologi dan lain-lain.

Dengan perspektif ini, Bradshaw membagi kebutuhan menjadi empat. *Pertama*, kebutuhan normatif (*normative need*), yaitu kebutuhan yang dirumuskan oleh para penguasa, sesuai dengan standar yang diterima (seperti batas-batas kemiskinan). *Kedua*, kebutuhan yang dirasakan (*felt need*), yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang mau menaruh perhatian. Kebutuhan ini diuji misalnya, melalui survei sosial. *Ketiga*, kebutuhan yang diungkapkan (*expressed need*), yaitu kebutuhan yang diungkapkan oleh orang-orang yang mencari berbagai bentuk pelayanan (diuji melalui pengamatan daftar tunggu, pesanan pelayanan dan lain-lain). *Keempat*, kebutuhan komparatif (*comparative need*), yaitu kebutuhan yang merujuk pada perbandingan pemenuhan layanan dengan ukuran nasional atau regional. Pembagian kebutuhan menurut Bradshaw ini didasarkan pada perumusan kebutuhan yang dibuat oleh para ahli dan konsepsinya tentang kebutuhan secara esensial masih berada dalam kerangka positivis.

Beberapa ahli menolak perspektif positivis tradisional ini. Illich menganggap perspektif itu dibangun karena meningkatnya kekuatan kaum profesional. Perspektif ini membawa konsekuensi pada melemahnya kekuatan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, perspektif profesional ini bersifat konvensional karena didasarkan pada

asumsi bahwa ketidak-berdayaan masyarakat cenderung memperlemah kondisi yang telah ditindas serta tidak mengakui hak masyarakat untuk menentukan dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sebaliknya, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kebutuhan bukan bebas nilai dan obyektif. Alangkah baiknya, kebutuhan dipahami dalam perspektif yang menggunakan perhitungan nilai-nilai, ideologi dan mengembangkan pemikiran liberasi bukan penindasan.

#### 4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah mendasar dalam setiap memahami keadilan sosial. Dalam memahami HAM, terdapat kontroversial antara pandangan universalistik dan relativistik. Pandangan pertama, yang di anut oleh negara-negara Barat dan organisasi non-pemerintah seperti Badan Amnesti Internasional menekankan bahwa HAM itu bersifat universal dan absolut. Oleh karena itu, HAM dapat dan harus diterapkan di seluruh masyarakat dan lingkungan tanpa pandang bulu.

Pandangan kedua, yang dianut oleh sebagian negara Asia menekankan bahwa HAM harus dipahami dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, HAM bersifat relatif. Sementara pemahaman HAM yang dominan sejauh ini esensinya hanya mewakili konsepsi kalangan Barat. Pandangan HAM yang universalistik ini dikritik sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang opresif.

Namun dalam konteks pengembangan masyarakat, pandangan HAM yang universalistik lebih berguna dalam menyediakan kerangka kerja dalam yang sesuai dengan perspektif keadilan sosial. HAM universalistik ini berdasarkan Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang isinya berupa pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebebasan, hak persamaan di mata hukum, hak bebas dari ketakutan, bebas berorganisasi, perlindungan terhadap diskriminasi dan lain-lain. Ada juga dua perjanjian internasional PBB yang mengakui hak-hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja, hak mendapatkan pendapatan memadai, hak untuk berpendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pakaian dan perumahan, hak untuk bergabung dalam organisasi dan lain-lain. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia dan bisa dimintai pertanggung-jawaban jika tidak melaksanakannya. Beberapa pernyataan dalam dokumen ini memiliki implikasi signifikan dan bisa digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai legitimasi terhadap program-program pemberdayaan.

Perlu dijelaskan bahwa hak asasi berhubungan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban. Hal ini berjalan dalam dua level: hal yang paling mendasar bahwa kewajiban terhadap orang lain mengikuti hak-hak asasi orang tersebut. Dengan demikian, ada sebuah pernyataan bahwa orang memiliki hak untuk bebas berbicara dengan

implikasi bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk tidak menolak hak orang berbicara bebas. Di sini, ada pernyataan tentang hak asasi yang menekankan beberapa pembatasan terhadap kebebasan terhadap orang lain. Masalah ini penting bagi kerja kemasyarakatan, di mana hak dan tanggung jawab sangatlah penting, yang keduanya berhubungan erat.

Dalam perspektif keadilan sosial, upaya mengembangkan hak-hak asasi masyarakat lapis bawah menuntut tiga pendekatan yang saling berkaitan. Pertama, mereka harus dibantu untuk mengetahui hak-haknya. Kedua, mereka harus dibantu untuk menuntut dan menentukan hak-hak-haknya. Ketiga, mereka harus dibantu untuk mewujudkan dan menggunakan hak-haknya. Ketiga pendekatan ini menjadi model yang relevan untuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

#### 5. Perdamaian dan Non-kekerasan

Perdamaian secara sederhana adalah tidak adanya perang. Perdamaian dalam pengertian luas mencakup konotasi lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pribadi seperti ketiadaan stres dan konflik. Seperti perdamaian, kekerasan bisa dipahami pada level sederhana (kekerasan fisik oleh perorangan dan kelompok).

Kemungkinan ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan jika tujuan yang diinginkan oleh masyarakat secara universal untuk hidup damai dan tidak ada kekerasan belum terwujud. Pertama, masih adanya hambatan-hambatan struktural, kuatnya *vested interest* (kepentingan pribadi) dari pihak-pihak yang menentang perdamaian. Kedua, metodologi yang dipakai dalam mewujudkan perdamaian tidak memadai dan tidak cocok. Dalam kasus perdamaian dan tidak adanya kekerasan, jelas-jelas masih ada berbagai keinginan dan struktur sosial yang menentang keras upaya perdamaian, misalnya karena paham nasionalisme, sektarianisme, perlindungan kepada keistimewaan yang dimiliki dan ketidakadilan global, patriarkhi, kolonialisme, keuntungan, perdagangan senjata dan lain-lain..

Perspektif non kekerasan, selain menyarankan penggunaan metode konvensional dalam menciptakan perdamaian, juga menyarankan agenda perubahan sosial dalam menciptakan perdamaian.

Perspektif non-kekerasan menekankan adanya hubungan antara sarana dan tujuan. Ia mengkritik pandangan tradisional yang mengatakan tujuan menjustifikasi sarana (misalnya: peperangan dibenarkan dengan alasan untuk mewujudkan perdamaian; tindakan kekerasan oleh polisi dibenarkan dengan alasan untuk mengurangi kejahatan kekerasan dan-lain-lain) sebagai pelanggaran kekerasan. Upaya mengakhiri konflik dan kekerasan dengan menggunakan metode konflik dan kekerasan menjadi absah jika sarana dan tujuan jelas-jelas berbeda. Pemisahan antara tujuan dengan sarana ini merupakan aspek fundamental dalam sudut pandang positivistik.

Perspektif non-kekerasan juga mengkritik peran persaingan yang

dominan dalam masyarakat modern. Struktur kompetisi dan norma kompetisi berlaku dalam semua aspek masyarakat baik di tempat, kerja, perekonomian perdagangan, kebudayaan, hiburan dan lain-lain. Perspektif non-kekerasan menolak pandangan bahwa persaingan dan daya saing kedua-duanya adalah keinginan dari lahir dan melekat. Sebaliknya ia berupaya mengembangkan norma dan struktur kerjasama/kooperasi.

Salah satu penganjur non-kekerasan yang terkenal pada awal abad ke 20 adalah Gandhi. Gandhi menggunakan metode non-kekerasan dengan menekankan pembangunan konsensus dan tidak mempolarisasi masyarakat. Solusi yang bersifat konsensus dianggap sebagai cara yang lebih disukai untuk mengatasi konflik. Perspektif non-kekerasan ini mempengaruhi secara signifikan dalam kerja kemasyarakatan.

#### 6. Demokrasi Partisipatori

Demokrasi secara mendasar berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara umum demokrasi dapat diklasifikasi ada dua kelompok: demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatori. Dalam demokrasi perwakilan, masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, sementara dalam demokrasi perwakilan, peran masyarakat adalah memilih orang-orang (biasanya melalui pemilihan umum) yang kemudian dipercaya untuk membuat keputusan atas nama mereka.

Bentuk demokrasi perwakilan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan pada masyarakat besar, kompleks dan sentralis seperti masyarakat Barat modern. Mereka cenderung menerima demokrasi perwakilan sebagai bentuk demokrasi yang normal dan jarang mempertanyakannya. Namun pada tingkatan pemerintahan lokal, di mana model partisipatori menjadi lebih mungkin akan membuka jalan bagi upaya-upaya pengembangan alternatif berdemokrasi secara partisipatori.

Dalam hal ini, sebuah langkah yang mengarah pada model demokrasi partisipatori adakah sebuah komponen penting dalam strategi keadilan sosial. Ada empat ciri utama pendekatan demokrasi partisipatori yang penting untuk pengembangan masyarakat.

Pertama, desentralisasi. Prinsip utama desentralisasi adalah tidak ada keputusan atau fungsi pada level pusat kecuali sangat diperlukan. Demokrasi partisipatori menuntut adanya struktur-struktur yang terdesentralisasikan. Desentralisasi menjadi unsur utama dalam suatu pemikiran alternatif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis.

Kedua, pertanggung-jawaban. Perspektif konvensional memandang pertanggung-jawaban adalah pertanggung-jawaban ke atas atau pemerintahan pusat (dalam struktur birokrasi tradisional). Dalam perspektif demokrasi partisipatori, pertanggung-jawaban adalah pertanggung jawaban ke bawah atau berada di tangan rakyat.

Pertanggung-jawaban menjadi gagasan utama dalam demokrasi partisipatori. Demokrasi partisipatori tidak hanya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, namun menuntut mereka bertanggung-jawab dalam menjamin keputusan ini terlaksana.

Ketiga, pendidikan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hanya dapat diharapkan untuk bekerja dengan penuh kesuksesan jika mereka memiliki informasi secara cukup terhadap persoalan-persoalan yang diperbincangkan dan memahami konsekuensi terhadap keputusan-keputusan tertentu yang akan diambil. Untuk menjamin bahwa masyarakat telah dibekali kemampuan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi menuntut sebuah level kesadaran dan pendidikan (dalam arti luas, yang mencakup tumbuhnya kesadaran diri) secara lebih tinggi daripada sekedar pemahaman umum yang selama ini diperlukan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan. Memulai sebuah program demokrasi partisipatori tanpa sebuah program pendidikan adalah resep kegagalan.

Keempat, kewajiban. Hak dan kewajiban adalah berhubungan dan demokrasi partisipatori bisa dianggap sebagai salah satu contoh dari hak, yaitu hak masyarakat untuk menentukan sendiri. Sebuah kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tidak bernilai tinggi dalam masyarakat Barat Modern, di masyarakatnya sudah sangat hancur. Namun sebuah kewajiban adalah komponen kunci dalam demokrasi partisipatori. Seseorang tidak dapat menekan masyarakat untuk berpartisipasi, tapi sebuah iklim dapat diciptakan dalam masyarakat sehingga mereka merasakan adanya sebuah kewajiban atau tugas moral secara kuat untuk berpartisipasi (Ife, Jim, 1997: 77).

Upaya menumbuhkan partisipasi warga melalui program pengembangan masyarakat diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk hidup secara lebih bermutu, adanya realitas kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta perlunya tindakan konkrit dalam mengupayakan perbaikan kehidupan.

Partisipasi yang ingin dibangun melalui program pengembangan masyarakat berjalan secara bertahap, dimulai dari jenis partisipasi interaktif menuju tumbuhnya mobilitas sendiri (*self mobilization*) di kalangan warga. Partisipasi interaktif (*interactive participation*) adalah bentuk partisipasi masyarakat di mana ide dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program masih dibantu dan difasilitasi oleh pihak luar atau para aktivis LSM. Sementara itu, mobilitas sendiri adalah bentuk partisipasi di mana masyarakat mengambil inisiatif, melaksanakan kegiatan pada berbagai tahap secara mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

Kegiatan pengembangan masyarakat tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi atas nama (*taken participation*), partisipasi pasif (*passive participation*), partisipasi lewat konsultasi (*participation by consultation*,

partisipasi untuk insentif material (*participation for material incentive*) ataupun partisipasi fungsional (*functional participation*) (Riza Primahendra, 2003: 63). Partisipasi atas nama adalah partisipasi yang manipulatif di mana masyarakat hanya di atasnamakan melalui misalnya tokoh-tokoh formal atau pertemuan satu arah. Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi di mana masyarakat dilibatkan sebagai massa, peserta atau partisipan dari suatu kegiatan. Partisipasi lewat konsultasi adalah bentuk partisipasi yang menjadikan masyarakat sebagai subyek konsultasi dari ide kegiatan tertentu. Keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan bukan oleh masyarakat tetapi oleh pelaksana. Partisipasi untuk insentif material adalah partisipasi masyarakat karena adanya insentif material yang disediakan. Adapun partisipasi fungsional adalah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di mana persyaratan dan kondisi-kondisinya telah ditetapkan dalam suatu kerangka kerja atau kontrak.

### **C. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat**

Terdapat nilai-nilai kunci yang menjadi dasar bagi teori, tujuan, tugas, proses dan praktek pengembangan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar kegiatan, asumsi, komitmen dan prinsip pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat tampaknya sudah jelas sehingga bisa diketahui oleh siapa saja. Sebagai contoh, pengembangan masyarakat bersandar pada pandangan bahwa masyarakat kurang beruntung bisa sepenuhnya mengendalikan kehidupannya ketika struktur-struktur dan lembaga-lembaga diubah. Untuk mengubahnya adalah dengan menentang struktur kekuasaan yang sudah ada dan merebut kekuasaan dari kelompok dominan. Contoh lain, mengubah tradisi dominasi kaum laki-laki di lingkungan keluarga atau lembaga-lembaga resmi serta menuntut kalangan wanita berani menentang kekuasaan kaum laki-laki dan merebut kekuasaan dari kaum laki-laki.

Pendekatan pengembangan masyarakat terhadap masalah kemiskinan di masyarakat menolak kerangka kerja penalaran logis yang cenderung beranggapan bahwa masalah-masalah sosial sering telah dikonseptualisasikan. Respon terhadap problem sosial biasanya tidak berupa restrukturisasi sosial atau menata kembali struktur masyarakat yang timpang, tetapi hanya melalui pembinaan secara hati-hati terhadap orang-orang yang mengalami masalah, untuk tujuan penyesuaian psikologis mereka terhadap keadaan yang dialami. Pandangan berdasarkan nalar sehat ini kadang-kadang mengarah pada upaya mengidentifikasi kambing hitam dari munculnya problem sosial. Pandangan ini juga cenderung melokalisir penyebab kemiskinan pada diri individu sendiri.

Sebaliknya, pengembangan masyarakat melokalisir kemiskinan pada diskriminasi sistematis dan telah berakar dalam masyarakat kita, di mana jender, ras dan etnis menjadi kunci penentu bagi peluang kehidupan seseorang. Dari perspektif ini, berbagai masalah seperti kemiskinan,

diskriminasi ras dan kejahatan tidak dapat diatasi kecuali jika keyakinan, lembaga dan struktur yang memunculkannya dihilangkan.

Pengembangan masyarakat membuka pemikiran tentang bagaimana mengubah struktur, lembaga dan keyakinan. Metodenya mencakup:

- Menentang struktur yang ada, misalnya mengkampanyekan perlawanan terhadap pajak yang menguntungkan orang kaya.
- Memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat miskin, misalnya menjamin sebuah komunitas memiliki kepemilikan secara legal terhadap tanah tradisional mereka
- Menetapkan pilihan-pilihan, misalnya memberikan pilihan bagi isteri yang dipukul untuk bertahan di rumahnya sendiri tanpa dianiaya atau pindah ke tempat perlindungan perempuan.

Pengembangan masyarakat dengan berpijak pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh teori-teori sosial kritis seperti Marxis dan teori feminis dalam rangka mengkritisi praktek diskriminasi dan mengungkap struktur dan ideologi yang mendasari praktek diskriminasi. Tentu saja penggunaan kerangka konseptual dari kalangan kritis seperti ini menjadikan diskursus pengembangan masyarakat terlibat dalam kompleksitas perdebatan Marxis dan feminis.

Secara garis besar ada empat prinsip pengembangan masyarakat. *Pertama*, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Hal ini berbeda dengan pandangan yang berkembang pada kebanyakan akademisi dan profesional yang bekerja di dasari pemikiran terhadap pentingnya bersikap obyektif dan jujur. Pemikiran seperti ini melekat dalam argumen bahwa realitas dapat digenggam hanya ketika interes, pendapat dan nilai-nilai pribadi diabaikan, atau ketika masyarakat menjernihkan pemikirannya dari berbagai hal yang merintang "pengetahuan yang sebenarnya (*true knowledge*). Argumen ini dipengaruhi oleh berbagai disiplin seperti psikologi, ekonomi dan obyektifitas ilmiah dalam memperoleh fakta yang sebenarnya.

Pendekatan ilmiah yang paling utama dipakai para akademisi adalah data empiris (data yang dapat diamati). Data empiris ini harus digunakan sebagai sumber pengetahuan. Fakta-fakta bersifat netral. Obyektifitas pengetahuan sosial harus mempertimbangkan semua data empirik dengan tanpa memihak, tanpa penilaian atau pertimbangan moral.

Bagaimanapun, pengembangan masyarakat tidak menerima pandangan ilmuwan sosial ini. Sebaliknya, ia mulai dengan asumsi bahwa pengembangan masyarakat tidak bebas nilai, interpretasi obyektif atas masyarakat. Oleh karena itu, semua tindakan pribadi, praxis dan intelektual harus dibimbing oleh nilai-nilai dan kepentingan. Pengembangan masyarakat dalam kerangka ini berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Para aktivis pengembangan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mengidentifikasi berbagai pandangan yang

berbeda-beda, termasuk mereka yang menentang, mengumpulkan dan menganalisis data secara jujur, namun dalam aktualisasi penggunaan data mereka bersikap partisan. Mereka menggunakan data untuk kepentingan masyarakat, yang mereka sedang bekerja bersama dan untuk masyarakat. Meskipun demikian, para aktivis pengembangan masyarakat tetap harus menjadi analitis, teliti dan kritis pada diri sendiri (Kenny, Susan, 1994: 17).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat menolak obyektifitas dan kejujuran. Sebaliknya ia berkomitmen bagi:

- Masyarakat miskin dan keadilan sosial
- Hak asasi manusia dan kewarga-negaraan
- Pemberdayaan dan penentuan diri sendiri
- Tindakan kolektif
- Keaneka-ragaman

Prinsip pengembangan masyarakat yang *kedua* adalah mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk memenuhi tujuan ini, pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini, pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

Komitmen terhadap masyarakat tertindas dan miskin, memberdayakan dan mengadakan perubahan sosial seringkali memunculkan kesulitan bagi kehidupan para aktivis pengembangan masyarakat. Para aktivis yang dalam kesehariannya berada di sisi orang lemah kadang-kadang difitnah sebagai penghasut, diboikot dan kadang-kadang diancam. Respon ini datang tidak hanya dari kalangan yang berkuasa, tetapi juga dari warga yang tidak puas. Para aktivis pengembangan masyarakat tidak mundur dari konflik. Seringkali melalui konflik, mereka bergerak menjadi bentuk struktur dan relasi sosial yang berbeda-beda.

Prinsip pengembangan masyarakat yang *ketiga* adalah membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi dan struktur yang sangat berkuasa. Para aktivis pengembangan masyarakat adalah fasilitator bukan seorang pemimpin, ahli atau penghasut dalam proses pembebasan masyarakat.

Pembebasan secara individual atau secara berkelompok hanya bisa terjadi dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan bebas. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang warga negaranya aktif. Ia menolak dogma, keaneka-ragaman yang diasuh dan ruang diskusi yang dibatasi. Sebaliknya,

ia membuka ruang debat pada segala level dan segala topik yang sejauh mungkin dapat diakses oleh segenap anggota masyarakat.

Sebuah masyarakat terbuka mempersyaratkan adanya keterbukaan politik. Ketika terjadi debat secara sungguh-sungguh tentang apa yang merupakan keterbukaan politik, di situ ada persetujuan yang luas bahwa masyarakat harus menerapkan berbagai tipe demokrasi partisipatori, yaitu sebuah bentuk demokrasi yang didasarkan atas pandangan bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan bagaimana masyarakat harus berjalan dan apa yang menjadi tujuan utama dan tujuan yang akan diwujudkan. Demokrasi partisipatori bisa berfungsi jika dalam lingkungan yang informasinya mengalir bebas. Hal ini akan memungkinkan masyarakat sendiri mengambil inisiatif dalam mengembangkan dan menangani program ataupun berbagai usaha yang dampaknya bisa membentuk berbagai ketrampilan, sumber daya dan kemampuan memecahkan masalah.

Penciptaan sebuah masyarakat yang terbuka melalui mekanisme demokrasi partisipatori menuntut sebuah kebebasan penuh dalam proses politik dan penciptaan bentuk-bentuk demokrasi yang dapat diakses oleh semua pihak.

Prinsip *keempat* dalam pengembangan masyarakat adalah kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat mempunyai suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan. Organisasi masyarakat hendaknya dibangun di lokasi pinggiran kota atau perkampungan, bukan di pusat kota. Pelayanan masyarakat bertempat di gedung yang bisa diakses oleh warga masyarakat, dengan tujuan agar program-programnya bisa diintegrasikan dan dikoordinasikan secara langsung bersama warga masyarakat. Organisasi kecil pada level akar rumput biasanya bisa lebih mudah membangun partisipasi dari para anggota dan pertanggung-jawabannya lebih mudah daripada kantor pemerintah yang besar.

Berbagai uraian prinsip pengembangan di atas bisa dilacak sumber idenya melalui sejarah umat manusia sebagai inspirasi dalam mengarahkan umat manusia. Para aktivis pengembangan masyarakat mengambil pemaknaan baru untuk kelompok yang berbeda-beda dan wilayah yang berbeda-beda. Selama abad ke -20, prinsip-prinsip itu memberi tekanan yang kuat dalam politik pergerakan wanita dan tindakan kelas pekerja.

Uraian tersebut sifatnya sangat padat dan sebagian besar pembahasan bersumber dari tulisan Susan Kenny. Oleh karena itu, penulis pada bagian ini merasa perlu menghadirkan pembahasan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat secara lebih detail dengan menggunakan perspektif Jim Ife. Cara

ini diharapkan dapat memberikan perbandingan perspektif sekaligus mempertajam kajian terhadap prinsip-prinsip pengembangan masyarakat.

Menurut Jim Ife, pengembangan masyarakat mempunyai 22 prinsip. Antara satu prinsip sama yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip ini diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses atau tidaknya suatu kegiatan pengembangan masyarakat dan dianggap konsisten dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis (Ife, Jim, 1997: 178-198). Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai seperangkat prinsip dasar yang akan mendasari pendekatan pengembangan masyarakat bagi semua praktek kerja masyarakat.

### 1. *Pembangunan Menyeluruh*

Pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual, semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam aspek tersebut. Hal ini berarti bahwa keenam aspek berjalan bersama-sama dan mendapat porsi yang sama, tetapi mungkin salah satu diprioritaskan dengan tidak boleh meninggalkan yang lain. Contoh pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan kelima aspek pembangunan yang lain. Pembangunan masyarakat yang hanya mengkonsentrasikan pada satu aspek saja, akan menghasilkan pembangunan yang tidak lengkap. Oleh karena itu hal yang penting bagi pekerjaan masyarakat adalah selalu ke enam aspek tersebut secara bersama-sama.

### 2. *Me1awan Kesenjangan Struktural*

Pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap beraneka praktek penindasan kelas, jender dan ras. Sebagai konsekuensinya, pengembangan masyarakat tidak akan menimbulkan penindasan struktural baru. Oleh karena itu, para aktivis sosial harus mencermati praktek-praktek penindasan yang kemungkinan terjadi dalam institusi media, sistem sosial, struktur organisasi, bahasa, ekonomi, pasar dan iklan. Di luar hal itu, perlu juga dicermati adanya praktek penindasan karena umur, ketidakmampuan fisik dan keadaan jender. Struktur dan proses pengembangan masyarakat perlu mengarahkan kepada struktur penindasan yang dominan. Pengembangan masyarakat harus memfokuskan programnya kepada penanganan isu-isu kelas, jender, ras, umur, ketidakmampuan dan seksualitas untuk mencegah penindasan dimaksud.

### 3. *Hak Asasi Manusia*

Pengembangan masyarakat harus menjunjung tinggi penghargaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu memperoleh perhatian secara serius bagi pekerja masyarakat, baik dalam pandangan negatif (*protection of human right*) maupun positif (*promotion of human right*). Dalam pandangan negatif, hak asasi manusia adalah penting bagi pengembangan

masyarakat. Oleh Karena itu, setiap program pengembangan masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi dasar umat manusia. Dalam pandangan positif, para aktivis pengembangan masyarakat menjadikan Deklarasi Universal dan Hak-hak Asasi Manusia sebagai tujuan pengembangan masyarakat.

#### 4. *Berkelanjutan*

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, yang prosesnya dan strukturnya secara berkelanjutan. Setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus berjalan dalam kerangka berkelanjutan, bila tidak ia tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Keistimewaan dari prinsip berkelanjutan adalah ia dapat membangun struktur, organisasi, bisnis dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. Jika pengembangan masyarakat berjalan dalam pola berkelanjutan diyakini akan dapat membawa sebuah masyarakat menjadi kuat, seimbang dan harmonis, serta concern terhadap keselamatan lingkungan.

#### 5. *Pemberdayaan*

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan dan dipecahkan. Kendala-kendala ini berupa struktur yang menindas (kelas, ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi dan dominasi para elit dalam struktur kekuasaan masyarakat. Perlu dipahami oleh pekerja sosial bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan.

#### 6. *Personal dan Politik*

Keterkaitan antara personal dan politik, individu dan struktural atau masalah-masalah pribadi dengan masalah-masalah publik merupakan komponen yang penting dalam pembangunan sosial.

Keseluruhan pengalaman pribadi bisa dihubungkan dengan politik. Dengan cara ini, setiap perasaan dan tindakan bisa mempunyai implikasi politis. Setiap isu yang sifatnya pribadi bisa menjadi bagian sisi politik. Pengembangan masyarakat memiliki potensi untuk membangun hubungan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan politik. Upaya ini menjadi penting untuk membangkitkan kesadaran, memberdayakan dan mengembangkan suatu program tindakan terhadap pemecahan masalah.

#### 7. *Kepemilikan Masyarakat*

Dasar yang dipegangi dalam kegiatan pengembangan masyarakat

adalah konsep kepemilikan bersama. Kepemilikan bisa dipahami dari dua tingkatan yaitu kepemilikan terhadap barang material serta kepemilikan struktural dan proses. Kepemilikan barang material, seperti barang-barang komoditas, tanah, bangunan dan sebagainya. Kepemilikan struktur dan proses seperti kontrol masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, menentukan kebijaksanaan keaktifan lokal, perumahan, pengembangan lokal dan sebagainya.

8. *Kemandirian*

Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis, alam dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui program pengembangan masyarakat diupayakan agar para warga mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat semaksimal mungkin. Kemandirian masyarakat secara total di era industri tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kepercayaan diri semaksimal mungkin. Kemandirian ini merupakan arah realistik yang perlu diwujudkan.

9. *Kebebasan dari Negara*

Prinsip kemandirian memunculkan isu menyangkut hubungan masyarakat dengan negara. Negara menyponsori pengembangan masyarakat merupakan sebuah tradisi yang lama. Respon alamiah dari sebuah pemerintahan dalam merasakan kebutuhan pembangunan masyarakat adalah menciptakan berbagai program pembangunan masyarakat yang didukung oleh negara. Meskipun demikian, prinsip kemandirian memperingatkan bahwa kegiatan pembangunan masyarakat yang disponsori oleh pemerintah biasanya melemahkan basis masyarakat, bukan memperkuat masyarakat. Untuk alasan inilah, masyarakat dan pekerja sosial harus berfikir secara hati-hati sebelum mengajukan permintaan dana kepada lembaga pemerintah atau bentuk sumbangan yang lain. Mereka juga perlu berhati-hati ketika berpartisipasi dalam program yang disponsori oleh pemerintah.

Hal ini bukan berarti dukungan dari pemerintah tidak harus diterima. Kadang-kadang, para aktivis pengembangan masyarakat tidak memiliki alternatif pendanaan yang realistik dan kadang-kadang dukungan pemerintah perlu untuk memulai proses pengembangan masyarakat. Namun, secara umum akan lebih baik kalau sebuah masyarakat bekerja tanpa pendanaan pemerintah.

10. *Tujuan Langsung dan Visi yang Besar*

Dalam pekerjaan masyarakat selalu ada pertentangan antara pencapaian tujuan langsung seperti penghematan sumber daya alam dan visi besar berupa penciptaan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam pengembangan masyarakat, kedua elemen tersebut merupakan hal yang esensial untuk diwujudkan dalam rangka mempertahankan keseimbangan program jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam hal ini, para aktivis pengembangan masyarakat dituntut menjawab sebuah tantangan berupa sejauh mana mereka bisa menghubungkan tujuan langsung dengan visi jangka panjang, menunjukkan bagaimana sebuah visi tidak hanya relevan dengan visi yang lain, tetapi tak terpisahkan secara berkelanjutan dengan pencapaian tujuan yang lain.

#### 11. *Pembangunan Organik*

Cara termudah untuk mempelajari konsep pembangunan organik sebagai lawan dari pembangunan mekanistik adalah mengamati perbedaan antara kerja sebuah mesin dan perkembangan sebuah tumbuhan.

Masyarakat secara esensial adalah organisme (seperti tumbuhan), bukan mekanistik (seperti mesin). Oleh karena itu, pengembangan masyarakat tidak diarahkan oleh hukum teknis sebab-akibat yang sederhana, namun merupakan suatu proses yang rumit dan dinamis. Memelihara dan mempertahankan program pengembangan masyarakat jauh rumit dibandingkan ilmu pengetahuan.

Pembangunan secara organik berarti bahwa seseorang menghormati dan menghargai sifat-sifat khusus masyarakat, membiarkan serta mendorongnya untuk berkembang dengan caranya sendiri, melalui sebuah pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya.

#### 12. *Laju Pembangunan*

Konsekuensi dan pembangunan organik adalah bahwa masyarakat sendiri menentukan jalannya proses pembangunan. Berusaha membangun masyarakat secara tergesa-gesa dapat mengakibatkan terjadinya kompromi secara fatal. Bisa jadi, masyarakat akan kehilangan rasa memiliki proses tersebut dan kehilangan komitmen untuk terlibat dalam proses pembangunan.

#### 13. *Kepakaran Eksternal*

Keahlian yang dibawa oleh tenaga ahli dari luar belum tentu bisa menjamin mulusnya pelaksanaan proses pembangunan masyarakat dalam suatu lokasi. Prinsip keragaman ekologis menekankan bahwa tidak ada suatu cara yang paling benar untuk melakukan sesuatu dan tidak ada jawaban tunggal yang mesti cocok untuk setiap masyarakat. Apa yang berjalan pada suatu lingkungan belum tentu berjalan di lokasi yang lain. Oleh karena itu, prinsip utama pembangunan masyarakat tidak harus selalu mempercayai adanya struktur ataupun solusi yang datang dari luar walaupun telah dianggap sangat baik. Hal ini bukan berarti bahwa sebuah proses pembangunan masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan dari pengalaman pihak luar. Yang jelas, keahlian yang telah dikembangkan melalui praktek di tempat lain akan lebih menguntungkan bila hal itu diteliti dulu apakah hal tersebut cocok dengan situasi lokal.

#### 14. *Pembentukan Masyarakat*

Semua pembangunan masyarakat harus bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang baru. Pembentukan masyarakat melibatkan upaya penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan sesamanya dalam rangka menciptakan dialog, saling memahami dan melahirkan tindakan sosial.

#### 15. *Proses dan Hasil*

Pertentangan antara proses dan hasil telah menjadi isu besar dalam pekerjaan masyarakat. Pendekatan pragmatis cenderung menekankan kepada hasil. Dalam pendekatan ini; apa yang dipandang sangat penting adalah hasil apa yang sebenarnya dicapai. Sedangkan, terhadap pertanyaan bagaimana sesuatu dicapai (proses) merupakan persoalan yang kurang penting. Cara pandang demikian secara ekstrem terungkap dalam pembahasan Alinsky tentang alat dan tujuan. Bagi Alinsky, hanya tujuan yang benar-benar penting dan alasan satu-satunya dalam memikirkan sarana berhubungan dengan sejauh mana efektifitas sarana dalam mencapai tujuan tujuan yang diinginkan, persoalan etika dan mengenai orientasi proses menjadi tidak relevan. .

Alternatif lain dari pragmatisme Alinsky adalah pendekatan Gandhi, yang memandang proses dan hasil sebagai sesuatu yang terintegrasi. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat mewujudkan perdamaian melalui penggunaan proses kekerasan. Proses itu sendiri penting dalam menentukan hasil. Cara-cara kekerasan atau tidak berprinsip akan merusak tujuan. Proses harus merefleksikan tujuan, sebagaimana hasil akan merefleksikan proses tertentu. Persoalan etika dan moral dalam proses menjadi penting. Pendekatan pengembangan masyarakat harus merefleksikan pandangan Gandhian ini bukan pandangan Alinsky.

#### 16. *Integritas Proses*

Proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya dengan hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan pengharapan dari hasil yang berkenaan dengan isu kesinambungan, keadilan sosial dan lain-lain. Jika pengembangan masyarakat bisa menggunakan proses yang di dalamnya mencerminkan cita-cita ini, maka hal ini lebih memungkinkan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih berjangka panjang.

Hal ini berarti bahwa beberapa pendekatan politis yang lebih konvensional terhadap proses tidak bisa diterima. Upaya-upaya mewujudkan perubahan menuju sebuah masyarakat yang didambakan dengan mengatur pertemuan, mendorong penggunaan sejumlah permainan, penggunaan taktik konfrontasi, bekerja di belakang masyarakat atau sesuatu yang umumnya berlaku dan manipulatif, hanya

akan memperkuat pola-pola hubungan seseorang yang sedang berusaha untuk berubah dan tidak akan memberdayakan masyarakat atau tidak menjadi efektif dalam jangka panjang. Beberapa taktik seperti ini kemungkinan menjadi lebih baik dalam mewujudkan tujuan khusus jangka pendek, namun mereka tidak menempatkan pemahaman pengembangan masyarakat dalam perspektif lebih luas dari kesinambungan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, proses pekerjaan masyarakat selalu membutuhkan penelitian secara lebih dekat untuk menjamin bahwa integritas proses tetap terpelihara. Mereka perlu menjadi subyek yang menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan.

#### 17. Tanpa Kekerasan

Proses tanpa kekerasan perlu digunakan dalam membangun sebuah masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian. Tujuan-tujuan perdamaian tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam konteks ini, perdamaian menekankan lebih dari sekedar tidak adanya kejahatan fisik di antara manusia. Istilah kejahatan struktural menunjukkan bahwa struktur dan lembaga dengan sendirinya bisa dilihat sebagai kejahatan. Sebuah masyarakat yang tertekan atau sebuah masyarakat yang orang-orangnya tertekan, sungguhpun mungkin tidak menggunakan kekerasan terbuka dalam istilah ini dianggap sebagai kekerasan. Oleh sebab itu, ketidak-adilan distribusi kekayaan dan kesempatan yang mencolok, rasisme, ketidak-adilan jender dan bentuk-bentuk lain dianggap sebagai kekerasan. Senada dengan itu, sistem resmi, sistem pendidikan dan sistem jaminan sosial, karena elemen-elemen kekerasan yang terlibat dan karena menjadi cara mereka mempertahankan kontrol sosial, merefleksikan sebuah kekerasan masyarakat. Keluarga bisa menjadi sebuah lingkungan kekerasan, meskipun kekerasan fisik sendiri tidak pernah digunakan.

Tentu pendekatan non-kekerasan menentang dan berusaha menentang manifestasi kekerasan secara nyata dalam militer, perdagangan senjata dan kekerasan fisik dalam bentuk lain seperti kekerasan rumah tangga, kekerasan jalanan, hukuman badan, hukuman mati, kekejaman aparat dan sejenisnya. Dalam hal ini, perlu diupayakan alternatif seperti mediasi, upaya untuk menghilangkan penyebab-penyebab munculnya kekerasan dan berupaya mengerjakan sesuatu melalui cara-cara damai. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mengatasi kenakalan anak-anak muda dengan menjatuhkan hukuman keras kepada mereka sama dengan merespon kekerasan dengan penggunaan metode kekerasan. Cara ini hanya akan memperkuat kekerasan dan memperkokoh kembali pandangan bahwa pemecahan masalah dengan kekerasan dapat diterima dan efektif.

Pada level yang lebih fundamental, perspektif non kekerasan juga

mengakui adanya kekerasan struktural dan bentuk-bentuk penekanan yang lain serta diupayakan untuk mengatasinya dengan cara-cara damai. Hal ini berhubungan secara pasti dengan ide-ide liberasi, kebebasan dari tekanan kelas, ras dan jender dan perbaikan struktur kekerasan seperti sistem jaminan sosial dan sistem pendidikan.

Dari perspektif pengembangan masyarakat, penting dalam pengembangan masyarakat usaha untuk mengubah struktur-struktur kekerasan dan upaya mengatasi kekerasan melalui cara-cara damai. Hal ini berarti taktik Alinsky yang intinya memprovokasi konflik tidak dapat diterima dalam pengembangan masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses harus diusahakan untuk memperkuat bukan menyerang, memasukkan bukan mengesampingkan, bekerja di dalam bukan bekerja menentang dan memediasi bukan berkonfrontasi. .

18. *Inclusiveness (Keterbukaan)*

Keterbukaan adalah salah satu prinsip penting dalam perspektif non kekerasan (perdamaian). Gandhi tidak berusaha mengisolasi dan mengalahkan musuhnya. Dia bahkan tidak setuju dengan pemikiran, nilai-nilai dan politik yang mengedepankan kekerasan. Dia justru berusaha merangkul lawan bukannya menyisihkan mereka dan memusuhi gerakannya.

Penerapan prinsip keterbukaan dalam pengembangan masyarakat memerlukan proses yang selalu merangkul bukan menyisihkan, semua orang harus dihargai secara intrinsik walaupun mereka memiliki pandangan yang berlawanan dan orang harus diberi ruang untuk merubah posisinya dalam sebuah isu tanpa kehilangan muka.

19. *Konsensus*

Pendekatan non-kekerasan dan keterbukaan mensyaratkan pengembangan masyarakat harus dibangun di atas fondasi kesepakatan bersama dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan harus dilakukan sebanyak mungkin.

Banyak pendekatan pekerjaan masyarakat dibangun berdasarkan model konflik bukan konsensus. Masalahnya, model konflik menghasilkan pemenang dan pecundang, yang dampaknya menjadikan pecundang akan dimarginalkan dan diasingkan. Pendekatan konsensus bekerja dalam mencapai kesepakatan dan bertujuan untuk mencapai sebuah solusi yang didukung oleh seluruh anggota masyarakat. Konsensus secara hakiki berarti menangani sebuah isu, sebarang waktu dibutuhkan, sampai hasil yang diperoleh memuaskan setiap orang.

Bagaimanapun, pendekatan konsensus bekerja menuju persetujuan bersama dan bertujuan untuk mencapai pemecahan yang seluruh anggota masyarakat mau memilikinya. Konsensus berarti lebih dari sekedar persetujuan untuk menerima keinginan mayoritas, yang bisa menjadikan 49 persen anggota masyarakat tidak puas. Ia lebih dari sekedar kompromi, yang dapat menjadikan setiap orang tidak puas.

Konsensusnya agaknya menekankan bahwa kelompok atau masyarakat melakukan sendiri untuk berproses yang berupaya untuk menemukan sebuah pemecahan atau tindakan yang dapat diterima dan dimiliki setiap orang, di mana masyarakat setuju bahwa apa yang diputuskan adalah keinginan paling baik bagi semuanya. Konsensus tidak dicapai dengan cepat, tetapi dibangun. Konsensus akan mengambil waktu lebih lama dibandingkan bentuk-bentuk pengambilan keputusan konvensional. Bagaimanapun, konsensus dalam jangka panjang mewujudkan hasil yang lebih memuaskan dan memberikan sebuah dasar yang lebih kuat bagi pengembangan masyarakat.

20. *Kooperatif*

Perspektif ekologis dan pendekatan non-kekerasan, kedua-duanya menekankan perlunya struktur yang bekerja bukan struktur yang bersaing. Kebanyakan struktur, proses dan lembaga-lembaga masyarakat modern dibangun di atas asumsi tentang kebaikan budaya berkompetisi, baik pada sistem pendidikan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, media, seni, hiburan dan kesehatan.

Pengembangan masyarakat akan berusaha menentang dominasi etika kompetisi dan menunjukkan bahwa semua ini didasarkan pada asumsi yang salah. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bertujuan dalam membangun struktur dan proses alternatif, didasarkan pada kerja sama bukan konflik. Pengambilan keputusan secara konsensus merupakan salah satunya dan berbagai upaya membentuk berbagai jenis koperasi seperti koperasi tenaga kerja, koperasi para nasabah, koperasi perumahan dan koperasi perawat anak.

Pada tingkat yang paling mendasar, pengembangan masyarakat akan berupaya membawa kerjasama dalam kegiatan masyarakat, dengan membawa masyarakat bergabung dan menemukan cara-cara menghargai kerjasama individu-individu atau kelompok. Kegiatan rekreasi masyarakat bisa menekankan kerjasama bukan persaingan.

21. *Partisipasi*

Pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Lebih banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif, lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan dapat direalisasikan. Hal ini tidak menekankan bahwa setiap orang harus berpartisipasi dengan cara yang sama. Masyarakat berbeda-beda karena mereka memiliki ketrampilan, keinginan dan kemampuan yang berbeda-beda. Kerja kemasyarakatan yang baik akan memberikan rangkaian kegiatan partisipatori yang selalu mungkin dan akan membenarkan persamaan bagi semua anggota masyarakat yang secara aktif terlibat.

Seringkali partisipasi dilihat dalam kaitan dengan partisipasi dalam alam apa yang mungkin dihargai sebagai arus utama proses masyarakat

seperti pertemuan umum, bidang manajemen, peran-peran pelatihan sosial tradisional. Partisipasi seperti jelas penting, namun partisipasi bisa mengambil berbagai bentuk yang lain: memasak, berorganisasi, bermain musik, terlibat dalam olah raga, berkunjung pada orang lain, berkebun dan lain-lain. Semuanya bisa memberikan sumbangan pada kehidupan masyarakat dan semua bentuk partisipasi perlu didorong dan dilihat sebagai sesuatu yang berharga.

#### 22. *Menentukan Kebutuhan*

Ada dua prinsip pekerjaan masyarakat yang penting berkaitan dengan kebutuhan. *Pertama*, pengembangan masyarakat harus berupaya membuat kesepakatan antara berbagai pihak yang menentukan kebutuhan, yaitu: penduduk secara keseluruhan, pemakai, penyedia layanan dan para pengamat. Ada persepsi berbeda-beda terhadap pihak-pihak yang menentukan kebutuhan. Oleh karena itu, kerja masyarakat berusaha membangun dialog efektif antara pihak-pihak yang menentukan kebutuhan, yang masing-masing pihak yang memiliki peranan penting dan absah untuk bermain dan mengembangkan konsensus terhadap kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, kebanyakan dari para penentu kebutuhan ini jarang berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain tentang masalah kebutuhan masyarakat.

Prinsip yang *kedua* adalah, meskipun para penentu kebutuhan yang lain penting, anggota masyarakat sendirilah yang memegang hak lebih tinggi dalam menentukan kebutuhan, sepanjang prinsip ekologis dan keadilan sosial dengan cara ini tidak dikorbankan. Fokus penting dari praktisi sosial kritis adalah memperkaya masyarakat dalam dialog yang mengarahkan mereka menjadi lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan nyata mereka dan tidak kebutuhan yang ditentukan oleh orang lain. Adalah penting jika praktek kerja masyarakat menjadi pembebasan dan pemberdayaan, bukan sebaliknya (Ife Jim, 1996: 199).

Pengembangan masyarakat sesungguhnya dapat didefinisikan sebagai bantuan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan kemudian bertindak sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Untuk ini, adalah benar dipandang dari perspektif keadilan sosial dan ekologis, masyarakat sendirilah yang harus memiliki dan mengontrol proses pengukuran dan penentuan kebutuhan.

Dari pembahasan diatas, satu aspek yang bisa digaris-bawahi adalah betapa perlunya kita mengedepankan pola pikir holistik dalam melihat kegiatan pengembangan masyarakat. Seorang pekerja sosial dalam konteks ini, perlu berpikir tentang hubungan erat antara struktur dengan proses, bukan berfikir mengisolasi hubungan antara struktur dan proses. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat membutuhkan orang-orang yang selalu memikirkan koneksi (hubungan).

#### **D. Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat**

Secara umum, orang-orang yang bergerak dalam pengembangan masyarakat cenderung menjadi rendah hati, sederhana dan tidak membuat pengakuan hebat. dalam memecahkan semua masalah yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan negara di dunia. Mereka bekerja di atas keyakinan bahwa tidak ada yang final dalam perubahan sosial. Bahkan, pengembangan masyarakat dalam konteks ini dianggap sebagai sesuatu yang hidup, dinamis dan membawakan semangat perlawanan. Kadang-kadang pengembangan masyarakat cukup sederhana dan saling berhubungan, kadang-kadang di dalamnya terdapat pertentangan dan penuh dengan dilema.

Sejauh ini, para aktivis pengembangan masyarakat menginginkan sebuah distingsi (pembedaan) antara pengembangan masyarakat dengan kerja sosial dan tradisi *welfare* (tradisi yang berjalan di negara yang memberlakukan adanya sistem jaminan sosial/kesejahteraan bagi warganya). Dalam tradisi *welfare*, para aktivis difokuskan pada kerja sosial dan bimbingan. Dengan demikian, bidang pekerjaan mereka adalah membantu individu (klien) agar ia bisa beradaptasi dengan keadaan yang dialaminya. Sedangkan, pengembangan masyarakat difokuskan tidak pada individu, tetapi pada keadaan yang dialami warga. Karena menekankan pada keadaan yang dialami warga maka pencegahan menjadi sebuah prioritas.

Para aktivis pengembangan masyarakat tidak menginginkan bidang pekerjaannya diatur secara sangat profesional. Mereka cenderung berhati-hati terhadap meningkatnya tuntutan profesionalisasi dalam industri pelayanan sosial dan masyarakat.

Mereka membantah anggapan bahwa pengembangan masyarakat lebih banyak terfokus pada kegiatan pemberian pelayanan masyarakat dan sosial. Pengembangan masyarakat menawarkan berbagai jalan pemikiran tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, bagaimana proses dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan. Dari sudut pandang ini, pengembangan masyarakat menaruh perhatian dengan cara-cara sederhana untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan akses terhadap sumber daya dan pengembangan kekuatan dalam struktur yang ada, kerjasama, ketahanan diri dan penentuan nasib sendiri. Pendek kata, pengembangan masyarakat dapat memperkuat demokrasi, mengatasi alienasi dan ketidak-berdayaan.

Para pekerja sosial mempunyai potensi untuk mempersembahkan sumbangan yang sangat berarti demi perbaikan sosial secara progresif dengan mengadopsi suatu pandangan tentang kebijakan sosial yang kritis, memajukan pengetahuan dan ketrampilan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan bekerja bersama individu-individu, kelompok dan komunitas dalam rangka meredam pengaruh-pengaruh busuk neo-liberalisme.

Mereka menggunakan kerja pengembangan masyarakat untuk

membangun semangat kewarganegaraan dan memperjuangkan upaya mengentaskan masyarakat lapis bawah dari perangkap kemiskinan. Peran kegiatan pengembangan masyarakat dirasakan semakin penting seiring meningkatnya jumlah anggota masyarakat miskin di dunia. Untuk itu, para aktivis pengembangan masyarakat tidak cukup sekadar meringankan kesengsaraan yang sedang menimpa warga miskin, tetapi juga berani mengungkapkan kebenaran berbagai fakta yang menyebabkan munculnya kondisi yang memprihatinkan itu, dengan maksud untuk memperbaiki sistem perlindungan yang selektif sebagai sebuah pilihan kebijakan untuk menekan meluasnya jumlah masyarakat miskin.

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan pengembangan masyarakat bisa dijelaskan menurut dua pendekatan: pendekatan “profesional” dan pendekatan “radikal”. Dengan pendekatan profesional, pengembangan masyarakat menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial (Edi Suharto, 2003: 5-6).

Berdasarkan kerangka di atas, pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990: Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat pada gugus profesional; aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan kelas sosial, aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender dan aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal

1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan secara sukarela oleh warga kelas menengah. Tujuan adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan masyarakat secara resmi.
2. Pengorganisasian masyarakat merupakan kegiatan yang difokuskan pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pengembangan masyarakat merupakan upaya atau kegiatan yang menaruh perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan kelas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara serta antara orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan persamaan kesempatan di antara berbagai ras dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Sementara itu, menurut pendekatan radikal yang berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis; kegiatan pengembangan masyarakat lebih difokuskan pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Pengembangan masyarakat difokuskan untuk membantu masyarakat lapis bawah dalam mengendalikan secara mandiri terhadap kehidupannya. Proses ini menuntut intervensi terhadap proses dan struktur yang memfasilitasi akses dan kendali terhadap sumber daya dan mengembangkan cara-cara berpikir dan mengerjakan sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung.

Berbagai kegiatan pengembangan masyarakat harus selalu bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat. Para aktivis pengembangan masyarakat harus mengidentifikasi kebutuhan dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Hal ini berarti mereka menghabiskan waktunya di luar kantornya. Ia senantiasa berbicara dan menyatu bersama masyarakat di daerahnya.

Peran pekerja pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan sebagaimana apa yang lihat sendiri menurut referensi ilmiah serta memfasilitasi munculnya upaya pemecahan secara bersama-sama terhadap isu, masalah dan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pekerja pengembangan masyarakat bekerja bersama dan untuk masyarakat. Mereka tidak bekerja sebagai patron atau orang luar, namun dibangun di atas dasar prinsip saling beremansipasi. Para pekerja pengembangan masyarakat adalah subyek dalam sistem politik dan ekonomi yang mendorong dan merangsang masyarakat agar mau bekerja sama dengan mereka. Hal ini bisa diungkapkan melalui sebuah ungkapan sebagai berikut: “Jika kamu membantu saya, kamu menjadi bagian dari masalah”. “Jika kamu di sini sebab kamu memahami bahwa keikutsertaan kamu bisa melepaskan ikatan denganku maka kita bisa sukses meraihnya”.

Secara rinci, para aktivis pengembangan masyarakat menangani serangkaian pekerjaan yang mencakup:

1. Penelitian dan penelaahan isu-isu, kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah masyarakat.
2. Persiapan kebijakan dan rumusan berdasarkan isu
3. Pengembangan dan pemeliharaan sumber-sumber daya
4. Pengembangan cara-cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dari luar dan proses pengambilan kebijakan
5. Pengembangan, pemeliharaan dan penilaian program-program masyarakat
6. Perencanaan strategik
7. Pengembangan, penafsiran dan pelaksanaan kebijakan masyarakat
8. Pengembangan dan pemeliharaan demokrasi dan partisipasi proses

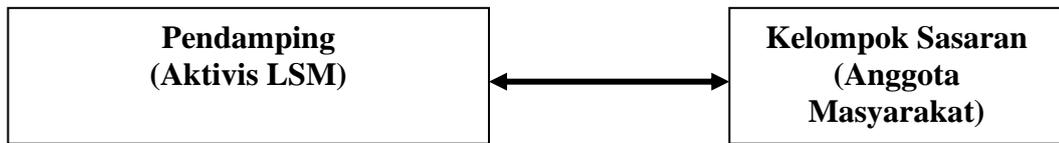
- pengambilan keputusan dalam masyarakat
9. Perwakilan, pembelaan, perundingan dan penengahan dalam dan antara masyarakat, agen, lembaga dan pemerintah
  10. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan
  11. Pendekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, para pekerja dan profesional lain, agen dan pemerintah
  12. Pengembangan dan pengalihan ketrampilan dan pengetahuan dalam organisasi masyarakat, advokasi, pengembangan sumber daya, kesadaran budaya dan wilayah-wilayah lain dalam masyarakat
  13. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak asasi dan tanggung jawab mereka
  14. Persiapan dan penyebar-luasan tulisan dan materi pemberitaan dan pengembangan media kontak
  15. Penanganan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pemeliharaan proyek masyarakat seperti lobby, persiapan rancangan anggaran, laporan dan dokumentasi keuangan
  16. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat dalam berhubungan dengan profesional lain, lembaga, agen masyarakat, pemerintah dan badan-badan lain
  17. Pengembangan kampanye masyarakat

Peranan seorang pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat kebanyakan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai *problem solver* (pihak yang memecahkan masalah). Kegiatan pendampingan sosial ini berpusat pada tiga visi praktek pekerjaan sosial, yang dapat diringkas sebagai 3P, yaitu: pemungkin (*enabling*) pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*).

Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program LSM sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamisator (penggerak) (Moeljarto, Vidhyandika, 1996: 142).

Model pendampingan dalam kegiatan pengembangan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberdayaan masyarakat. Pertama pendamping itu sendiri yang terdiri atas para pekerja sosial dan yang kedua adalah kelompok yang didampingi atau yang akan diberdayakan. Hubungan antara pendampingan dan pemberdayaan bersifat setara, timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan akhir dari pendampingan adalah terjadinya tranfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang dihadapinya secara mandiri dan berkesinambungan.

Proses pendampingan ini dapat dijelaskan melalui skema berikut:



Dengan demikian, peran pendampingan yang dilakukan pada aktivis sosial merupakan kemampuan untuk :

- Memahami berbagai potensi dan masalah yang ada pada dirinya serta masyarakat sekitarnya : setelah itu
- Mampu melihat dan memperhatikan berbagai peluang/kesempatan yang ada di sekitarnya dan menggunakan kedua faktor tersebut untuk
- Mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang ada pada mereka (masyarakat) dan mengembangkan kehidupan yang serasi dan berkesinambungan.

Secara umum, proses pendampingan yang dilakukan aktivis sosial meliputi 3 tahap kegiatan, yaitu:

### 1. Tahap Animasi

Animasi adalah suatu upaya yang dilakukan Aktivis LSM untuk membangkitkan “roh” berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat ke permukaan sehingga menjadi energi yang sangat potensial. Hasil proses animasi adalah terbangunnya rasa percaya diri dan komitmen untuk menjadikan hidup lebih baik. Dengan demikian, animasi merupakan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki potensi besar apabila mengorganisasikan diri dengan membentuk lembaga keswadayaan.

Peran pendamping yang paling berat adalah membangkitkan kembali gairah hidup kelompok sasaran agar mereka mau memperbaiki nasibnya. Kegiatan sosialisasi program dilakukan untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku mereka agar menjadi lebih dinamis dan optimis dalam menatap masa depan. Pada tahap awal program, para pendamping banyak mengalami kesulitan dalam sosialisasi. Hal ini terjadi karena kelompok masyarakat lapis bawah seringkali sulit diajak berpartisipasi dalam program yang umumnya menekankan proses pembelajaran dan pemberdayaan.

Oleh karena itu, para aktivis sosial perlu mengedepankan kesabaran dalam mengajak warga agar mau berubah melalui proses sosialisasi dan pembelajaran secara bertahap. Proses pembelajaran masyarakat dengan kondisi demikian tidak dapat mengikuti urutan pembelajaran secara linear sebagaimana dikonsepsikan oleh pakar pendidikan Senge dalam *sistem thinking*. Sekedar informasi, urutan

pembelajaran dalam *sistem thinking* dimulai dari *personal mastery*, *mental model*, *shared vision* dan *team learning*.

Proses pembelajaran yang diikuti kelompok sasaran baik secara individual maupun kelompok dilakukan secara simultan. Penjelasan hal ini dapat disimak pada program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang digagas LSM bersama kelompok sasaran seperti program pengadaan air bersih. Masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini difasilitasi untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Proses pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) dengan membentuk KSM merupakan wahana bagi pembelajaran dalam kelompok (*team learning*) yang sekaligus juga pembelajaran individu (*individual learning*).

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan para pekerja sosial seperti aktivis LSM tidak semata-mata difokuskan pada warga kurang mampu saja. Persoalan kemiskinan harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Asumsi yang dibangun adalah kemiskinan terjadi karena struktur institusi masyarakat yang tidak adil. Kemiskinan terjadi karena sumberdaya formal tidak dapat diakses dan dinikmati oleh semua pihak. Dapat dikatakan, kelompok miskin adalah kelompok yang tersingkirkan untuk dapat menikmati sumberdaya formal, sehingga harus mencari cara lain untuk bertahan hidup melalui kegiatan informal yang pada umumnya merupakan residu dari sumberdaya formal.

Untuk itu, pendekatan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengintegrasikan segenap sumberdaya formal (kelompok non-miskin) dengan sumberdaya informal (kelompok miskin). Kedua belah pihak diharapkan bisa bekerja sama saling bahu membahu dan mensinergikan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Hubungan sinergis perlu dibangun mengingat pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa antara kelompok miskin dengan kelompok kaya seringkali kurang mampu membangun komunikasi secara sehat, bahkan hubungan antara kedua kelompok sering diwarnai dengan konflik. Potensi sumberdaya yang ada di masyarakat cenderung mereka gunakan untuk sesuatu yang negatif dan sia-sia. Oleh karena itu, para aktivis sosial perlu menyadarkan masyarakat agar tidak bertindak demikian. Jika sumber daya yang dimiliki masyarakat dikomunikasikan dan dikelola melalui jalur kelembagaan secara tepat justeru akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk pengembangan masyarakat khususnya dalam upaya memerangi kemiskinan.

Singkatnya, proses pembelajaran secara individual maupun kelompok melalui organisasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak berlangsung secara otomatis. Proses ini memerlukan intervensi pihak ketiga yaitu: dari pendamping, yang kehadirannya akan

berperan sebagai stimulan dan katalisator bagi proses pembelajaran individu dan masyarakat dari kelompok miskin.

## **2. Tahap Fasilitasi**

Tahapan fasilitasi dalam program pengembangan masyarakat merupakan tahapan pemberian bantuan teknis (*technical assistant*), bantuan managerial dan pelatihan. Tahap ini dilakukan oleh aktivis sosial dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian atau kelembagaan lokal (KSM) yang telah dibangun secara bersama antara masyarakat dengan para aktivis sosial dalam tahap animasi.

Beberapa bantuan teknis yang diberikan oleh pendamping umumnya berupa penataan organisasi dan aturan main keorganisasian KSM, penataan pembukuan secara sederhana, kearsipan, pendampingan dalam pembuatan proposal, pelatihan manajemen dan pendampingan dalam forum pertemuan masyarakat.

Bantuan teknis dirancang dan diberikan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan dan prinsip program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Seringkali para pendamping tersesat atau terjebak menyimpang dari tujuan dan prinsip program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ketika terlibat dalam pendampingan teknis. Para pekerja masyarakat selaku pendamping perlu memberikan perhatian terhadap upaya menumbuhkan kemampuan, kesadaran, kesukarelaan dan kemandirian warga dalam menangani program. Para pendamping hanya memberi bantuan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Adanya prinsip bahwa program harus diarahkan untuk menggugah tumbuhnya kemandirian (swadaya) masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pendampingan. Peran aktivis di sini hanya mendorong warga mengaktualisasikan potensi-potensi mereka yang masih terpendam menjadi kekuatan nyata yang bisa mengangkat kualitas hidup mereka.

Misalnya, dalam program pengembangan masyarakat yang berbasis perbaikan sanitasi, para aktivis LSM bersama warga perlu membuat kesepakatan tentang jadwal kerja bhakti serta penentuan jenis pekerjaan yang ditanganinya. Tujuan pengaturan adalah untuk membagi tanggung jawab pekerjaan secara adil dan merata sehingga terbangun soliditas kelompok. Yang terpenting, bahwa dengan terlaksananya kerja bhakti secara adil akan mendidik warga untuk hidup secara demokratis karena masing-masing anggota mengetahui hak dan kewajiban serta tumbuh rasa memiliki terhadap program.

## **3. Tahap Penghapusan Diri**

Sebagai pendamping, para pekerja masyarakat tidak selamanya tinggal di masyarakat dampungannya. Terdapat jangka waktu program bagi pendampingan dalam memberikan bantuan *COCD*-nya (*community development* dan *community organization*). Untuk itu, pendamping harus tahu persis tanda-tanda masyarakat sudah mulai siap untuk

ditinggalkan. Yang terpenting adalah bahwa masyarakat tidak merasa kehilangan ketika dia keluar atau selesai dari pekerjaan pendampingannya.

Hal ini berkaitan erat dengan kualitas proses pendampingan pada tahap animasi dan fasilitasi. Seperti dibahas terdahulu, peran pekerja sosial sebagai pendamping adalah menstimulir masyarakat untuk belajar, yang dilakukan dengan metoda partisipatif. Segala keputusan tentang rencana, implementasi dan evaluasi program senantiasa harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri agar masyarakat merasa memiliki program dan bertanggungjawab atas keberhasilannya. Dengan pendekatan demikian akan terjadi suatu proses belajar yang alamiah pada masyarakat, tanpa merasa ada intervensi pihak luar. Proses pendampingan yang baik akan menghasilkan suatu kondisi dimana masyarakat terdidik untuk senantiasa belajar secara mandiri, sehingga di akhir pendampingan akan terbangun suatu proses belajar yang terus menerus di masyarakat (*active learning society*).

Tahap penghapusan diri tidak dapat begitu saja dilakukan, karena jika masyarakat belum siap tetapi sudah terburu-buru ditinggalkan oleh pendamping justru akan menimbulkan kerusakan sistematis di kalangan masyarakat itu sendiri. Pengalaman telah mengajarkan bahwa banyak program yang belum tuntas, tetapi sudah ditinggalkan telah menimbulkan amuk masa. Jika kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sudah terbangun, tetapi belum difasilitasi dengan berbagai saluran untuk mengaktualisasikan kesadaran itu maka sangat rentan memunculkan kekacauan.

Dalam konteks pendampingan masyarakat ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab para pekerja masyarakat yaitu :

- Peran pendamping sebagai motivator  
Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumberdaya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
- Peran pendamping sebagai komunikator  
Dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.
- Peran pendamping sebagai fasilitator  
Dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai tehnik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

Penjabaran peran pendampingan yang dilakukan para pekerja masyarakat seperti aktivis LSM dapat dilihat pada matrik pendampingan sebagai berikut :

<b>Bentuk Pendampingan</b>	<b>Pola pelaksanaan</b>	<b>Target</b>
<b>Non fisik</b>	Penyuluhan, pelatihan, diskusi dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Timbul kesadaran dan motivasi dari kelompok sasaran guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.</li> <li>❑ Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meng mengatasi sebagian permasalahan hidupnya</li> <li>❑ Membuat aturan dan tata tertib</li> <li>❑ Dan lain-lain</li> </ul>
<b>Fisik</b>	Program nyata yang dikerjakan kelompok sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Misalnya: dilakukan dengan program pengadaan air bersih, pengolahan limbah, pengenalan teknologi tepat guna, pemberian bantuan kredit mikro untuk pengusaha kecil, pembuatan sanitasi lingkungan, pembentukan koperasi dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Pembentukan organisasi atau pemanfaatan organisasi yang sudah ada.</li> <li>❑ Terjalannya kerjasama antara LSM dengan warga dalam merancang dan melaksanakan program</li> <li>❑ Terbangunnya sarana fisik secara mandiri</li> <li>❑ Dan lain-lain</li> </ul>

Dalam realisasinya, peran pendampingan sosial ini diaktualisasikan oleh pekerja sosial melalui lima peran berikut:

*Pertama*, peran pekerja sosial sebagai fasilitator. Terminologi *facilitator* yang berakar kata dari *facilate* mengandung arti “to make easy (membuat mudah). Dari segi proses, *facilitation* didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang membantu pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memperbaiki cara mereka bekerja bersama. Sedangkan sebagai

keahlian, *facilitation* adalah keahlian mengelola suatu pertemuan (*a meeting management skill*). (Yayasan Damar, 2003: 2-3).

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai pihak yang membuat mungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez, sebagaimana dikutip Edi Suharto (2003: 9), “*The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.*” Fasilitator dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab dalam membantu kelompok sasaran agar mampu menghadapi dan menangani tekanan keadaan atau transisional.

Peran fasilitator diharapkan dapat membantu suatu kelompok masyarakat memperbaiki penyelesaian masalah sosial yang sedang dihadapi dan membuat keputusan secara tepat dalam rangka mewujudkan cita-cita hidup mereka yang lebih bermutu. Tanggung jawab sebagai fasilitator direalisasikan oleh pekerja masyarakat melalui upaya-upaya yang memberi harapan, mengurangi sikap penolakan dan ambivalensi, menghormati dan mengarahkan perasaan, mengidentifikasi dan mendorong kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, memilah masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan serta mengarahkan kelompok sasaran agar terfokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator pengembangan masyarakat dapat dikerangkakan sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- c. Mendorong komunikasi, relasi, menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan
- d. Memfasilitasi keterikatan, sinergi sebuah sistem dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan.
- e. Memfasilitasi pendidikan dalam rangka membangun pengetahuan dan keterampilan.
- f. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama untuk mendorong kegiatan kolektif.
- g. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- h. Memfasilitasi penetapan tujuan.
- i. Merancang solusi-solusi alternatif.
- j. Mendorong pelaksanaan tugas.
- k. Memelihara relasi secara sistemik.
- l. Memecahkan konflik (Suharto, Edi, 2003: 10).

Berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan, pekerjaan fasilitasi yang ditangani oleh para pekerja masyarakat dapat dibedakan ke dalam dua tipe. Pertama, *basic facilitation*. Kedua, *developmental facilitation*. Perbedaan dari dua tipe fasilitasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<b>Karakteristik</b>	<b><i>Basic facilitation</i></b>	<b><i>Developmental facilitation</i></b>
Tujuan Kelompok	Menyelesaikan problem yang bersifat nyata	Menyelesaikan problem yang bersifat nyata dengan diikuti pembelajaran untuk memperbaiki prosesnya
Peran fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu kelompok memperbaiki diri dan memecahkan masalahnya ( prosesnya bersifat jangka pendek)</li> <li>• Bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola proses perjalanan sebuah kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu kelompok memperbaiki diri dan memecahkan masalah (prosesnya bersifat jangka panjang)</li> <li>• Membagi tanggung jawab dalam mengelola proses kelompok</li> </ul>
Jalan keluar untuk kelompok	Tergantung pada peran fasilitator dalam menyelesaikan problem pada masa-masa mendatang	Mengurangi ketergantungan pada fasilitator dalam menyelesaikan masalah pada masa-masa mendatang

Bisa digaris bawahi dalam *basic facilitation*, sebuah kelompok mengharapkan bantuan fasilitator dalam menuntun mereka menggunakan proses kelompok secara efektif. Sedangkan dalam *developmental facilitation*, peran fasilitator adalah mengajari anggota kelompok dalam mewujudkan tujuannya.

*Kedua*, peran pekerja sosial sebagai broker. Seorang broker dalam pengertian umum adalah seseorang yang membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Ia berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Program pengembangan masyarakat menjadikan segmen sosial lapis bawah atau warga kurang mampu sebagai kelompok sasaran. Pekerja sosial melakukan transaksi sosial dan pembentukan jaringan pelayanan sosial. Pada konteks ini, pekerja sosial sebagai broker perlu memahami kualitas pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi lingkungan dengan maksud

agar ia dapat memenuhi keinginan kelompok sasaran dalam memperoleh “keuntungan” maksimal.

Peranan pekerja sosial sebagai broker dalam proses pendampingan sosial diharapkan mengaktualisasikan tiga kemampuan:

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber daya kemasyarakatan secara tepat.
2. Mampu menghubungkan kelompok sasaran dengan sumber daya secara konsisten.
3. Mampu mengevaluasi efektifitas sumber daya yang dimiliki dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien (Suharto, Edi, 2003: 10-11).

Dengan demikian, ada tiga kata kunci ketika pekerja sosial melaksanakan peran sebagai broker: *linking* (menghubungkan), *Goods and services* (barang-barang dan jasa) dan *quality control* (pengontrolan kualitas). Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez sebagaimana dikutip Edi Suharto (2003:11) menerangkan ketiga konsep di atas satu per satu:

- a. *Linking* merupakan proses yang menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lain yang dianggap memiliki sumber-sumber daya yang diperlukan oleh kelompok sasaran. *Linking* tidak sebatas memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia berusaha memperkenalkan kelompok sasaran dengan dan sumber-sumber yang dituju, menindak-lanjuti, mendistribusikan sumber daya, dan meenjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh kelompok sasaran.
- b. *Goods* meliputi barang-barang nyata seperti: makanan, uang, pakaian, perumahan dan obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup pelayanan nyata yang dirancang oleh lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup kelompok sasaran misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling dan pengasuhan anak.
- c. *Quality Control* merupakan proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring secara terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

*Ketiga*, peran pekerja sosial sebagai mediator. Terminologi *mediator* yang berakar kata dari *mediate* mengandung arti: *to come between* (menengahi). Mediasi adalah suatu cara membantu pihak-pihak yang menghadapi ketidak-setujuan secara kuat. Peran mediasi dianggap sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hanya saja dalam mediasi melibatkan intervensi dari pihak ketiga yang netral, yang mempunyai keterbatasan atau tidak memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Di sini, mediator membantu pihak-pihak yang berseberangan secara sukarela dengan niat untuk

mencapai suatu penyelesaian yang dapat saling diterima atas masalah-masalah yang diperselisihkan. Tujuan mediasi adalah membantu para pihak menegosiasikan penyelesaian suatu konflik. Para pihak yang menggunakan mediator biasanya karena mereka terlibat konflik yang tidak mampu diselesaikan sendiri.

Dengan demikian, peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Peran mediator yang dapat dilakukan meliputi: negosiasi, pendamai (pihak ketiga) dan berbagai macam upaya resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela yang menuntut pekerja sosial untuk memenangkan kasus yang dihadapi oleh klien.

Beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan oleh pekerja masyarakat ketika menjalankan perannya sebagai mediator adalah:

- a. Menemukan titik-titik persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- b. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- c. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- d. Menghindarkan situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- e. Berupaya melokalisasi konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- f. Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- g. Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- h. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- i. Menggunakan prosedur-prosedur persuasi.

*Keempat*, peran pekerja sosial sebagai pembela. Pekerja sosial dalam perannya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tersedianya sumber daya yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendampingan yang lain seringkali harus berhadapan dengan sistem politik yang kurang kooperatif. Pekerja sosial harus menjalankan peran pembelaan (advokat) jika kelompok sasaran mengalami kendala dalam mengakses pelayanan sosial dan sumber-sumber daya. Peranan pembelaan (advokasi) dalam konteks ini menjadi salah satu bidang pekerjaan sosial yang banyak bersentuhan dengan kegiatan politik (Suharto, Edi, 2002: 8).

Peran pembelaan dapat dibagi dalam dua kelompok: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial

melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan ketika seorang pekerja sosial menjalankan peranan sebagai pembela masyarakat:

- a. Keterbukaan, artinya: membiarkan masyarakat berbicara dan menyampaikan pandangan-pandangannya.
- b. Perwakilan secara luas, artinya: mewakili segala tindakan yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- c. Keadilan, artinya: menerapkan kesetaraan atau kesamaan dalam sistem sosial sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- d. Pengurangan permusuhan, artinya: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- e. Informasi, artinya; menyajikan berbagai pandangan yang masing-masing secara bersamaan didukung dengan dokumen dan analisis.
- f. Dukungan, artinya: mendukung terciptanya partisipasi secara luas.
- g. Kepekaan, artinya: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

*Kelima*, peran pekerja sosial sebagai pelindung. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi sosial lain berisiko menjadi korban.

Seorang pekerja sosial ketika menjalankan perannya sebagai pelindung orang-orang lemah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab secara etik, legal dan rasional dalam praktek pekerjaan sosial (Suharto, Edi, 2002: 10).

Dalam melaksanakan sejumlah peran dalam pengembangan masyarakat, seorang aktivis dituntut mengembangkan enam ketrampilan:

1. Ketrampilan fasilitasi yaitu sebuah kemampuan untuk mempraktekkan teknik-teknik untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketrampilan-ketrampilan khusus dalam aspek ini termasuk

- pengembangan sumber daya, negosiasi, perwakilan, pembelaan, lobby, delegasi dan penulisan laporan.
2. Kemampuan organisasi yaitu ketrampilan untuk menangani, mengembangkan dan memelihara sistem informasi, struktur kepanitiaan dan proses pertemuan, pelaksanaan tugas-tugas, pengembangan kebijakan, jadwal kerja dan mengelola keuangan
  3. Ketrampilan strategi meliputi perumusan tujuan, pengembangan strategi dan penilaian kemajuan
  4. Ketrampilan jaringan meliputi membentuk dan memelihara jaringan melalui pendekatan dengan kelompok lain dan individu-individu dan membangun kerjasama antara kelompok kepentingan.
  5. Ketrampilan komunikasi meliputi mendengar dan menanggapi secara efektif, mengutarakan ide dan menyampaikan pokok-pokok pikiran
  6. Ketrampilan penelitian meliputi: kemampuan untuk menemukan informasi, membuat dapat dimengerti atas sesuatu dan pemakaian sesuatu dan kemampuan mengevaluasi program (Susan Kenny, 1994: 14-15)

#### **E. Pengembangan Masyarakat Menuju Pemberdayaan Masyarakat**

Aktivitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (*empowering society*). Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Akan tetapi, para aktivis pengembangan masyarakat tidak berhenti di situ. Mereka menjadikan realisasi target perubahan kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terberdayakannya masyarakat baik dalam cara berpikir, bersikap dan mengambil keputusan. Jika masyarakat sudah mampu mandiri dalam berpikir, bersikap dan mengambil tindakan serta sudah mampu berorientasi jangka panjang, makro dan subtansiil berarti mereka sudah berada dalam tahapan terberdayakan.

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya.

Dalam sejarahnya, pemberdayaan menjadi sebuah gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme (teori modernisasi). Sejak tiga dekade silam, para ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? Dudley Seers (1969), misalnya, menilai pertanyaan kritis itu telah mengundang upaya serius dalam memikirkan kembali doktrin-doktrin pembangunan. Muncul

penilaian bahwa merajalelanya kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan karena gagalnya model pembangunan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi atau doktrin developmentalisme.

Bisa dikatakan, model pembangunan pro pertumbuhan yang meyakini terjadinya “efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) ternyata tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Sebaliknya yang terjadi justru penyedotan ke atas (*trickle up effect*) atau malahan akan terjadi penyedotan produksi (*production squeeze*). Hal ini terjadi karena program-program pembangunan direncanakan secara terpusat (*top down*), yang sering kali tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah yang menjadi tujuan pembangunan. Selain itu, para perencana dan penentu kebijakan yang menggariskan sasaran pembangunan dan mengalokasikan sumber dana sering berada di bawah tekanan situasi untuk memproduksi hasil kuantitatif dalam waktu singkat sehingga mereka cenderung menekankan sasaran-sasaran dari atas (Sutoro Eko, 1994: 4). Keadaan ini sangat wajar jika program pembangunan pro pertumbuhan tidak berdampak besar dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat lapis bawah. Akibatnya, segmen masyarakat yang miskin tetap dalam kondisi miskin, bahkan ada yang bertambah miskin, sedangkan kelompok masyarakat yang kaya bertambah kaya.

Keterbatasan yang melekat pada pola pembangunan pro pertumbuhan menjadi pelajaran ironis dalam sejarah manusia. Atas keadaan ini, aktivis LSM termotivasi untuk menggagas pola pembangunan yang memberdayakan masyarakat lapis bawah. Pada tahun 1990, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah “pembangunan alternatif” atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditujukan untuk membangun kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan di dalamnya mengandung nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada dataran individual dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial maupun politik. Terdapat beberapa kemungkinan definisi tentang pemberdayaan, termasuk definisi pemberdayaan yang berbasis pada hak-hak asasi.

Kebanyakan definisi pemberdayaan menekankan pada isu-isu mendapatkan kemampuan dan mengontrol terhadap keputusan dan sumber daya yang menentukan kualitas hidup seseorang. Kerangka kerja pemberdayaan dan persamaan kaum wanita UNICEF menekankan akses kaum wanita, kesadaran terhadap sebab-sebab kesenjangan, kemampuan mengarahkan minatnya sendiri dan mengambil kendali dan tindakan mengatasi kendala dalam mengatasi kesenjangan struktural.

Penulis lain menekankan definisi pemberdayaan pada level yang berbeda-beda baik: pribadi, yang mencakup rasa percaya diri dan

kemampuan seseorang; relational, yang menekankan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi hubungan dan keputusan; serta pada level kolektif. Kabeer memfokuskan definisi pemberdayaan pada tiga dimensi yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan dalam kehidupan seseorang yaitu: akses terhadap sumber daya, agen dan hasil. Amartya Sen mendefinisikan pemberdayaan dengan menekankan pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan individual dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda (Deepa Narayan et.all, 2002: 10).

Menurut Jim Ife, *empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community* (pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife, Jim, 1995: 182).

Sementara itu, World Bank mengartikan *empowerment is expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their live* (pemberdayaan adalah perluasan aset-aset dan kemampuan-kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, mempengaruhi, mengontrol dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya” (Deepa Narayan et.all, 2002: 11).

Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.(Priyono, Onny, S, 1996). Pertama, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan pemberdayaan yang dipengaruhi karya Paulo Freire yang memperkenalkan istilah konsientisasi (*conscientization*) (Freire, Paulo, 1972: 13). Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan diidentikkan dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi *Asian Development Bank* (ADB),

kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan (Latama, Gunarto et.all, 2002: 4).

Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal *return to local resource* dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian maka prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan jika ia dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. Ini merubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik berarti ia mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu. Dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan misalnya, para nelayan hendaknya dididik untuk tidak selalu bergantung pada perikanan. Karena ketergantungan yang berlebihan kepada laut (perikanan) akan mengakibatkan terjadinya degradasi sumber daya ikan, penurunan produksi, kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan dan penurunan kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi sosial. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung dan memberikan akses bagi setiap pelaku. Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan system dan nilai sosial yang positif yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktekkan oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations (Mangatas Tampubolon, 2001: 12-13) meliputi:

(1) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

(2) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

(3) *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

(4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

(5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

(6) *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

(7) *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

(8) *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

(9) *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

(10) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

(11) *Increasing people's ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.

Upaya pemberdayaan, seperti dikatakan Kartasasmita (1996: 159-160) harus dilakukan melalui tiga arah. *Pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya. *Ketiga*, melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. (Vitayala, 2000).

Pemberdayaan akan bisa berjalan sesuai harapan jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Menurut hasil kajian Ross yang dikutip oleh Mangatas Tampubolon (2001: 17), setidaknya-tidaknya ada tiga pendekatan pemberdayaan yang bisa dipilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- (1) *The "single function" approach in which programmes or techniques are implanted by external agents -"a new school, a medical program, or a housing project, which the external agent (or the organization he presents) thinks will benefit the community.*
- (2) *The "multiple" approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety of services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.*
- (3) *The "inner resources approach". "Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to work co-operatively with governmental and other agencies at satisfying them.*

Dengan pendekatan *the single function*, keseluruhan program atau teknik pemberdayaan masyarakat ditangani oleh agen pembangunan dari luar. Umumnya pendekatan ini kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini terjadi karena warga masyarakat merasa sangat asing dengan berbagai program dari luar. Oleh karena itu, meskipun pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini diakui sebagai inovasi yang baik, namun dalam prakteknya sulit diadopsi. Pendekatan ini dianggap akan menjadikan masyarakat tergantung kepada bantuan orang lain, dan pada gilirannya mengakibatkan inisiatif masyarakat tidak berkembang.

Dengan pendekatan *the multiple approach*, program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh sebuah tim ahli dari luar dengan cara memberikan berbagai pelayanan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, dinilai tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

Adapun pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dirasakan paling efektif adalah *the inner resources approach*. Pendekatan ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan mereka. Pendekatan ini mendidik warga masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kegiatan aktif dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan memberdayakan potensi yang telah dimiliki.

Upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) umumnya mencakup tiga kegiatan penting (Yakub, HM, 1985). Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas (dhuafa) dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, ia menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat.

Dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. Pearse dan Stiefel misalnya, mengatakan bahwa menghormati kebhinnekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi

kekuasaan, peningkatkan kemandirian masyarakat merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pemikir lain, Paul menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan secara adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. (Priyono, Onny, S, 1996). Konsep pemberdayaan ini muncul sebagai sebuah formula atau tawaran untuk memecahkan problema kemiskinan dalam kehidupan sosial akibat kurang efektifnya program pembangunan.

Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan **psikologis-personal** berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan **struktural-personal** berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan **psikologis-masyarakat** berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, *mutual trust*, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan **struktural-masyarakat** berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sutoro Eko, 2002: 3).

Sejauh ini, upaya pemberdayaan dari sisi struktural-masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial. Hal ini karena pemberdayaan pada dimensi ini berhubungan dengan relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial. "Setiap individu tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial", demikian tulis Heller (1994: 185). Bahkan James Herrick (1995) menegaskan bahwa pemberdayaan yang menekankan pada pencerahan dan emansipasi individu tidak cukup memadai untuk memfasilitasi pengembangan kondisi sosial alternatif.

### **Bagan** **Dimensi dan Level Pemberdayaan**

Level/Dimensi	Psikologis	Struktural
Personal	Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan kontrol diri.	Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.
Masyarakat	Menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, <i>mutual trust</i> , kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat.	Mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan.

#### F. Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah bukan dimaksudkan untuk mengganggu atau memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu program senantiasa dilakukan dengan pengorganisasian yang matang.

Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program atau proyek kemasyarakatan. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pengembangan masyarakat melibatkan beberapa aktor seperti: pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta para mitra terkait. Mereka bekerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring-evaluasi program. (Suharto, 1997: 292-293).

Usaha-usaha yang dilakukan para aktivis dalam mengorganisasikan kelompok-kelompok sasaran program pengembangan masyarakat umumnya dilakukan melalui beberapa cara. Adakalanya, dilakukan dengan mengintegrasikan kelompok sasaran ke dalam berbagai kelompok informal yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi, para pekerja sosial tinggal memanfaatkan atau mendinamisasikan kelompok-kelompok yang sudah ada dengan memperkenalkan kegiatan baru. Cara lain, adakalanya dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok baru yang didasarkan atas kesamaan jenis kegiatan dan kepentingan di antara mereka.

Berkaitan dengan pengorganisasian kelompok sasaran ini, tampaknya sangat dipengaruhi oleh dukungan positif dari tokoh-tokoh lokal.

Para pekerja sosial menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengorganisasikan, membantu, membangkitkan dan memfasilitasi kelompok sasaran agar tumbuh semangat kemandirian/keswadaanya. Salah satu pendekatan yang utama adalah dengan menempatkan para kader di wilayah-wilayah yang bersangkutan untuk melakukan pendampingan masyarakat.

Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan CBM (*community-based management*/managemen berbasis masyarakat), yaitu: pendekatan pengelolaan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. Carter memberikan definisi CBM sebagai : “*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area*” (Latama, Gunarto, et.all, 2000: 2). Menurut definisi ini, CBM adalah suatu strategi untuk mewujudkan praktek pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. CBM membawa konsekuensi bahwa masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi kesejahteraan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan. Langkah-langkah perencanaan program itu setidaknya-tidaknya meliputi 6 tahap. Pertama, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran. Warga masyarakat umumnya menyadari permasalahan-permasalahan mereka sendiri meskipun hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial ketika dalam tahapan ini berjalan adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi di antara warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang dan statemen tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan kehidupan masyarakat di mana seluruh

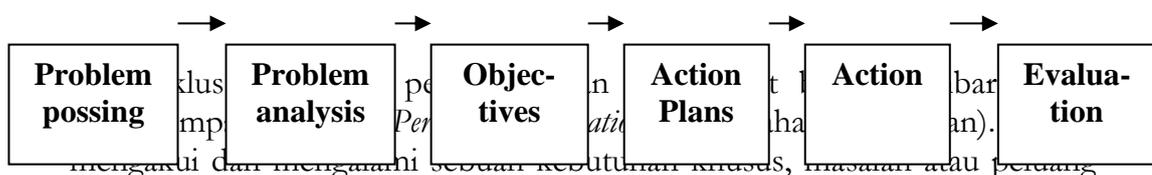
warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal di kalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan.

Sementara sasaran bersifat lebih khusus dibandingkan tujuan. Para pekerja sosial menetapkan apa yang mereka percayai akan dapat dicapai dan kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada warga. Seperti halnya tujuan, sasaran tidak dirumuskan sekali untuk selamanya. Sebaliknya sasaran sering dimodifikasi atau kadang-kadang diperbaharui sebagai strategi menghasilkan cahaya baru terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan untuk berpikir tentang permasalahan dengan cara-cara berbeda. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Dalam memahami dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek, kita bergerak dari sesuatu yang luas ke spesifik dan dari sesuatu yang abstrak ke konkrit.

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan stake holder, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan. Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat. maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan dan bahkan harian.

Strategi yang bisa diterapkan ketika para pekerja sosial menangani program pengembangan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:



dan menggabungkan kekuatan sebagai sebuah kelompok informal untuk membahas persolan. Tahap ini merupakan salah satu energi dan semangat besar.

*Kedua, establishment stage* (tahapan penetapan). Anggota kelompok setuju untuk bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan mereka. Mereka mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan seperti peralatan dan dasar pemikiran, mengembangkan basis keanggotaan serta struktur formal dan informal. Karena kelompok telah terbentuk, maka umumnya mereka telah menyusun peraturan dan memikirkan kerjasama.

*Ketiga, maintenance stage* (tahap pemeliharaan). Setelah kelompok terbentuk, maka akan muncul semangat untuk berprestasi. Tahapan ini difokuskan pada pemeliharaan dan perluasan fasilitas.

*Keempat, evaluation stage* (tahap penilaian). Kelompok mengevaluasi apakah mereka telah bekerja, mempelajari dan memulai perencanaan ke depan (Susan Kenny, 1994: 152).

Secara ringkas, perencanaan program pengembangan masyarakat perlu diusahakan untuk memenuhi kriteria SMART. SMART maksudnya adalah *simple* (mudah dipahami), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *realistic* (mungkin dikerjakan sesuai sumber yang tersedia) dan *time-related* (dapat dikerjakan sesuai waktu yang tersedia).

Dalam tinjauan manajemen, perencanaan strategis yang dilakukan dalam sejumlah aksi pengembangan masyarakat bisa digambarkan dalam sebuah proses yang disebut VMOSA dalam kebanyakan program-programnya. VMOSA adalah proses perencanaan praktis yang sering digunakan oleh organisasi kemasyarakatan. VMOSA terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi dan rencana tindakan. Perencanaan komprehensif ini dapat membantu sebuah organisasi dengan memberikan rencana untuk bergerak dari mimpi kepada tindakan lalu kepada hasil positif yang dirasakan masyarakat.

## BAB II. LSM DAN DISKURSUS PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LSM adalah organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marjinal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan; perlindungan lingkungan atau sumber daya alam; manajemen dan pengembangan sumber daya manusia (Jalal, F, Kazi, 1999: 5).

LSM lahir dalam konteks untuk mengimbangi peran dominatif negara. Tujuannya adalah untuk menjadi *sparing partner* pemerintah secara kritis dan memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kekuatan dalam bernegosiasi dan berjejaring guna menentukan masa depannya sendiri. Tidak jarang peran LSM cenderung menjadi radikal dan galak terhadap pemerintah lantaran kebijakan pembangunannya yang dianggap elitis. Peran LSM seringkali menjadi tumpuan dan harapan masyarakat yang hak-hak sosial politik dan ekonominya telah terampas.

Sebaliknya, LSM tidak didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau material. Jika ada LSM yang proses pendiriannya dimotivasi oleh tujuan-tujuan material maka ia telah menyalahi kodratnya sebagai LSM.

### **A. LSM Sebagai Sebuah Gerakan Sosial**

Sebagian kalangan memahami LSM sebagai kumpulan warga akar rumput yang aktifitasnya dilakukan secara terorganisir untuk mengkritisi proyek-proyek pemerintah. Sebagian kalangan yang lain memahami LSM sebagai kumpulan para ahli yang memberi saran kepada pemerintah tentang suatu masalah secara netral, atau koalisi dari perwakilan kalangan industri yang menyampaikan pemikirannya kepada pemerintah (Nagy, Magdolna, Toth, et.all, 1994: 11). LSM termasuk salah satu bagian dari organisasi *civil society* yang menaruh perhatian pada urusan-urusan kemasyarakatan yang umumnya dikelola dalam wadah kelompok sosial serta memobilisasi sumber-daya berdasarkan nilai-nilai dan visi sosial (Brown, David, L & Kalegaonkar, Archana, 1999).

Selama ini muncul pandangan di kalangan luas bahwa LSM secara *taken for granted* adalah bagian dari *civil society*. Setiap LSM ditempatkan dalam wilayah *civil society*. Pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh gagasan Tocqueville yang melihat *civil society* sebagai arena dari asosiasi-asosiasi yang terlembaga. Pandangan semacam ini agak menyesatkan. Misalnya ketika banyak LSM yang justru sejalan dengan logika negara untuk menjalankan kepentingan-kepentingannya. Dalam kasus ini :LSM justru tidak memberi energi bagi penguatan dan kemandirian masyarakat untuk mendesakkan kepentingannya.

Di pihak lain muncul pandangan bahwa tidak semua LSM bisa dikatakan sebagai bagian dari *civil society*. *Civil society* lahir bukan sesuatu yang

given akan tetapi dari interaksi yang panjang. Sehingga pertama-tama dan paling penting adalah melihat interaksi LSM dalam kaitannya dengan masyarakat, negara ataupun pasar. Untuk melihat apakah LSM bagian dari *civil society* atau bukan perlu diuji dulu dimana keberpihakannya dalam interaksi tersebut, apakah pada masyarakat, negara ataupun pasar. LSM bisa dikatakan sebagai elemen *civil society* ketika ia mewakili kepentingan masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi (Indra, Nanang, K dan Joko Pramono, 2001: 3).

Di Indonesia istilah LSM telah didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990 yang disebarluarkan kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya (Ismawan, Bambang, 2003: 1)

Upaya-upaya LSM dalam mengembangkan masyarakat lapis bawah dapat dilihat sebagai salah satu bentuk gerakan sosial yang sistematis dan terorganisir. Dalam hal ini, sangat menarik untuk dilihat lebih jauh tentang eksistensi LSM sebagai sebuah gerakan sosial dengan menggunakan berbagai pendekatan sosiologis yang ada. Dalam mengkaji gerakan sosial ala LSM ini sebenarnya dua pendekatan yang dapat digunakan sebagai alat analisis. Pertama, pendekatan yang terdiri atas pelbagai teori yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai sebagai masalah atau sebagai gejala penyakit kemasyarakatan. Kedua, pendekatan yang melihat gerakan sosial sebagai fenomena positif atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial.

Pandangan yang melihat gerakan sosial secara negatif dikemukakan oleh R. Harberle. Dalam bukunya yang berjudul *Social Movement: An Introduction to Political Sociology* (1951), Harberle menjelaskan bahwa gerakan sosial pada dasarnya bentuk perilaku politik kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Sosiolog lain, Lipset (1967) juga menganggap gerakan sosial sebagai bagian generasi baru yang memperjuangkan pengakuan dan perlunya menentang orang tua mereka dan keamanan yang tidak memberi pengakuan secara kepada mereka.

Berbagai pandangan yang bernada miring dalam melihat gerakan sosial tampaknya dibentuk dan dipengaruhi oleh penggunaan teori fungsionalisme struktural. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat dan pranata sosial cenderung dilihat sebagai sistem di mana seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan (Parsons, Talcott, 1951:534). Sistem sosial dalam kerangka ini cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau

stabilitas. Dengan demikian, keteraturan menjadi norma sistem. Bila mana terjadi kekacauan norma-norma maka sistem akan mengadakan penyesuaian dan mencoba kembali mencapai keadaan normal.

Masih menurut penjelasan Parsons, setiap sistem yang hidup harus memenuhi fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu demi mempertahankan kelestariannya. Kebutuhan fungsional mencakup dua hal. Pertama, kebutuhan yang berhubungan dengan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungan (Sumbu internal-eksternal). Kedua, kebutuhan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran, tujuan dan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan (sumbu *instrumental-consummatory*). Berdasarkan premis itu, Parsons secara deduktif menciptakan empat kebutuhan fungsional yang terdiri atas: *pattern maintenance*, *integration*, *goal attainment* dan *adaptation* (Hoogvelt, MM, Ankie, 1976: 22). Fungsi *pattern maintenance* dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan atau menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan dan norma-norma. Fungsi *Integration* menunjuk pada koordinasi serta kesesuaian antara bagian-bagian dari sistem sehingga memadukan seluruhnya. Sementara itu, fungsi *goal attainment* menunjuk pada kesesuaian antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan tindakan individual dari anggota masyarakat. Dengan demikian, ada relevansi antara tujuan dengan masyarakat secara menyeluruh dan ada mobilisasi dari anggota masyarakat untuk merealisasikan tujuan sistem dan menentukan prioritas antara tujuan satu dengan tujuan lain dari sistem. Adapun fungsi *adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem sosial menjamin apa yang dibutuhkan sistem sosial dari lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber yang ada pada seluruh sistem (Parson, Talcott, 1970: 35)

Dengan demikian, teori fungsionalisme menekankan keseimbangan, kesatuan masyarakat daengan apa yang dimiliki oleh para anggotanya secara bersama serta menekankan mekanisme reorganisasi dalam sebuah sistem sosial demi kebutuhan memperbaiki keseimbangan. Perubahan dalam fungsionalisme hanya diasumsikan berlangsung secara perlahan-lahan dan teratur. Perubahan senantiasa menyeimbangkan kembali keadaan dan akan menghasilkan suatu kondisi keseimbangan yang bergerak.

Berpijak pada preposisi ini, penganut fungsionalisme cenderung melihat gerakan sosial yang direpresentasikan dalam kegiatan LSM secara negatif. Gerakan sosial yang tercermin pada kegiatan LSM harus dihindari karena akan menciptakan konflik yang cenderung mengganggu masyarakat. Dari sini, fungsionalisme dapat dikategorikan sebagai teori stabilitas sosial dan konsensus normatif. Teori fungsionalisme Person dikategorikan konservatif karena menganggap masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang dan mapan (Suwarsono dan Alvin Y. So, 1994: 11).

Di luar pandangan negatif seperti ini, ada beberapa sosiolog yang melihat kehadiran LSM dengan pendekatan positif. Menurut mereka, LSM adalah gerakan sosial yang bisa menjadi sarana dalam memperbaiki kondisi sosial sekaligus menciptakan perubahan sosial. Pendekatan ini berkembang di kalangan sosiolog yang mengkritisi teori fungsionalisme, dan memunculkan teori alternatif yang dikenal dengan teori konflik. Teori konflik mulanya berakar dalam marxisme tradisional yang didasarkan pada pendapat mereka bahwa revolusi adalah suatu kebutuhan yang disebabkan oleh memburuknya hubungan produksi yang memunculkan krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. Namun dalam perjalanannya banyak kritik muncul terhadap marxisme tradisional ini dari generasi baru seperti golongan Kiri Baru (*New left*) maupun dari teoritis non-Marxis terhadap pendekatan Marxisme yang mekanik ini.

Kaum Kiri Baru mengajukan analisis alternatif yang menekankan perhatian kepada peran manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis dan pendidikan dalam mentransformasikan krisis ekonomi menjadi krisis umum. Mereka juga menolak gagasan determinisme historis yang mengagungkan manusia sebagai faktor penting di antara banyak faktor lainnya yang saling bergantung secara dialektis. Mereka (Fakih, Mansour, 1996: 44).

Dalam menjelaskan teorinya, Kaum Kiri Baru mengajukan argumen bahwa gerakan sosial yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an sama sekali tidak berorientasi kepada perjuangan kelas dalam pengertian yang didefinisikan oleh para penganut Marxisme tradisional. Gerakan anarkhisme, gerakan spiritualitas, gerakan feminisme, gerakan hak asasi manusia dan hak-hak sipil, gerakan antiperang dan antinuklir, gerakan sosial berbasis komunitas, gerakan pencinta lingkungan, gerakan LSM maupun berbagai gerakan sosial lainnya adalah gerakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas buruh. Menurut mereka, gerakan sosial dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kelompok atau kepentingan sosial lain sambil melekatkan proses kemasyarakatan yang lebih luas. Gerakan sosial bagi mereka juga dilihat sebagai usaha untuk menghasilkan transformasi mendasar dalam praktek politik. Jadi gerakan sosial di sini diletakkan dalam konteks demokratisasi yang lebih luas atau proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, politik maupun aspek kehidupan lainnya.

Teori perubahan sosial yang nonreduksionis ini sangat dipengaruhi oleh Antonio Gramsci khususnya melalui teorinya tentang hegemoni. Konsep hegemoni adalah inti dari perubahan sosial karena hegemoni adalah bentuk kekuasaan kelompok dominan yang digunakan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat. Teori hegemoni Gramsci memiliki implikasi yang luas yaitu kelas buruh tidak lagi dianggap sebagai pusat gerakan revolusioner. Sebaliknya Gramsci membuka kemungkinan memasukkan kelompok-kelompok baru di dalam kategori kelas buruh dan

kemungkinan menciptakan menciptakan aliansi antara unsur kelas buruh dengan kelompok lainnya dan menekankan transformasi kesadaran sebagai bagian proses revolusioner.

Dari perspektif Gramscian, konsep organisasi gerakan sosial dikategorikan sebagai masyarakat sipil terorganisir, yaitu: sebuah gerakan yang diorganisir dengan rumusan tujuan, strategi dan metodologi secara jelas dan sadar berdasarkan analisis sosial yang kuat. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk organisasi voluntir seperti gereja, perkumpulan, sekolah dan mass media (Waters, Malcom, 1994: 183). Mereka merupakan agregasi atau percampuran kepentingan serta berupaya mentransformasikan kepentingan sempit menjadi pandangan yang lebih universal atau semacam ideologi dan membentuk sebuah aliansi. Oleh karena itu, bagi Gramsci, pendidikan, kultur dan kesadaran adalah daerah perjuangan yang penting untuk mewujudkannya (Gramsci, 1971)

#### **B. Keberpihakan LSM terhadap Masyarakat Lapis Bawah**

Secara umum LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan pada level masyarakat bawah (*grassroot*) melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. LSM adalah organisasi non-profit dan non-pemerintah (Kenny, Susan, 1994: 10). Sasaran LSM adalah menjadikan kelompok masyarakat kurang beruntung lebih bereswadaya setelah program-program kemasyarakatannya berakhir. LSM sebagai pelaku perubahan (*agent of change*) pada umumnya berperan sebagai fasilitator pendidikan masyarakat, komunikator bagi kepentingan masyarakat lapis bawah, katalisator, dinamisator transformasi sosial serta mediator antara pemerintah dan lembaga lain seperti bank dan masyarakat. LSM dapat berperanan penting dalam mendukung kelompok-kelompok swadaya masyarakat melalui sejumlah upaya. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal dan taktik-taktik untuk memenuhinya. Kedua, melakukan mobilisasi dan menggerakkan usaha aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, merumuskan kegiatan jangka panjang dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang lebih umum. Keempat, menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan. Kelima, pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok sasaran (Hannam, Peter, 1988: 4).

Jika ditelaah, sejarah kemunculan dan perkembangan LSM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan kerangka kerja pembangunanisme (*developmentalisme*) dan aplikasinya dalam segala bidang. *Developmentalisme* pada masa Orde Baru diyakini sebagai gagasan besar untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nalar pertumbuhan yang inheren dalam ideologi ini telah mendorong negara - yang didukung kekuatan ekonomi dan politik internasional- untuk menerapkan praktek politik yang mengedepankan stabilitas. Alhasil, terjadi proses sentralisasi kekuasaan dan peran negara dalam kehidupan publik.

Semangat untuk mengimbangi peran hegemonik negara inilah yang mendorong kelahiran LSM. Dalam pandangan para aktivis LSM, upaya mengubah watak otoriterisme negara ke arah demokrasi lalu menguatkan bangunan *civil society* perlu menjadi prioritas perjuangan. Berbagai program seperti pendidikan politik, pengorganisasian, maupun advokasi kebijakan dilaksanakan di sejumlah lokasi. Tujuannya, untuk mempopulerkan gagasan dan ide-ide kritis-alternatif dan menanamkan nilai-nilai dan kesadaran berdemokrasi seperti partisipasi, kontrol, transparansi, pentingnya akuntabilitas, prinsip pluralisme, HAM, solidaritas sosial, dan kesadaran hukum. Mereka menempuh pendekatan pengorganisasian dengan mendorong pembentukan wadah-wadah atau organ fungsional semacam forum kewargaan di berbagai lini dan sektor secara massif. Petani, buruh, pedagang, perempuan, mahasiswa, serta kaum miskin kota dikondisikan agar membentuk gugus kerja sebagai alat perjuangan mengartikulasi kepentingan. Pengelompokan sosial untuk kerja politik semacam itu kian menyebar di komunitas desa sampai kalangan perkotaan. Luar biasa kebangkitan mereka. Demikian halnya upaya advokasi *policy* melalui kritik kebijakan dan pembuatan *legal drafting* di pusat sampai daerah dilakukan (Sujito, Aric, 2001: 17).

Menurut Philips J Elridge, kelahiran LSM di Indonesia didorong oleh dua hal. Pertama, adanya upaya mencari model partisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang memberikan penekanan lebih besar bagi masyarakat sendiri dalam menentukan kebutuhan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Kedua, adanya tuntutan kepada LSM sebagai katalisator bagi pengembangan nilai-nilai dan proses demokrasi dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia secara lebih luas (Elridge, Philips, J, 1995: 1). LSM Indonesia dalam perkembangannya mampu menjadi agen perubahan serta menjadi perantara terjadinya proses perubahan. Secara lebih luas LSM berusaha meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat kurang mampu dalam mengelola pemenuhan kebutuhan mereka sendiri, meningkatkan kemampuan mereka dalam berhadapan dengan agen-agen pemerintah dan lembaga-lembaga lain secara sederajat serta membuka jalan dalam memperkuat posisi *civil society* dalam berhadapan dengan negara.

Bisa dikatakan, kelemahan-kelemahan yang melekat pada paradigma *developmentalisme* serta pola pemerintahan Orde Baru yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat telah mendorong pembentukan LSM. LSM yang didirikan pada awal 70-an bisa dikatakan generasi pertama. Pendirinya adalah para aktivis yang pernah berjuang pada era Orde Lama dan kesemuanya mencerminkan satu generasi awal. Mereka semula menjadi penggiat yang mensukseskan dan mendukung lahirnya Orde Baru. Akan tetapi, jalannya pemerintahan Orde Baru yang dianggap bertolak belakang dengan harapan rakyat membuat mereka menjauh dari rezim penguasa ini (A Sabtoni, 2001).

Peristiwa malari tahun 1974 menjadi masa rentan yang dihadapi oleh para aktivis LSM dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan Orde Baru. Beberapa pelaku aksi Malari ini ditangkap dan dipenjara. Dari kejadian ini lahirlah LSM Generasi kedua di Indonesia. LSM ini dalam kegiatannya masih menggunakan bingkai lama, namun pola relasi para aktivisnya dengan Orde Baru sudah mulai bertolak belakang. Para aktivis LSM sudah mengambil jalur oposisi terhadap rezim Orde Baru.

Pada tahun 1980-an muncul perkembangan baru dalam kehidupan LSM di Indonesia. Berbagai LSM mulai lahir di daerah dengan fokus kegiatan pada pengembangan masyarakat di pelosok-pelosok desa. Periode ini ditandai pula dengan semakin kuatnya jaringan LSM besar dan semakin kuatnya aliran dana yang diterima oleh mereka. Kondisi ini memberikan kemapanan dan *status quo* pada 13 LSM besar. Mereka cenderung menjadi “kartel” dalam arti: mereka mempunyai akses, kekuatan dana, lobbying dan fasilitas yang digunakan untuk memperbesar kelembagaan LSM. Anggota kartel LSM besar adalah mayoritas generasi LSM generasi pertama. Bahkan karena kestabilannya, mereka cenderung tidak dapat membebaskan diri dari *establishment* dan *developmentalis*. Mereka tidak mampu melontarkan kritik terhadap kondisi sosial politik secara efektif. Bahkan mereka tidak mampu membuat terobosan baru yang berarti bagi perubahan. Konsolidasi hampir tidak pernah terjadi di antara para tokoh-tokohnya. Kondisi ini memancing kekhawatiran di kalangan LSM lain yang tidak tergabung pada aliansi. Mereka khawatir, praktek monopoli dana seperti ini akan menciptakan situasi yang tidak sehat bagi kehidupan LSM di Indonesia.

Perjalanan LSM tidaklah berhenti pada titik ini. Masih ada dinamika yang patut dicatat pada periode ini. Beberapa aktivis LSM dari kelas menengah seperti Arief Budiman, Adi Sasono, Sritua Arief dan Farchan Bulkin pada tahun 1982 telah membawakan wacana-wacana pergerakan yang lebih radikal. Wacana perlawanan terhadap status quo ini disambut secara luas di kalangan aktivis mahasiswa. Salah satu dampaknya, kehidupan pergerakan di luar kampus semakin semarak dan dalam perjalanannya para aktivis mahasiswa telah ikut membidani lahirnya LSM generasi ketiga. Pilihan perjuangan seperti ini dilakukan karena mereka merasa gagal dalam membangun aliansi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat. Secara fenomenal, kemunculan mereka ditandai dengan kasus Petani Badega tahun 1989.

Dinamika internal LSM tahun 80-an meskipun tidak jelas masih sempat menghasilkan beberapa pemikiran kritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Di luar itu, berbagai LSM daerah mulai membentuk jaringan dengan mewacanakan berbagai gagasan perubahan dan melahirkan banyak kader atau aktivis yang menjadi kekuatan penting dalam perjuangan. Di antara mereka terjapi upaya saling tukar gagasan dalam rangka membangun identitas dan format perjuangan.

Munculnya isu globalisasi pada masa tahun 90-an telah memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan LSM di Indonesia. Beberapa perhelatan yang membahas berbagai permasalahan global seperti KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro Brasil, KTT HAM di Wina Austria, KTT Kependudukan di Kairo, KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen Denmark dan KTT Perempuan di Beijing semakin mengakui eksistensi LSM baik terhadap lembaganya maupun gagasan-gagasannya. Hadirnya LSM pada forum KTT tingkat dunia ini setidaknya-tidaknya menjadi pengakuan bahwa LSM dianggap sebagai stakeholder global yang keberadaannya patut diperhitungkan.

Pada periode ini, pola perjuangan LSM mulai melirik dan mendukung tumbuhnya gerakan massa. Gerakan massa buruh, tani dan perempuan mulai bermunculan di seluruh pelosok tanah air. Pada periode ini, LSM-LSM di daerah mulai mengkonsolidasikan diri dan membentuk forum bersama. Forum-forum ini akhirnya bernama Forum LSM yang berguna mewadahi berbagai kegiatan dan program kerja bersama.

Pada periode ini, hampir seluruh LSM mengusung isu besar bersama yaitu: penguatan masyarakat sipil. Paradigma masyarakat sipil menguatkan posisi pilihan perjuangan LSM untuk tidak memilih gerakan radikal dan menjauhkannya dari pandangan anarkhis. Perdebatan terjadi antara aktivis LSM yang mempertahankan pola gerakan rakyat sebagai bagian perjuangan politik dan pola gerakan *civil society* yang menginginkan kemajuan masyarakat (publik) atau pola perjuangan kualitatif. Namun pada akhirnya, di antara mereka saling menyadari bahwa gerakan rakyat dan gerakan masyarakat masih sejalan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, mereka tetap berupaya mencari format sintesa yang mengawinkan kedua pola perjuangan ini dan tetap menjaga capaian-capaian tujuan politik yang menjadi inti dari kedua gerakan ini.

Datangnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru sangat mempengaruhi kehidupan LSM di Indonesia. Menjelang dan sesudah datangnya era reformasi, gerakan LSM bersama gerakan mahasiswa telah bahu membahu dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini.

Reformasi telah mengakibatkan longgarnya birokrasi pemerintahan dan makin diakuinya eksistensi gerakan LSM oleh pemerintah. Pendeknya, LSM telah mendapatkan pengakuan secara lebih proporsional oleh negara. Sebagai dampaknya, pertumbuhan LSM mulai tidak terkontrol lagi. LSM yang semula dianggap sebagai alat perjuangan dan wadah berkreativitas bagi para aktivis, dalam perkembangannya ada pihak-pihak yang menganggapnya sebagai wilayah permainan publik dan tempat untuk mencari penghidupan. Negara pun telah memanfaatkan institusi LSM sebagai bagian dari proses politik yang dilakukannya untuk melanggengkan kekuasaan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Yang lebih menarik, pada periode ini mulai muncul pandangan bahwa LSM dianggap

sebagai alternatif penghidupan atau lahan pekerjaan baru bagi angkatan kerja muda. Para angkatan kerja melihat LSM sebagai ladang baru karena dianggap memberikan hasil yang menarik dan persyaratan kerja tidak terlalu sulit.

LSM generasi sekarang atau LSM generasi ke empat telah memosisikan dirinya sebagai bagian yang permanen dari institusi gerakan sosial. LSM sekarang telah menjelmakan dirinya dalam sebuah lembaga permanen dan dikelola secara profesional. Bahkan ada LSM yang sekarang mengorientasikan program kegiatannya ke arah profit. Mereka telah memformat institusi LSM dengan manajemen modern, ada direktur, staff hingga tukang sapu. Mereka telah melupakan sejarah gerakan sosial yang mencirikan khas gerakan LSM seperti ketika didirikan.

Meskipun demikian perlu diakui masih banyak LSM yang memiliki idealisme. Dalam catatan politik Indonesia kontemporer, LSM menjadi salah satu pionir perubahan sosial politik. Perannya dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap negara telah menempatkan LSM sebagai salah satu kekuatan politik Indonesia yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Sebagian besar LSM hingga kini masih memperjuangkan nasib masyarakat miskin dan menangani persoalan-persoalan masyarakat sipil secara aktif melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan peningkatan akses yang lebih besar bagi kalangan lapis bawah dan organisasi rakyat dalam mengontrol sumber daya.

Jelasnya, memperkuat masyarakat sipil menghadapi hegemoni negara dan sektor bisnis merupakan lahan perjuangan mereka. Pada konteks ini, mereka telah membantu masyarakat sipil dalam menghadapi korporasi modal internasional menjadi kekuatan kontrol atas hegemoni *developmentalisme* serta aplikasinya. Mereka telah mengkampanyekan gagasan pembangunan alternatif, yang didasari oleh sebuah keyakinan bahwa gagasan ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat miskin menuju tahap kehidupan yang lebih baik. Dengan strategi yang lebih *grassroots*, LSM berusaha menggalang potensi laten yang cenderung belum terjamah dalam strategi “penetesan ke bawah” yang dilakukan Pemerintah saat itu. Meskipun bentuk pembangunan *grassroots* tersebut sulit dilakukan, namun dalam realitanya LSM bisa melakukannya berkat keunggulan-keunggulan yang melekat dalam dirinya. Keunggulan yang dimiliki LSM setidaknya meliputi 4 hal. Pertama, LSM dekat dengan kaum miskin dan mempunyai organisasi terbuka yang memudahkan penyaluran informasi ke atas. Kedua, LSM mempunyai staf yang bermotivasi tinggi. Ketiga, LSM mempunyai efektifitas biaya serta bebas dari korupsi. Keempat, LSM cukup kecil, terdesentralisasi, luwes dan mampu menerima *feedback* dari proyek yang dipromosikan.

#### **a. Pengembangan Masyarakat Lapis Bawah**

Upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang digagas LSM pada umumnya memusatkan perhatian kepada nasib orang-orang kecil. Orang kecil adalah kelompok masyarakat yang dianggap kurang beruntung (*disadvantage groups*) karena mereka berada dalam situasi serba kekurangan serta dibalut oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan mereka. Kondisi-kondisi yang menekan kehidupannya antara lain berupa: lemahnya nilai tukar hasil produksi, lemahnya organisasi, rendahnya perkembangan sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas, lemahnya akses dari hasil pembangunan, minimnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, sederhananya teknologi yang dimiliki, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, minimnya kemampuan berpartisipasi dalam sistem pembangunan nasional, lemahnya posisi tawar menawar. Kalau kondisi-kondisi tersebut dikaitkan satu sama lain dalam pola hubungan sebab akibat, maka muncullah wajah orang kecil yang serba kurang mampu berbentuk segitiga yang terdiri dari rendahnya pendapatan, adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar dan rendahnya kemampuan berpartisipasi dalam sistem nasional. Kalau ditelusuri sebab-sebabnya maka yang menjadi sebab paling pokok adalah lemahnya pengembangan sumberdaya manusia (Ismawan, Bambang, 2003: 7).

Dengan kata lain, fokus kegiatan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Kita akui, kemiskinan saat ini menjadi agenda persoalan yang mendesak untuk dipecahkan. Kemiskinan merupakan fakta yang setiap kali terucap selalu menyisakan sebuah kegetiran. Getir karena selalu ingin dipecahkan tapi kunjung tuntas. Dalam buku *Development as Freedom and Poverty and Famines*, Amartya Sen memberikan pengertian kemiskinan sebagai ketiadaan akses berupa informasi, kesehatan, pendidikan dan tentu saja sandang, pangan dan papan (Saidiman, 2005: 55).

Menurut definisi yang lebih umum, kemiskinan merupakan masalah pembangunan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak berdayaan. Kemiskinan biasanya dibagi dalam dua model: pertama, kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau disebut juga kemiskinan struktural, karena is terjadi secara terus-menerus. Kedua, kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara. Kemiskinan seperti ini biasanya menimpa masyarakat karena terjadi sebuah gejala sosial, konflik horizontal, perang, atau bencana alam.

Jika dicermati, kemiskinan memiliki sejumlah indikator. Untuk kasus Indonesia, para akademisi menggunakan standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan yang dibutuhkan untuk

memenuhi standar kehidupan yang layak. Penentuan standar minimum diperlukan untuk membedakan antara penduduk miskin dan yang tidak miskin. Standar minimum BPS 1999 menyebutkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 2100 kalori perhari, ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi, dan aneka barang lainnya, maka is disebut miskin.

Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin menjelaskan konsep tentang fakir miskin adalah individu yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak baik kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Timbulnya krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai sekarang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Faktor peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya indeks pengeluaran makanan dan non makanan. Penggunaan standar kemiskinan oleh BPS ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Artinya, indikator kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas nilai rupiah.

Indikator umum kemiskinan dapat dibagi dalam setidaknya 9 titik penting: *pertama*, penghasilan rendah, yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per-orang perbulan berdasarkan data BPS. *Kedua*, ketergantungan pada bantuan pangan miskin (zakat, raskin, santunan sosial, atau kompensasi BBM). *Ketiga*, keterbatasan kepemilikan pakaian bagi setiap anggota keluarga per-tahun (misalnya hanya mampu memiliki pakaian satu pasang setiap orang per-tahun). *Keempat*, tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. *Kelima*, tidak mampu membiayai pendidikan 9 tahun. *Keenam*, tidak memiliki harta yang mampu dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan. *Ketujuh*, ada anggota yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal. *Kedelapan*, ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta aksara. Dan *kesembilan*, tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau bahkan tidak punya tempat tinggal.

Kategori tempat tinggal yang tidak layak dapat diukur berdasarkan beberapa kategori berikut: *pertama*, luas bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruangan yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur) atau luas lantai per-orang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m<sup>2</sup>. *Kedua*, lantai masih dari tanah, bambu, atau diplester secara sederhana. *Ketiga*, kesulitan memperoleh air bersih. *Keempat*, tidak memiliki tempat mandi, cuci pakaian, atau membuang air besar (MCK)

yang memenuhi standar kesehatan. Kelima, tidak memiliki sarana sirkulasi udara yang baik yang memungkinkan matahari untuk masuk. Keenam, dinding umumnya terbuat dari bambu, papan, atau bahan yang mudah lapuk. Dan *ketujuh*, sanitasi lingkungan yang tidak sehat. (Saidiman, 2005: 56).

Kondisi sosial yang terlampau memprihatinkan, yang ditandai dengan kemunculan berbagai problem sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis pengembangan masyarakat. Hal ini diperberat dengan semakin terbatasnya peran negara dalam membantu kaum marginal.

Kenyataannya, hanya orang yang mempunyai hak-hak istimewa saja yang bisa memperoleh dukungan untuk meraup keuntungan atas kesempatan bersaing dalam perekonomian dan pembelian jasa atau layanan kesejahteraan yang mahal. Sementara, individu dan keluarga yang tidak beruntung mustahil mendapatkannya. Untuk itu, seiring dengan bertambahnya tingkat pengangguran dan langkanya pekerjaan, naiknya ongkos perumahan dan makanan, tekanan keluarga dan penyusutan fasilitas dan layanan yang dijamin negara, semua itu tidaklah mengejutkan jika bertambah pula tingkat penderitaan dan tekanan hidup yang menimpa kelompok-kelompok yang termarginalkan (Winsome Robert, 2005: 46).

Secara politis, sulit kiranya mengatasi kondisi-kondisi yang menimpa sebagian masyarakat yang termarginalkan ini. Sebab, pemerintah sejauh ini lebih suka melaporkan berita-berita baik mengenai meningkatnya kemakmuran. Sebagai bagian dari peremehan investasi sosial dan pengeluaran belanja kesejahteraan oleh negara, muncul sebuah kecenderungan yang turut mengiringi ke arah "deprofesionalisasi" kegiatan pengembangan masyarakat dan menyangkal kelayakan pekerja sosial sebagai penasihat kebijakan. Tak pelak lagi, para pekerja sosial yang bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat sama terpinggirkannya dengan seluruh kerja mereka.

Di pihak lain, pemberlakuan liberalisasi ekonomi oleh IMF, WTO dan Bank Dunia pada kenyataannya kian memperluas kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di dalam negara ataupun antarnegara. *Human Development Report* yang dikeluarkan UNDP tahun 2005 membuktikan liberalisasi ekonomi kian memperluas ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan hidup antara negara kaya dan negara miskin. Total pendapatan 500 warga terkaya di dunia jauh lebih besar daripada total pendapatan 416 juta warga termiskin di dunia. Yang lebih ekstrem lagi 2,5 milyar (40%) penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari USD 2 sehari, hanya menguasai 5% dari pendapatan global. Sementara 10% orang terkaya di dunia menguasai 54% pendapatan global.

Dengan kondisi struktural semacam itu, tidak mengherankan kalau sekarang ini kita dihadapkan pada meluasnya pemiskinan dan tingginya angka kemiskinan global. Berdasarkan catatan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan UNDP diketahui bahwa ketidakadilan global kian mengancam kesempatan hidup kaum miskin. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, 18 negara dengan total penduduk 460 milyar mencapai HDI yang jauh lebih rendah daripada HDI yang dapat dicapainya di tahun 1990 (Sri Palupi, 2006: 3)

Ada dua kalimat yang dapat menggambarkan dunia dewasa ini. Globalisasi (pasar bebas) pada hakekatnya adalah *sosialisme bagi si kaya, kapitalisme bagi si miskin*. Negara kaya dan korporasi internasional justru menginternalisasi sosialisme; dengan menjaga solidaritas dan distribusi merata keuntungan yang mereka peroleh dari negara-negara miskin. Sebaliknya negara miskin justru dipaksa mengusung kapitalisme; dalam bentuk liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Dunia dewasa ini sama halnya dengan kolonialisme dahulu, hanya dalam bentuk yang baru.

Gambaran sederhana tersebut menjelaskan adanya paradoks besar dalam paradigma kemiskinan. Pasca krisis Keynesian tahun 1980-an, transformasi paradigma kapitalistik mengalami lompatan ekstrim ke arah neoliberalisme. Kesadaran Keynes akan adanya *sesuatu yang salah* dengan kapitalisme justru hilang tanpa bekas hanya karena kegagalan negara dalam mengelola perekonomian. Neoliberalisme semakin tidak memberikan tempat bagi negara, bahkan untuk melakukan kebijakan demi keadilan sosial. Subsidi, jaminan pelayanan publik dasar, dan jaminan sosial lainnya dianggap inefisiensi. Pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar manusia justru menjadi komoditas yang diperdagangkan (Iqra' Sulhin, 2006).

Neoliberalisme memaksa negara miskin ikut dalam pasar bebas. Bukan sebagai *stakeholder* yang kompetitif, namun hanya sebagai pemberi ruang investasi asing dengan menghilangkan segala macam bentuk hambatan. Di lain pihak, negara-negara kaya justru semakin “sosialis” dengan memperkuat solidaritas dalam *World Trade Organization*, *World Bank*, dan *International Monetary Fund*. Sumber daya dunia terdistribusi relatif merata di antara segelintir negara kaya dan korporasi internasional.

Ditengah liberalisasi ekonomi yang menjanjikan kemakmuran global, sedikitnya 1,2 milyar penduduk di negara berkembang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem (penghasilan kurang dari USD 1 sehari). Padahal subsidi untuk seekor sapi di Eropa saja besarnya 2 USD sehari. Setiap jam ditemukan 1.200 anak mati. Menurut laporan HDI tahun 2005, angka kematian tersebut setara dengan tiga kali tsunami dalam sebulan. Setiap tahun sedikitnya 529.000 perempuan mati di saat

hamil dan melahirkan anak. Setiap tahun 10,7 juta anak mati tanpa sempat merayakan ulang tahun yang kelima.

Hal serupa terjadi di Indonesia. USAID mencatat, di Indonesia setiap jam terdapat 24 balita meninggal. Dari jumlah tersebut, 54% meninggal karena gizi buruk, 19% karena diare dan gangguan pernafasan. Sementara ibu meninggal saat melahirkan mencapai 5 juta per tahun atau 2 kematian ibu hamil melahirkan setiap jam. Tentang kemiskinan, kajian Econit menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (*absolute poor*) pada kuartal I 2006 membengkak menjadi 51,2 juta jiwa dari 41 juta jiwa pada akhir 2005. Sedangkan angka kemiskinan pada periode yang sama meningkat menjadi 23% dari 18,6%. Sementara Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan di bawah 2 USD atau Rp 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia (Sri Palupi, 2006: 4).

Dilihat dari pendekatan sosial, fenomena kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial. Kemiskinan muncul sebagai akibat adanya kesalahan dalam proses kehidupan sosial. Pemecahan masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, tetapi perlu didahului dengan langkah diagnosis masalah untuk mengungkap sumber kesalahan atau akar penyebab kemiskinan. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam mendiagnosis masalah kemiskinan. **Pertama**, *individual blame approach*. Dalam pendekatan ini, diagnosis masalah kemiskinan dilakukan dengan mencari sumber masalah kemiskinan dari dalam pribadi si penyandang masalah. Melalui pendekatan ini, pada umumnya diidentifikasi sumber masalahnya adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan, penguasaan skill yang rendah, tingkat kesehatan dan kelemahan fisik, etos kerja yang rendah dan faktor-faktor lain yang berasal dari pribadi penyandang masalah (Soetomo, 2004: 95-96).

**Kedua**, *system blame approach*. Dalam pendekatan ini, sumber masalah kemiskinan yang dicari berada pada level sistem seperti struktur sosial yang menghasilkan alokasi dan penguasaan sumber daya yang timpang, institusi sosial yang melahirkan berbagai diskriminasi, kurangnya akses dalam pengambilan keputusan untuk lapisan masyarakat tertentu dan sejenisnya.

Bisa ditegaskan, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan. Para aktivis pengembangan masyarakat yang berhimpun dalam wadah LSM perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. LSM memang berperan strategis untuk menangani masalah-masalah sosial khususnya kemiskinan melalui gerakan

peningkatan kekuatan dan perluasan akses pada komunitas lokal dan organisasi rakyat.dalam mengontrol sumber daya.

#### **b. Paradigma dan Tipologi LSM**

Banyak kalangan yang berharap pada perjuangan LSM dalam mengupayakan terjadinya transformasi sosial dan aksi-aksi nyata dalam memperjuangkan nasib rakyat miskin. Harapan publik ini sudah dijawab oleh sebagian LSM dengan mengaktualisasikan semangat voluntirisme dalam berbagai kegiatan sosial yang berbasis pada kekuatan masyarakat (*community power*). Memang tidak dapat disangkal bahwa peran LSM sedikit banyak telah membawa perkembangan masyarakat seperti proses demokratisasi dalam masyarakat pedesaan dan advokasi untuk masyarakat pinggiran.

Pada saat ini ada ratusan, bahkan ribuan LSM dengan *full-timer*. Ada yang lebih besar organisasinya dengan ratusan tenaga *full-timer*. Ada yang bekerja langsung melayani masyarakat kecil dengan memperkuat kemampuan mereka. Ada yang mengkhususkan kegiatan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat bawah. Ada pula yang berusaha menjembatani berbagai sektor : yang kuat dengan yang lemah, yang formal dengan non formal, inti dan plasma, tradisional dan modern dan lain-lain. Dan ada pula yang melaksanakan hal-hal tersebut secara serempak. Sedang bidang kegiatan LSM saat ini meliputi kegiatan yang cukup luas antara lain: bidang lingkungan hidup, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan, pendampingan konsumen, pendidikan dan latihan, perhutanan sosial, pengairan, koperasi, penerbitan, kesehatan dan keluarga berencana serta pengembangan pertanian (pedesaan) dan lain-lain.

Pada konteks ini dapat digarisbawahi bahwa ciri utama pengembangan masyarakat yang dilakukan LSM sangat mengapresiasi dan mengakomodasikan realitas kekayaan dan kebutuhan lokal. Model pengembangan masyarakat berbasis lokalitas seperti ini mendapat pembenaran akademis oleh Michael R. Dove. Seperti diketahui, pemikiran Dove cenderung memahami budaya tradisional secara positif. Budaya tradisional, kata Dove, tidak harus selalu ditafsirkan sebagai penghambat pembangunan. Bahkan Dove tidak ragu-ragu menyatakan bahwa tradisional tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang terbelakang. Pandangan ini diungkapkan oleh Michael R. Dove dengan tendensi untuk merevisi sikap dan pandangan umum yang dipegangi oleh kebanyakan ilmuwan sosial dan pengelola pembangunan Indonesia yang cenderung melihat budaya tradisional sebagai indikasi keterbelakangan dan sebagai penghambat kemajuan sosial ekonomis. Dove dalam hal ini, mengkritik sikap kebanyakan ilmuwan sosial dan pengelola pembangunan Indonesia yang selalu berupaya mendevaluasi, depresiasi atau bahkan mengeliminasi keseluruhan bentuk dan isi

budaya tradisional dalam konteks pembangunan. (Dove, Michael, R, 1988: 31)

Sebaliknya bagi Dove, budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat budaya lokal tersebut melekat. Bahkan dalam batas-batas tertentu, budaya tradisional dapat dilihat berperan positif untuk mendorong laju modernisasi. Bagi Dove, budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis dan oleh karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.

Beberapa temuan penelitian Michael R Dove telah membuktikan bahwa beberapa elemen budaya tradisional Indonesia telah mendukung gerakan pembangunan. Pertama, dari hasil penelitian Dove terhadap agama-agama tradisional yang dipeluk oleh kebanyakan suku-suku terasing di luar Jawa terungkap bahwa agama-agama tradisional itu mempunyai secara empiris mempunyai sistem ilmu pengetahuan tentang dunia yang valid. Bagi penduduk Wana di Sulawesi Tengah, agama tradisional yang dianutnya merupakan agama superior dibandingkan agama-agama lain termasuk agama-agama dunia serta memiliki ajaran yang cukup tentang tradisi, adat dan ilmu pengetahuan.

Kedua, dari hasil kajian Dove terhadap sistem ekonomi tradisional terungkap bahwa sistem ekonomi tradisional seperti pertanian berladang, usaha mengumpulkan sagu dan usaha pertanian berpindah-pindah ternyata memberi manfaat fungsional bagi masyarakat setempat. Bagi penduduk Bima di Sumbawa, pertanian peladangan merupakan alternatif pilihan yang tepat dalam bertani pada tanah-tanah pertanian yang curam dan berbatu. Cara bertani mereka tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Usaha sagu dan pertanian berpindah-pindah yang dilakukan penduduk Punan di Kalimantan ternyata mempunyai dua tujuan. *Pertama*, untuk kepentingan menjaga kelangsungan hidup. *Kedua*, untuk memenuhi keperluan pasar dengan cara pertukaran barang-barang hasil hutan.

Ketiga, menurut temuan penelitian Dove terhadap budaya tradisional dan perubahan sosial terungkap bahwa budaya tradisional memiliki peran positif dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari budaya tradisional penduduk di gunung merapi di Jawa Tengah yang menggunakan pengamatan terhadap gejala, tanda-tanda, macam dan waktu letusan gunung Merapi di masa lalu dan tercermin dalam pengetahuan populer rakyat kebanyakan, mereka mampu menghindari timbulnya resiko kematian yang berlebihan selama empat kali letusan gunung Merapi tersebut. Selain itu masyarakat tradisional memiliki ciri dinamis (Dove, Michael, R, 1988: 20), artinya mereka selalu mengalami perubahan sosial yang terus-menerus sesuai tantangan internal dan kekuatan eksternal yang mempengaruhinya. Hal ini dapat dilihat pada kearifan penduduk Bima, setelah secara terus-menerus

berhadapan dengan usaha pemerintah yang berkeinginan untuk merubah cara pertanian warga setempat, dengan perlahan-lahan bersedia membenahi cara pengelolaan tanah pertanian mereka.

Pandangan yang intinya mengapresiasi peran positif budaya tradisional dalam mendorong pembangunan juga dikemukakan oleh Winston Davis. Pandangan Davis muncul sebagai kritik terhadap pandangan Max Weber dan pengikutnya dalam menjelaskan keterkaitan agama dengan pembangunan. Bagi Davis, masyarakat memerlukan tumbuhnya semacam spirit (bukan etos spiritual) untuk lahir dan berkembangnya kapitalisme. Dijelaskannya, pembeli dan pedagang memerlukan spirit untuk menumbuhkan dan menjaga nama baik sebagai kreditur, sementara usahawan memerlukan tumbuhnya semangat ketegaran mengambil resiko. Wiraswastawan membutuhkan spirit untuk membangun kemampuan menumbuhkan disiplin kerja. (Davis, Winston, 1987: 221). Melalui teori barunya yang disebut *teori barikade*, Davis menjelaskan bagaimana masyarakat tradisional menyiapkan barikade untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan gangguan yang ditimbulkan oleh berkembangnya kapitalisme. Dalam menguraikan teorinya, Davis melukiskan masyarakat tradisional dalam tiga pusran lingkaran. Pertama, lingkaran terdalam merupakan representasi ekonomi dan nilai yang terkait misalnya kebutuhan berprestasi dan universalitas. Kedua, lingkaran luar merupakan representasi masyarakat dan nilai-nilai yang terkait, status dan hubungan kekuasaan. Ketiga, lingkaran tengah menggambarkan wujud “barikade kekebalan” yang ditumbuhkan oleh masyarakat tradisional untuk menghalangi perkembangan ekonomi. Barikade ini antara lain meliputi nilai-nilai tabu, agama tradisional, nilai-nilai moral, hukum, filosofi dan agama rakyat.

Lingkaran tengah bagi Davis merupakan pranata bertahan yang diperlukan untuk melihat dan mengawasi perkembangan ekonomi. Lingkaran tengah merupakan aktor-aktor pertahanan yang punya kemampuan untuk mengelak, mendesak, membuat gerakan berpura-pura, gerakan mundur, melakukan konsolidasi, bersekongkol, bekerja sama, berkhianat, berkompromi dan juga menyerah kepada lawan. Lingkaran tengah ini berfungsi membatasi luas perkembangan pasar dengan upacara-upacara ritual tradisional, untuk menjaga agar fungsi pasar tetap berada dalam lingkaran terkecil tersebut. Pada konteks ini, model yang dikembangkan Davis adalah pembangunan ekonomi tidak hanya terjadi ketika agen pembangunan mampu menyerang dan melewati benteng pertahanan masyarakat, tetapi juga ketika pembatas tersebut menua dan melemah dan akhirnya sedikit demi sedikit tumbang atau ketika benteng pertahanan tersebut kehilangan semangat, pegangan dan akhirnya menyerah (Davis, Winston, 1987: 232). Dapat dijelaskan, jika barikade agama telah retak maka akan memberikan kesempatan pada ekonomi dan nilai yang terkait dengannya untuk

melakukan ekspansi dan kemudian melakukan penetrasi terhadap wilayah pokok atau jantung masyarakat. Dengan metafora bariakade ini, Davis juga ingin menegaskan bahwa hadirnya ekonomi rasional-kapitalisme di Barat tidak hanya karena Etika Protestan, namun juga karena kekuatan Kristiani hanya sedikit memberi perlawanan terhadap kemelaratannya masyarakat baik dalam menjawab persoalan tanah, persediaan perumahan dan upah tenaga kerja rendah.

Keterkaitan erat antara tumbuhnya LSM di Indonesia dengan wacana pembangunan diakui pula Mansour Fakih. Dalam kacamata Faqih, pertumbuhan jumlah organisasi gerakan sosial seperti LSM di Dunia Ketiga khususnya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sejarah diskursus dan masalah-masalah pembangunan. Bahkan dapat dikatakan LSM-LSM besar masa 1970-an seperti LP3ES, Bina Swadaya, Dian Desa dan YIS bekerja di atas paradigma developmentalisme dan modernisasi. Visi dan paradigma pergerakan LSM besar diadopsi oleh kebanyakan LSM di Indonesia karena umumnya mereka pernah ikut serta dalam program pelatihan yang diadakan oleh LSM besar itu (Fakih, Mansour, 1996: 104)

Berdasarkan paradigma pembangunan dan modernisasi, para aktivis LSM Indonesia umumnya berpandangan bahwa keterbelakangan mayoritas masyarakat disebabkan oleh suatu mentalitas dan nilai-nilai rakyat yang salah. Untuk memperbaikinya perlu dilakukan perubahan terhadap keyakinan, sikap, nilai dan pranata tradisional guna membantu rakyat menjadi modern melalui penciptaan program aksi partisipatif di kalangan kelompok bisnis kecil pedesaan. Pelatihan partisipatif dan pembentukan kelembagaan di kawasan pedesaan menjadi alat transformasi utama menuju modernitas. Implementasi di lapangan di antaranya dilakukan oleh LP3ES lewat penggunaan gagasan program pengembangan dan pemberdayaan industri kecil, Dian Desa melalui pendekatan pertanian dan perikanan serta Bina Swadaya melalui program usaha bersama.

Dengan terlibat dalam aksi pengembangan masyarakat, LSM-LSM pada hakikatnya telah melakukan upaya perubahan sosial (*social change*) secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan tujuan demi menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat. Upaya pembangunan yang dilakukan LSM-LSM sejalan dengan inti konsep pembangunan yang secara umum bercirikan: perubahan terencana (*planned change*), transformasi struktural (*structural transformation*), kemandirian (*otonomy*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Syafa'at, Nizwar, 1977: 357).

Model dan strategi pembangunan alternatif yang diarahkan untuk pengembangan kehidupan masyarakat lapis bawah yang dipilih :LSM dirasakan lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita simak dari analisis David C. Korten yang menyatakan bahwa strategi program pengembangan dari NGOs yang berorientasi

pada pembangunan tercermin dalam empat generasi (Korten, David, C, 1988: 64). LSM generasi pertama lebih berorientasi *relief and Welfare* yaitu berusaha untuk segera memenuhi kekurangan dan kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan. Bantuan diberikan pada saat-saat terjadi bencana alam atau musibah seperti kelaparan, banjir dan kebakaran. Melihat keterbatasan itu maka pada tahun 1970-an bermunculan LPSM dan LSM yang berperan dalam proyek pemberdayaan masyarakat. LSM generasi kedua ini memfokuskan programnya pada *small-scale self reliant local development* atau disebut juga *community development* di antaranya meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Mereka menyadari bahwa penyelesaian persoalan masyarakat tingkat akar rumput tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan atas-bawah (*top-down approach*) tetapi juga membutuhkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*). Oleh karena itu kelompok sasaran LPSM dan LSM adalah masyarakat tingkat bawah, pinggiran dan pedesaan. Pada umumnya mereka memberi perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, kemandirian dan keswadayaan masyarakat dengan tujuan memperbaiki taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya muncul LSM generasi ketiga yang menekankan pada orientasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ia mulai mempermasalahkan dampak-dampak pembangunan serta cenderung melihat dampak pembangunan dalam konteks lebih luas, mulai pada tingkat regional, nasional dan internasional. Berikutnya muncul LSM generasi keempat yang bergerak sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people's movement*). Pola LSM sebagai fasilitator dilakukan dengan membantu rakyat dalam mengorganisasikan diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Selain itu, ia juga membantu mendapatkan sumber daya dari luar sebagai tambahan sumber daya lokal jika yang tersedia tidak memadai guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Strategi program pengembangan dari empat generasi yang dikemukakan Korten, untuk masa kini dapat dilengkapi dengan arah pengembangan program NGOs generasi kelima yaitu pemberdayaan masyarakat (*empowering society*). Untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat diperlukan kerja sama melalui jaringan kerja baik pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Kegiatan LSM dalam pengembangan masyarakat bisa dipahami sebagai bagian dari aksi sosial. Menurut Weber, ada empat tipe kegiatan sosial. **Pertama**, *traditional action*, yaitu: aksi sosial yang didasarkan pada adat-istiadat dan kebiasaan. **Kedua**, *affective action*, yaitu: aksi sosial yang didasarkan pada perasaan. **Ketiga**, *wertrational action*, yaitu: aksi sosial yang berdasarkan nilai-nilai, atau katakanlah ia diorientasikan pada suatu

nilai atau tujuan utama seperti tujuan agama. **Keempat**, *zweckerational action*, yaitu: aksi sosial yang diorientasikan pada tujuan. Aksi sosial ini sangat rasional sebab ia didasarkan pada perhitungan efisiensi sarana terhadap tujuan. Masyarakat Barat, dalam kacamata Weber telah meningkat perhatiannya terhadap *zweckerational action*. Perencanaan strategis, rasionalisme ekonomi dan struktur birokrasi adalah contoh dari *zweckerational action*.

Pengembangan masyarakat yang menjadi fokus dari kegiatan para aktivis LSM didasari oleh sebuah komitmen terhadap upaya pencerahan dan modernisasi masyarakat. Namun, mereka tetap harus kritis terhadap pengungkapan alasan-alasan instrumental, seperti dimanifestasikan dalam program anggaran, ketentuan pelayanan dan indikator kinerja.

Kegiatan aksi sosial kebanyakan LSM pada perspektif ini, bisa dikategorikan sebagai *wertrational action*, yaitu: aksi sosial yang berdasarkan nilai-nilai. Hal ini berarti ada LSM yang mengembangkan kegiatan sosial berdasarkan adat istiadat, emosi dan perhitungan rasional.

Fakta bahwa kecenderungan LSM mengembangkan paradigma perjuangan berbeda-beda setidak-tidaknya pernah disampaikan oleh Mansour Faqih. Menurutnya, ideologi LSM terutama yang berkembang di Indonesia bisa digolongkan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, LSM-LSM yang berparadigma *konformis*. Mereka terdiri atas para aktivis LSM yang melakukan pekerjaan sosial dengan didasarkan pada paradigma karikatif atau sering disebut “bekerja tanpa teori”. Mereka berorientasi pada proyek dan bekerja sebagai organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada. Motivasi utamanya adalah menolong rakyat dan didasarkan pada niat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pertanyaan tentang mengapa ada begitu banyak rakyat miskin dianggap bukan pertanyaan penting. Di antara mereka adalah Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) di pondok-pondok pesantren (Fakih, Mansour, 1996: 125).

*Kedua*, LSM-LSM yang berparadigma *reformisme*. Mereka memiliki pemikiran yang didasarkan pada ideologi modernisasi dan developmentalisme. Mayoritas (80 %) aktivis LSM percaya atau mengikuti paradigma reformisme. Tesis utamanya adalah bahwa keterbelakangan mayoritas rakyat disebabkan adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas dan nilai-nilai rakyat. Mentalitas dan nilai-nilai terbelakang dianggap penyebab utama kelemahan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Karena itu ia menjadikan peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai tema utamanya. Mereka secara umum bekerja dengan menganut kerangka kerja *Developmentalisme* (Pembangunanisme). Mereka tidak benar-benar menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan. Pertanyaan maupun kritik yang mereka ajukan lebih dititikberatkan kepada implikasi metodologis dan teknis pembangunan, seperti mempermasalahkan pendekatan *bottom-up* (bawah

ke atas) versus pendekatan *top-down* (atas ke bawah). Maka masalah yang dianggap strategis pada saat itu adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek pemerintah. Hasilnya adalah pendekatan *bottom-up* dan *partisipasi* menjadi isu besar. Di antara LSM bertipe ini adalah Bina Swadaya, Dian Desa dan YIS.

*Ketiga*, LSM-LSM yang berparadigma *transformatif*. Mereka mulai mengajukan beberapa masalah yang mereka anggap strategis dan mendasar seperti mempertanyakan gagasan dasar dari diskursus pembangunan (*discourse of development*) secara radikal. Pemikiran mereka bersifat alternatif dengan mempertanyakan paradigma *mainstream* yang ada dengan mendorong ke arah terciptanya superstruktur dan struktur yang memungkinkan rakyat untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan sejarah sendiri. Baginya, salah satu penyebab masalah rakyat adalah diskursus pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada. Di antara LSM bertipe ini adalah P3M (Pusat pengembangan Pesantren dan Masyarakat).

Mansour Fakih mengakui bahwa upaya menjadikan gerakan LSM sebagai sarana transformasi sosial merupakan hal yang problematis dan menantang terutama dari sisi partisipasi dan representasi. Hal ini dikarenakan banyak aktivis LSM yang saat ini merasakan program pengembangan masyarakat yang mereka tawarkan hanya sebagai proyek *per se* dan bukan sebagai bagian dari gerakan untuk perubahan.

LSM akhir-akhir ini tumbuh subur bagaikan "industri" baru di saat masyarakat Indonesia tengah mengarungi gelombang liberalisasi ekonomi, demokratisasi dan desentralisasi. Idealnya semakin banyaknya LSM akan memberikan kontribusi yang berharga bagi transformasi sosial. Tetapi menjamurnya LSM dalam sejumlah fakta seringkali masih menjadi bagian dari masalah, bukan sebagai pemecah masalah.

Sekurang-kurangnya ada empat problem besar yang kini dihadapi oleh LSM. *Pertama*, problem internal (managemen, organisasi, keuangan, dan lain-lain) yang terkait dengan akuntabilitas dan keberlanjutan. Sebagian besar LSM tergantung pada donor asing sehingga dituduh sebagai agen kapitalis. Ada LSM "Plat Merah", "Plat Hitam", "Plat Hijau" atau "Plat Kuning".

Ada LSM yang tidak mempunyai akar bawah. LSM ini sengaja dibentuk oleh birokrasi pembangunan (pemerintah) sesuai kepentingan negara donor yang mempersyaratkan keterlibatan LSM dalam memperoleh kucuran dana pembangunan. Ada LSM yang berorientasi proyek, sehingga yang lebih dominan adalah bagaimana mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana dari lembaga donor. Dengan mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat kelas bawah, LSM menyusun proposal untuk mendapatkan dana kegiatan yang telah dirancang. Pada akhir kegiatan, ia biasanya akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hanya kepada lembaga donor, sehingga

seberapa besar proporsi dana yang mengalir ke masyarakat sasaran akan sulit terkontrol. Akibatnya, LSM seperti ini cepat berdiri dan cepat bubar jika tidak mempunyai dukungan dana secara berkelanjutan. Di pihak lain, banyak LSM besar yang mendorong demokratisasi atau *peace building*, tetapi kacau-balau karena konflik internal. Ini paradoks yang luar biasa (Sutoro Eko, 2006: 1).

*Kedua*, problem relasi LSM dengan elemen lain, terutama pemerintah dan masyarakat. Pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan NGO terlihat sangat beragam. Ada pola kemitraan tetapi ada pula pola konfrontasi. Semua ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat dengan LSM yang bersendikan kemitraan dan kepercayaan belum terbangun, sehingga menjadi kendala serius bagi perubahan.

*Ketiga*, problem pendekatan pemberdayaan dan strategi gerakan sosial LSM. Masalah ini terkait dengan bagaimana LSM membaca peta masalah dan merumuskan strategi aksi pemecahan masalah. Titik fokus yang beragam memang merupakan kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau strategi sangat beragam dan tidak relevan pasti tidak akan membuahkan perubahan yang berarti. Ada LSM yang mengambil jalan karitatif, ada yang memilih strategi "mengambil alih peran pemerintah", ada pula yang menggelar pendidikan dan pengorganisasian masyarakat. Ada yang mengklaim memperjuangkan masyarakat, tetapi malah mengambil jalan elitis tanpa bersentuhan dengan masyarakat. Ada yang mengembangkan kemitraan, tetapi ada yang mengambil jalan konfrontatif.

*Keempat*, LSM menjadi bagian dari polarisasi *civil society* di Indonesia. Setiap elemen *civil society* (ormas, LSM, mahasiswa, pers, organisasi rakyat, dan lain-lain) sangat sibuk dengan dunianya masing-masing sehingga tidak ada jaringan (koalisi) bersama yang mampu mendorong perubahan. Aksi kolektif untuk melawan praktik-praktik yang merusak (korupsi, oligarki, kekerasan, eksploitasi, premanisme, dan lain-lain) masih sangat lemah (Sutoro Eko, 2006: 2).

Oleh karena itu, LSM Indonesia dalam menatap ke depan perlu menegaskan kembali komitmennya terhadap suatu agenda perubahan melalui perjuangan ideologis dan politis. Agenda perjuangan ideologis terutama dilakukan dengan mengembangkan mekanisme internal dan eksternal gerakan LSM dalam rangka menciptakan ruang yang luas dan bebas bagi proses pendidikan. Melalui gerakan ke dalam, LSM dituntut membangun proses jangka panjang dengan menggunakan lembaga-lembaga yang ada guna mencapai perubahan ideologis di kalangan aktivis dan mentransformasikan hubungannya dengan rakyat. Sementara itu, gerakan keluar dilakukan melalui perjuangan dalam gelanggang masyarakat sipil seperti sekolah-sekolah dan berbagai jenis lembaga pendidikan yang lain. Pada pokoknya, agenda perjuangan politis

dilakukan oleh aktivis LSM dengan mengupayakan jawaban jangka pendek untuk merespon kebutuhan praktis (*war of maneuver*) dan jangka panjang untuk menang-gapi kebutuhan strategis (*war of position*). *War of maneuver* senantiasa dilakukan dalam kerangka *war of position* yakni perjuangan ideologi dan kultural.

Dengan demikian, isu strategis dan isu praktis tidak dapat dipisahkan. Agenda perjuangan ini dapat dilaksanakan oleh para aktivis LSM Indonesia melalui tiga langkah. *Pertama*, melakukan reposisi ideologi aktivis LSM, dengan cara menempatkan dirinya sebagai intelektual organik, yaitu: tipe intelektual yang berakar di tengah-tengah masyarakat yang tengah mengalami eksploitasi. *Kedua*, menciptakan pendidikan alternatif bagi aktivis seperti riset partisipatif, pendidikan rakyat dan pengalaman mengorganisir petani, sarekat buruh dan jenis gerakan sosial lainnya. *Ketiga*, para aktivis perlu memperbaiki kemampuan organisasional dan manajemen gerakan LSM agar lebih mempunyai perhatian terhadap masalah eksploitasi kelas, penindasan politik, hegemoni kultural, hubungan kekuasaan, dominasi jender dan tipe diskrimansi yang lain (Fakih, Mansour, 1996: 174).

### C. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Dalam sejarahnya, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LSM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis. (Priyono, Onny, S, 1996). **Pertama**, *the welfare approach*, yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini banyak dilakukan kelompok-kelompok keagamaan berupa penyediaan makanan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Pendekatan kemanusiaan walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya tetapi dapat memberdayakan LSM sendiri.

**Kedua**, *the development approach*, yang dilakukan terutama dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan pengembangan masyarakat dijalankan dengan berbagai program pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.

**Ketiga**, *the empowerment approach*, yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Clark berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*) yang berkonsentrasi pada pelayanan atau pengadaan proyek pembangunan ke arah sisi permintaan (*demand side*) dengan memberdayakan rakyat, agar rakyat mempunyai posisi tawar menawar agar dapat menjadi pelaku aktif dalam proses pembangunan. Pendekatan

pemberdayaan rakyat bertujuan memperkuat posisi tawar - masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela pihak yang lemah. Dalam aktifitas pengembangan masyarakat, para aktivis sosial perlu memperhatikan pendekatan kedua sebagai jembatan menuju pendekatan ketiga.. Masyarakat lapis bawah dan pinggiran perlu diberdayakan karena mereka masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, partisipasi, ketrampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup.

Program pengembangan masyarakat pada sisi lain biasanya juga memperhatikan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yakni proses pembangunan, di mana generasi-generasi mendatang memperoleh modal (*capital*) sebanyak atau bahkan lebih dengan apa yang diterima oleh generasi sekarang (Grootaert, Christiaan, 1998: 1). Bagi para pekerja masyarakat, *capital* (modal) yang perlu dijaga kesinambungannya dan dikembangkan meliputi: *natural capital*, *physical capital* (modal fisik), *human capital* (modal manusia) dan *social capital* (modal sosial).

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam prakteknya antara lain diimplementasikan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan atau dikenal dengan teknologi tepat guna yang sebanyak mungkin dalam aktivitas pembangunan. Menyadari hal ini maka salah satu bidang pekerjaan yang menjadi andalan LSM adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan atau tepat guna (*appropriate technology*). Dimensi pekerjaan ini tentu saja memiliki bobot penguasaan kecakapan teknis maupun vokasional amat banyak serta perlu didasari pemahaman secara benar terhadap filosofi teknologi tepat guna.

Oleh karena itu, LSM dianggap telah memberikan respon terhadap problem lingkungan hidup dalam pandangan ekologis jika dalam program-programnya berisi kegiatan adopsi, sosialisasi dan pembudayaan pemakaian teknologi tepat guna ataupun teknologi alternatif (*alternative technologies*) (Ife, Jim, 1997).

Jika kita baca dari perspektif para pencinta lingkungan (*ecological perspective*), teknologi yang dikembangkan harus memiliki hubungan secara positif dengan lingkungan. Hasil teknologi tidak bisa dikatakan “secara inheren baik atau buruk”, namun semuanya tergantung pada bagaimana menggunakannya. Teknologi tidak hanya hadiah dari pembangunan, namun ia sebagai alat untuk pengembangan manusia yang memungkinkannya dapat meningkatkan pendapatan, hidup lebih lama, lebih sehat, menikmati standar hidup lebih baik, berpartisipasi lebih banyak dalam masyarakatnya dan mengarahkan hidupnya lebih kreatif (Brown, Mark, Malloch, 2001, hal. 27). Teknologi yang dikembangkan manusia haruslah diorientasikan untuk menjaga kesehatan, pertanian dan energi dan untuk mengatasi permasalahan ekologis seperti degradasi kualitas tanah serta munculnya hama dan penyakit. Pengembangan teknologi yang ramah

lingkungan membutuhkan dukungan berbagai pihak secara lintas sektor baik dari masyarakat, LSM, pemerintah dan lembaga donor. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan secara selektif. Ia tidak dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain secara sembarangan (Brown, Mark, Malloch, 2001)

Dalam konteks yang luas, keterlibatan LSM dalam pekerjaan kemasyarakatan secara umum berpijak dari tiga visi di atas yaitu menjawab tuntutan kemanusiaan, menjalankan upaya pengembangan masyarakat menuju tercipta kondisi masyarakat yang bisa menolong diri sendiri (*selfhelp*) serta mengarahkan tahapan pengembangan masyarakat menuju tahapan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi concern utama dari setiap aktivis kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat ini setidaknya dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Sukses atau gagalnya program pengembangan masyarakat yang ditawarkan oleh LSM kepada kelompok sasaran dipengaruhi oleh bagaimana strategi yang dipilih oleh para aktivis dalam menangani program-program pengembangan masyarakat bersama kelompok baik pada saat penentuan kebutuhan kelompok sasaran, perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menyapih kelompok sasaran. Di pihak lain, sukses atau gagalnya program pengembangan masyarakat juga dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen yang dimiliki oleh para aktivis LSM dalam memberikan pertanggung-jawaban kepada *patrons*, *clients* dan *themselves* (Maslyukivska, P, Olega, 1999). Tanggung-jawab kepada *patrons* direalisasikan dengan menaati kesepakatan, kontrak kerja, komitmen keuangan yang telah dibuat dengan lembaga-lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri. Tanggung jawab kepada *clients* direalisasikan dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bekerja sama dengannya. Tanggung jawab kepada *themselves* (mereka sendiri) direalisasikan dengan soliditas para staf, anggota, mitra, konstituen dan LSM secara keseluruhan untuk mewujudkan misi dan visi organisasinya.

Secara umum pekerja sosial seperti aktivis LSM dituntut untuk memilih strategi dalam merancang dan melaksanakan program secara tepat. Strategi pengembangan masyarakat dalam perspektif manajemen meliputi

langkah-langkah: mengidentifikasi, menamai dan mengartikulasikan masalah dan isu; menganalisis masalah; mengidentifikasi tujuan; mempersiapkan rencana tindakan secara terperinci; melaksanakan rencana tindakan dan mengevaluasi keseluruhan proses (Kenny, Susan, 1994: 125).

Para aktifis sosial secara umum menjalani peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Upaya mereka sebagai agen perubahan adalah mendampingi dan mengarahkan keinginan warga dalam proses pengambilan inovasi atau gagasan baru. Sebagai agen perubahan, ia berusaha mengamankan proses pengambilan gagasan-gagasan baru dan membuat jalannya proses penyebaran inovasi berjalan secara bertahap atau pekan-pekan dan mencegah pengambilan gagasan baru yang didalamnya membawa pengaruh yang berlawanan dengan keinginan warga. (Rogers, Everett, M, 1995: 335).

Para agen perubahan dalam proses pengambilan gagasan baru bisa menjalankan tujuh peranan. Pertama, ia menumbuhkan sebuah kebutuhan di kalangan warga terhadap sebuah perubahan. Agen perubahan awalnya sering membantu warga dalam membangkitkan kesadaran terhadap perlunya mengubah sikap dan perilaku lama. .

Kedua, membangun sebuah hubungan pertukaran informasi. Untuk mendukung perubahan maka para agen perlu mengembangkan hubungan secara harmonis dengan warga. Agen perubahan dalam upaya mempererat hubungan dengan warga perlu didasari oleh sikap jujur, saling percaya, mampu dan ikut merasakan dengan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan warga.

Ketiga, mendiagnosis masyarakat. Agen perubahan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi warga dalam rangka mengklarifikasi kenapa alternatif yang sudah ada tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Keempat, menumbuhkan sebuah keinginan kuat di kalangan warga untuk berubah. Setelah agen perubahan membeberkan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan warga mewujudkan tujuannya maka ia kemudian berupaya memotivasi warga agar berminat melakukan perubahan.

Kelima, menerjemahkan keinginan untuk berubah menjadi tindakan nyata. Agen perubahan berupaya mempengaruhi perilaku warga agar mereka mau mengambil gagasan baru yang datang dari luar. Jaringan kekerabatan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menunjang sukses atau gagalnya proses persuasi (membujuk) warga dalam tahapan pengambilan gagasan baru. Dalam hal ini, agen perubahan secara tidak langsung bisa bekerja sama dengan pemuka masyarakat dalam mengaktifkan jaringan-jaringan kekerabatan yang ada.

Keenam, menstabilkan proses pengambilan gagasan-gagasan baru dan mencegah keterputusan proses inovasi. Agen perubahan dapat

menumbuhkan perangai baru di kalangan warga dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang memperkuat warga yang telah mengadopsi ide baru dan selanjutnya membakukannya menjadi perangai baru. Langkah ini diupayakan ketika warga tengah berada pada tahap implementasi atau konfirmasi pengambilan gagasan atau inovasi.

Ketujuh, mewujudkan hubungan yang final. Tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan adalah menumbuhkan kemampuan di kalangan warga untuk memperbaiki kondisi mereka secara mandiri. Agen perubahan dalam konteks ini perlu memposisikan dirinya sebagai aktor yang mengembangkan kemampuan warga dalam rangka menumbuhkan perubahan secara mandiri (Rogers, Everett, M, 1995: 337).

Salah satu kegiatan LSM adalah menjalankan proses inovasi atau pembaharuan berbagai bidang di masyarakat. Apalagi jika karakteristik utama LSM itu jelas-jelas melakukan pengalihan teknologi tepat guna seperti LSM Dian Desa. Proses inovasi atau pembaharuan yang dilakukan tentunya tidak secara tiba-tiba namun perlu dirancang dalam sebuah proses berkelanjutan yang sering disebut *innovation-decision process* (proses pembaharuan atau pengambilan inovasi). Proses pengambilan inovasi merupakan proses yang di dalamnya individu atau unit pengambil keputusan menjalani beberapa tahapan, di mulai dari tahap pemahaman tentang sebuah inovasi untuk membentuk sikap terhadap inovasi; menuju sebuah tahapan mengambil keputusan untuk mengambil atau menolak; menerapkan dan menggunakan pemikiran baru dan memperkuat keputusan ini (Rogers, Everett, M, 1995: 20).

Proses pengambilan inovasi jika digambarkan terdiri atas lima tahapan. Pertama, tahap pengetahuan yang berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan memperoleh penjelasan tentang keadaan inovasi dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana peranan inovasi tersebut. Kedua, tahap persuasi yang berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan merangsang tumbuhnya sikap senang atau tidak senang terhadap inovasi. Ketiga, tahap penentuan inovasi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan melakukan kegiatan yang sudah mengarahkan seseorang atau unit pengambil keputusan dalam memilih untuk mengadopsi inovasi ataupun sebaliknya menolak inovasi. Keempat, tahap pelaksanaan yang terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan menerapkan inovasi. Kelima, tahap konfirmasi yang berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah dibuat atau kembali pada keputusan terdahulu untuk mengambil atau menolak inovasi jika dijumpai adanya pesan-pesan kontradiktif dalam inovasi ((Rogers, Everett, M, 1995: 162).

Pengembangan masyarakat sebagai sebuah ide yang diperkenalkan dan ditawarkan kepada kelompok sasaran akan selalu menghasilkan dua alternatif yaitu bahwa ide baru ini diterima (diadopsi) atau diterima. Agar

menghasilkan pembaharuan sebagaimana diharapkan, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah, maka alternatif yang diharapkan adalah ide baru tersebut diterima atau diadopsi. Ada lima faktor yang perlu dipertimbangkan agar ide baru yang diperkenalkan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk diterima masyarakat. Kelima faktor itu adalah keuntungan relatif, komtabilitas, kompleksitas, triabilitas dan observabilitas (Rogers, Everett, M, 1995: 15-16).

Keuntungan relatif adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana ide baru tersebut lebih menguntungkan dibandingkan cara yang sudah digunakan sebelumnya. Keuntungan relatif bisa berupa kebanggaan, kenyamanan dan kepuasan. Komtabilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana ide baru itu konsisten dan relevan dengan nilai-nilai masyarakat, pengalaman sebelumnya, kebutuhan serta permasalahan masyarakat. Kompleksitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana ide baru itu mempunyai faktor kesulitan untuk dimengerti, dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Triabilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana ide baru itu dalam batas-batas tertentu memberikan kesempatan atau peluang untuk dicoba. Observabilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana kegunaan dan manfaat cara kerja ide baru itu diamati masyarakat. Dari kelima faktor ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi level keuntungan relatif, komtabilitas, triabilitas dan observabilitas maka ia cenderung untuk mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi kompleksitasnya maka ia akan semakin sulit untuk diterima.

Dalam kenyataannya, gagasan pengembangan masyarakat yang di dalamnya sarat dengan pemberian masukan atau input kepada kelompok sasaran berupa teknologi baru, ketrampilan baru, cara kerja baru, pelatihan kemampuan managerial serta penguatan modal sosial telah banyak mendorong proses pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai input telah mengakibatkan masyarakat lapis bawah bergerak untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka memperbaiki kualitas hidup mereka.

LSM dalam memasuki kelompok sasaran biasanya menggunakan pendekatan *betting on the strong* (bertaruh pada yang kuat) yang didasarkan pada filsafat *oil stain* atau teori rembesan minyak. Strategi *betting on the strong* mengasumsikan bahwa usaha pembaharuan atau perubahan akan lebih mudah dan efektif bila di mulai dengan menggerakkan elit yang memiliki daya responsif (tanggap terhadap pembaharuan). Contohnya, usaha modernisasi di sektor pertanian akan berjalan cepat jika bertumpu pada petani-petani kaya yang progresif atau berpandangan maju dan responsif atau tanggap atau sering diistilahkan dengan *the vigorous energetic, advanced elements in rural society* (kuat, penuh semangat dan punya unsur-unsur

pelopor (Billah, MM, 1988: 17). Dalam kehidupan pedesaan, kyai maupun tokoh-tokoh lokal dianggap memiliki sifat-sifat seperti itu.

Adapun filsafat *oil stain* percaya bahwa rangsangan pembangunan yang ditujukan terutama pada *small elite* akan menyebar luas dengan sendirinya ke segenap kelas sosial dan lapisan masyarakat dan secara perlahan inovasi akan diterima oleh seluruh penduduk serta pada gilirannya dalam jangka panjang akan menguntungkan penduduk.

Para pekerja sosial seperti aktivis LSM dalam merancang dan merealisasikan program-programnya dapat menerapkan lima strategi. *Pertama*, menggunakan struktur atau institusi dan mekanisme formal maupun informal yang sudah tersedia. *Kedua*, mendasarkan kegiatan pada keswadayaan masyarakat baik secara material maupun non-material (pikiran, tenaga). *Ketiga*, bersikap mawas diri misalnya pada saat pengenalan masalah dan potensi masyarakat. *Keempat*, *pendekatan revolving fund*, artinya menjadikan dana pembiayaan program bukan sebagai hibah bagi warga tetapi sebagai dana kredit yang sewaktu-waktu harus dikembalikan dan diputar di kalangan warga. Mekanisme ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan munculnya sikap ketergantungan dari warga dan untuk menjaga keberlanjutan program. *Kelima*, program bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia (PSDM). Hal ini berarti semua kegiatan yang berorientasi PSDM seperti pendidikan, pelatihan, pertemuan kelompok maupun pembinaan yang cukup dominan. Sementara itu, kegiatan fisik tetap diperlukan dan dikembangkan sejauh dapat lebih memperkuat upaya PSDM (Soetrisno, Kh dan Tugimin, Frans, 1997: 251-252).

Kebanyakan aktivis LSM ketika menangani program pengembangan masyarakat menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan proyek langsung (*direct project*) dan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*). Pendekatan proyek langsung dilakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat di lingkungan sekeliling LSM berupa pengadaan air bersih, usaha simpan pinjam, usaha kesehatan masyarakat seperti pos kesehatan dan sejenisnya. Pendekatan proyek langsung ini dapat dilakukan dengan dua pola. Pertama, pola kegiatan sepotong roti (*piece meal*), dalam arti memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga dan difokuskan pada satu sektor kegiatan yang ditangani (bersifat sektoral). Kedua, pendekatan program dengan rancangan terpadu berjangka panjang (*long term integrated planning*) yang bersifat holistik.

Adapun, pendekatan kelembagaan kebanyakan dilakukan dengan cara membentuk organisasi lokal yang mewadai warga yang menjadi sasaran program. Organisasi ini diharapkan akan menjadi motor penggerak kegiatan pengembangan masyarakat di lokasi setempat. Jadi, upaya yang paling utama dalam pendekatan kelembagaan adalah membentuk organisasi lokal seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) (Billah, MM, 1988: 14).

#### **D. Spektrum Keterlibatan LSM dalam Pengembangan Masyarakat**

Kebanyakan aktivis sosial melaksanakan peran-peran pendampingan ketika program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sedang berjalan. Peran aktivis sosial sebagai pendamping sangat krusial dalam menghidupkan dan mengembangkan kegiatan kelompok. Pendamping selama menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok berperan sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamisator (penggerak) (Moeljarto, Vidhyandika, 1996: 142). Dengan adanya pendamping ini, kelompok diharapkan bisa terbantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri atau tidak tergantung pada pihak luar. Untuk itu, pendamping diharapkan menjadi tenaga ahli yang membantu kelompok dalam masa-masa tertentu dan diharapkan kelompok nantinya dapat berfungsi secara mandiri.

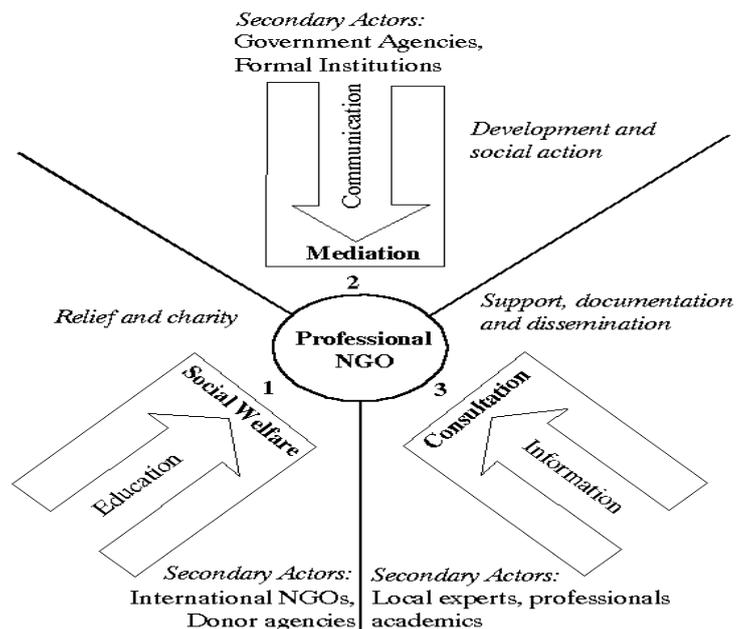
Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh beberapa aktor. Pertama, pendamping lokal seperti LSM, tokoh masyarakat, kader setempat, ormas, PT dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap masalah kemiskinan. Kedua, pendamping teknis dari tenaga penyuluh Departemen teknis seperti Departemen pertanian (penyuluh pertanian lapangan/PPL), Depdiknas (SP3) dan BKKBN (PLKB). Ketiga, pendamping khusus disediakan bagi masyarakat miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus.

Peran pendampingan dilakukan para aktivis sosial dengan meyakinkan, memancing dan merangsang tumbuhnya kekuatan dari dalam masyarakat untuk mengatasi problem hidup yang sedang mereka hadapi secara mandiri. Proses ini memerlukan sebuah komunikasi intensif antara pendamping dan anggota kelompok dengan didasari rasa saling percaya (*mutually of trust*). Komunikasi intensif antara lain dibangun dengan cara menghadiri pertemuan anggota, pertemuan pengurus KSM secara rutin dan kalau perlu dengan memberikan pelatihan khusus. Pada prinsipnya, para pendamping masyarakat harus menempatkan diri sebagai pihak yang selalu siap sedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh para warga. Pendamping harus siap bekerja purna waktu dengan menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program pelatihan dan membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Secara umum organisasi yang menangani kerja pengembangan masyarakat seperti LSM menjalankan *community education for development (CED)* yaitu sebuah kegiatan yang diupayakan untuk mendorong anggota masyarakat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, mencari pemecahan atas problemnya, memobilisasi sumber-sumber yang penting dan melaksanakan sebuah rencana tindakan. Pendekatan pendidikan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai agen dan obyek sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang

mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik (Boone, Edgar, J, et.all, 1980: 229).

Secara umum, LSM dalam kegiatan pengembangan masyarakat menjalankan tiga peranan. Pertama, peran kesejahteraan sosial (*the social welfare role*), di mana kesejahteraan dan amal/derma sebagai kunci dari tindakan. LSM dalam peran ini dapat dipandang sebagai penggagas program dan proyek secara internal. Aktor pendukungnya adalah lembaga donor internasional dan lembaga sosial yang lain. Kedua, peran sebagai mediator (*the mediatory role*), di mana berkomunikasi sebagai salah satu ketrampilan penting dalam pengembangan dan aksi sosial. LSM dalam peran ini dipandang sebagai partisipan atau pihak yang mengambil bagian dalam program dan proyek eksternal. Sementara, aktor pendukungnya adalah para agen pemerintah dan lembaga-lembaga formal lain. Ketiga, peran sebagai penasehat (*the consultative role*), di mana dorongan, dokumentasi dan penyebar-luasan informasi dan ketrampilan sangat diperlukan. Peranan LSM di sini adalah sebagai penggagas program kerja sama (kolaborasi) bersama warga. Aktor pendukungnya adalah para ahli/profesional/ sumber-sumber perseorangan (Srinivas, Hari, 1999: 2).



**Gambar. Tiga Peran LSM**

Secara lebih rinci, peran pekerja sosial seperti aktivis LSM meliputi empat hal. *Pertama, facilitative roles* yakni peran-peran yang dijalankan pekerja masyarakat dengan cara memberi stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi *social animation* (memberi semangat atau mengaktifkan), *mediation and negotiation* (menengahi dan menghubungkan), *support* (mendorong), *building consensus* (membangun kesepakatan), *group facilitation* (memfasilitasi atau memperlancar kelompok), *utilisation of skills*

*and resources* (penggunaan ketrampilan dan sumber-sumber) dan *organising* (mengatur) (Ife, Jim, 1997).

*Kedua, educational roles* yakni peran-peran kependidikan. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaharui ketrampilan, cara berpikir, cara berinteraksi, cara mengatasi masalah dan sebagainya. Peran ini meliputi *consciousness raising* (membangun kesadaran), *informing* (memberi penjelasan), *confronting* (mempertentangkan sebagai taktik dinamisasi kelompok) dan *training* (pelatihan).

*Ketiga, representational roles* (peran-peran perwakilan). Peran ini dijalankan oleh pekerja kemasyarakatan dalam interaksinya dengan lembaga luar, atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, melakukan advokasi atau pembelaan masyarakat, membuat mitra atau *network*, *sharing* pengalaman dan pengetahuan serta menjadi juru bicara masyarakat.

*Keempat, technical roles* yakni peran pekerja masyarakat dalam menerapkan ketrampilan teknis untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaan kemasyarakatan seperti pengumpulan dan analisis data, pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan sarana fisik, manajemen dan pengendalian uang sangat membutuhkan ketrampilan teknis.

Dalam tinjauan lain, peranan yang dijalankan oleh pekerja sosial seperti aktivis LSM terdiri atas enam jenis. *Pertama, development and operation of infrastructure* yakni pembangunan dan pengoperasian infrastruktur seperti pengembangan lahan, pembuatan rumah, penyediaan sarana fisik seperti toilet atau sumur umum dan pengolahan limbah.

*Kedua, supporting innovation, demonstration and pilot projects* yakni mendorong usaha inovatif, memberi contoh dalam menangani proyek pengembangan masyarakat secara efektif dibandingkan birokrasi pemerintah.

*Ketiga, facilitating communication* yakni menggunakan metode komunikasi ke atas dari masyarakat pada pemerintah dan metode komunikasi ke bawah dari pemerintah kemasyarakatan untuk memfasilitasi proyek-proyeknya agar dapat dirasakan masyarakat dan diapresiasi oleh pemerintah.

*Keempat, technical assistance and training* yakni memberi bantuan teknis dan pelatihan dalam program pengembangan masyarakat.

*Kelima, research, monitoring and evaluation* yakni melakukan penelitian, pengawasan dan penilaian terhadap hasil-hasil kerja pengembangan masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat sendiri.

*Keenam, advocacy for and with the poor* yakni menjadi juru bicara dan pembela kaum miskin dan berusaha mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Maslyukivska, Olena, P, 1999).

Dewasa ini keberadaan LSM diakui lebih memiliki keanekaragaman, kredibilitas dan kreativitas dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. LSM, setidak-tidaknya dianggap ikut serta dalam melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat. Upaya-upaya pengembangan masyarakat antara lain meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal swadaya, pengembangan usaha produktif dan penyediaan informasi tepat guna (Ismawan, 1995: 240-241).

Langkah pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan berbagai agenda kegiatan pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan ketrampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha. Adapun langkah pengembangan kelembagaan kelompok dilakukan dengan bimbingan anggota masyarakat dalam menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan peraturan rumah tangga. Langkah pemupukan modal swadaya dilakukan dengan sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok dengan lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut. Sementara itu, langkah pengembangan usaha produktif dilakukan dengan kegiatan peningkatan usaha produksi dan jasa, pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar. Sedangkan langkah penyediaan informasi tepat guna yang sesuai tingkat pengembangan kelompok meliputi pengenalan program teknologi tepat guna, penerbitan buku dan majalah yang mendorong inspirasi ke arah inovasi lebih lanjut.

Di negara-negara sedang berkembang, keberadaan LSM seringkali berhubungan dengan pengembangan kualitas hidup penduduk lokal dan berbagai kegiatan layanan sosial yang sekiranya sulit dilaksanakan pemerintah. Dengan semakin banyaknya dukungan publik dari negara maju menjadikan basis finansial LSM lebih kuat (Clark, John, 1995).

Meskipun demikian, sejauh pengamatan penulis, eksistensi LSM Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah bias yang hampir sama. Pertama, kebanyakan aktifis LSM berasal dari latar belakang ekonomi dan kelas sosial yang sama yakni mereka bukan berasal dari kelas yang dieksploitasi seperti petani tak bertanah atau buruh, melainkan dari kelompok elit atau setidak-tidaknya dari kelas menengah.

Kedua, hampir semua aktivis memiliki latar belakang pendidikan yang sama, kebanyakan adalah sarjana dari berbagai universitas di Indonesia. Karena kurikulum dan fakultas di hampir seluruh universitas dan lembaga pendidikan tinggi selama mereka kuliah dibakukan dan dikontrol pemerintah maka hasilnya memiliki kesamaan. Ketiga, berkenaan sumber pendapatan utamanya berasal dari lembaga dana yang sama yakni lembaga keuangan Barat. Apalagi lembaga-lembaga keuangan yang memiliki sifat pembangunan seperti USAID, CIDA dan Bank Dunia berada dalam posisi yang sangat berpengaruh dalam menentukan pembentukan masa depan

LSM Indonesia. Bias ini jika diwaspadai secara seksama oleh para aktifis LSM akan berpotensi menjauhkan aktivitas LSM dari rakyat dan menghalangi rakyat untuk menjadi subyek dalam sejarahnya sendiri.

Sebagian LSM ada yang menitik-beratkan kegiatannya pada pengalihan (*transfer*) teknologi tepat guna kepada masyarakat. Munculnya gerakan ini secara historis dilatar-belakangi oleh in-efektifitas proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang dalam mengurangi angka kemiskinan. Diyakini, teknologi tepat guna sebagai aktualisasi dari ide pembangunan alternatif memiliki peluang yang lebih baik dalam mengurangi kemiskinan. Keyakinan didasarkan pada pertimbangan bahwa penerapan teknologi tepat guna senantiasa mempertimbangkan faktor keikut-sertaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, keselamatan lingkungan dan perencanaan program yang berbasis budaya lokal.

Dalam prakteknya, teknologi tepat guna mengkombinasikan teknologi, partisipasi dan pengurangan kemiskinan. Teknologi tepat guna sangat memperhatikan kepentingan holistik (kepentingan menyeluruh antara manusia dengan keselamatan alam dan lingkungan). Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi masyarakat dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan mengurangi atau tidak merusak alam dan lingkungan ( Failace, Constantino, 1996: 2).

Terminologi tepat guna dapat dipahami sebagai teknologi pribumi (*indigenious*) dan teknologi menengah (desainnya di antara teknologi berkembang dan teknologi-tinggi). Efisiensi teknologi tepat guna diukur dari tingkat kesederhanaan pengembangan dan kemanfaatan teknologi ini dalam kehidupan masyarakat. Ia bukan tipe teknologi yang membahayakan kehidupan manusia, rumit dan mahal. Sebuah teknologi dianggap tepat guna jika ia menjadi alat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan hidup yang dihadapi umat manusia.

Secara lebih rinci, sebuah teknologi dapat dikatakan sebagai teknologi tepat guna jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Menggunakan biaya modal rendah
- Sedapat-dapatnya menggunakan bahan setempat
- Menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan ketrampilan kerja setempat
- Cukup kecil skalanya sehingga terjangkau oleh kelompok masyarakat kurang mampu
- Dapat dipahami, dikendalikan dan dipelihara oleh orang-orang desa atau tanpa memerlukan pendidikan tingkat tinggi
- Dapat diproduksi oleh bengkel logam kecil atau bahkan di desa itu sendiri

- Didasarkan pada keyakinan bahwa orang-orang dapat dan mau bekerja sama demi pembangunan masyarakatnya karena mereka sadar bahwa di mana-mana lazimnya keputusan diambil secara kolektif dan tidak secara perorangan
- Mengonsumsi sumber-sumber tenaga yang terpabaru (*renewable*) secara bebas seperti tenaga angin, matahari, air, biogas (CH<sub>4</sub>), hewan dan pedal atau ontelan
- Dapat dijelaskan dan dimengerti oleh orang-orang yang menggunakannya sehingga mereka mampu memberi saran-saran inovatif lebih lanjut terhadap pengembangan teknologi itu.
- Bersifat lentur sehingga dapat terus dipakai atau disesuaikan jika keadaan berubah
- Desainnya bersifat praktis dan sederhana sehingga dapat dilakukan secara gratis atau dengan biaya murah dan selanjutnya tak diperlukan pembayaran apa-apa.
- Tak bersangkut paut dengan hak paten, royalti, biaya konsultan, pajak atau tarif impor dan biaya pengiriman
- Memungkinkan menjadi alat yang mendayagunakan tenaga kerja dan ketrampilan manusia dan bukan mesin-mesin yang menggantikan tenaga kerja dan menyingkirkan ketrampilan manusia
- Membantu mengurangi ketergantungan sosial, politik dan ekonomi antar individu, antar daerah dan antar bangsa
- Selaras dengan tradisi budaya daerah yang bersangkutan (Wilardjo, Liek, Agustus 2000: 80).

Bisa dikatakan, penyebarluasan teknologi tepat guna di berbagai negara berkembang kebanyakan dilakukan oleh LSM. Salah satu LSM di Indonesia yang semenjak berdirinya sudah mengkhususkan program-programnya pada kegiatan penerapan teknologi tepat guna adalah LSM Dian Desa. LSM ini oleh kalangan domestik maupun luar negeri kemudian dikenal sebagai salah satu LSM yang menjadikan penerapan teknologi tepat guna sebagai batu loncatan dan instrumen dalam mengembangkan kehidupan masyarakat kurang mampu.

### **BAB III.**

## **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF**

Menurut pengamatan penulis, skema program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kebanyakan digagas oleh para pekerja sosial bisa dikategorikan sebagai model pembangunan alternatif. Gagasan pembangunan alternatif muncul dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kegagalan model pembangunan pro pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi problem kemiskinan, memperhatikan kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat. (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 4).

Wacana pembangunanisme (*developmentalisme*) digulirkan pertama kali oleh Harry S. Truman ketika dia menyampaikan pada pidato pengukuhan sebagai presiden Amerika pada tanggal 20 Januari 1949. Truman melalui pidatonya itu mulai mengintrodusir istilah *underdeveloped* bagi negara-negara miskin bekas kolonialisme atau Negara Dunia Ketiga (Anik Farida, 2000: 2). Pembangunan perlu dilakukan sebagai strategi bagi negara Dunia Ketiga untuk bisa bertahan hidup dan meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional. Sementara itu, pembangunan bagi negara-negara maju adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan (Budiman 1995: ix).

Mulai saat itu pembangunan, baik sebagai bangunan wacana, tata berpikir, atau proyek yang sangat praktis terus dikampanyekan. Sebagaimana dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, hal mendasar yang mengiringi pembangunan (karena konteksnya lebih bersifat material) adalah sistem kapitalisme. Sementara modernisasi adalah strategi (maupun cara pandang) yang mengiringi proses penyebaran kapitalisme sebagai suatu sistem sosial (Harris, 1982:15). Mengacu pengertian tersebut, pembangunan yang bertumpu pada strategi modernisasi lebih mengutamakan usaha peningkatan produksi dan modernisasi infrastruktur. Tokoh utama yang banyak mempengaruhi kebijakan pembangunan dengan model modernisasi dan kapitalisme adalah WW. Rostow. Menurut Rostow (1965: 25), semakin besar kemampuan produktif masyarakat, semakin besar kekayaan yang dapat dihimpun dan lama-kelamaan kekayaan itu akan "menetes ke bawah" (*trickle down effect*).

Pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* seperti ini tidak mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Akibatnya, hasil dari program-program pembangunan yang dilancarkan tidak berhubungan langsung dengan pemenuhi kebutuhan mendasar masyarakat khususnya kalangan miskin, meskipun telah menghabiskan biaya yang besar.

Secara empiris, model pembangunan konvensional/pro-pertumbuhan dianggap telah menghasilkan banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia serta memunculkan berbagai bentuk ketimpangan baik ketimpangan

antara pemerintah pusat dengan daerah, ketimpangan dalam memperoleh sumber pendapatan maupun ketimpangan dalam memperoleh keadilan. (Lambang Trijono, 2001: 228).

Wacana dan praksis pembangunan yang konvensional telah mengabaikan keberadaan pengetahuan lokal (*local knowlegede*) dan tradisi-tradisi lokal dalam proses pembangunan. Hal ini membawa implikasi berupa hilangnya sistem perekonomian rakyat yang berorientasi subsistens, sistem jaringan pengaman sosial (*social safety net*) tradisional seperti lumbung desa, sistem irigasi pertanian tradisional dan sebagainya. Implikasi lebih lanjut dari kondisi ini adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan dislokasi sosial dalam skala masif pada masyarakat lapis bawah.

Konsep *development* (pembangunan) dalam beberapa tinjauan telah berkembang menjadi istilah kotor karena sering ditemuinya kerugian-kerugian akibat kegiatan pembangunan ekonomi di negara-negara selatan. Diakui, pembangunan di satu sisi telah memberikan keuntungan bagi negara (*income*) dan para elite di negara-negara selatan. Namun di sisi lain, pembangunan telah menciptakan penderitaan, kerugian, kelaparan bagi orang-orang miskin, penghancuran suatu masyarakat (komunitas), kesenjangan pendidikan dan pelayanan.

Dampak negatif yang dihasilkan oleh model pembangunan Barat ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri bagi para aktivis LSM. Mereka menilai bahwa model pembangunan yang dikembangkan dalam tradisi Barat di atas bukanlah satu-satunya cara pembangunan dan bukanlah cara yang selalu memberi dampak baik untuk pembangunan di negara-negara selatan (Ife, Jim, 1997: 95). Pembangunan yang didesain dengan pola dari atas (pemerintah) justru mengingkari konsep ideal pembangunan itu sendiri. Hal ini karena pembangunan dalam tataran idelita seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat melalui *community power*-nya, sehingga tidak terjadi pengklaiman bahwa pemerintah sebagai penanggung-jawab tunggal pembangunan. *Community power* adalah roh dari masyarakat itu sendiri, sehingga seharusnya ia akan selalu muncul dalam setiap satuan masyarakat yang ada.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa model pembangunan pro pertumbuhan hanya menjadikan orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Karena itu, kritik dan kecaman terhadap developmentalisme terus mengalir dari penganut paradigma kebutuhan pokok, teori ketergantungan sampai pendekatan dan gerakan baru yang mengarah pada pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan diawali dari munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), yang konon diakui sebagai pembangunan alternatif (Sutoro Eko, 1994: 1).

#### **A. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat**

Model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma *bottom up* dan lokalitas. Munculnya model pembangunan

alternatif didasari oleh sebuah motivasi untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya dan menentang struktur penindasan melalui pembuatan regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.

Salah satu isu yang mendapatkan perhatian dalam pembangunan alternatif adalah kebijakan-kebijakan pembangunan untuk masyarakat pribumi yang dahulu selalu disisihkan. Kebijakan-kebijakan pembangunan harus memungkinkan mereka untuk bisa hidup dalam keharmonisan dengan lingkungan yang sejak dahulu telah menyatu bersama mereka dan menjamin keharmonisan dengan nilai-nilai ekologi. Pada konteks ini, mereka bukan menjadi objek “penindasan” dalam pembangunan, namun keberadaan mereka dalam pembangunan menjadi subyek pembangunan yang tetap menjaga nilai-nilai yang telah berakar pada mereka, struktur sosial dan tradisi kebudayaan mereka. Singkatnya, pembangunan alternatif yang tidak dalam posisi untuk “menekan” kelompok-kelompok asli/pribumi, tapi dalam posisi untuk mengangkat nilai-nilai yang telah ada dan mampu melibatkan kelompok-kelompok pribumi secara aktif dalam pembangunan.

Model pembangunan alternatif ini bercirikan partisipatoris dan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia dalam setiap langkah-langkahnya. Pembangunan berperspektif partisipatoris artinya menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sementara pembangunan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan identitas (*identity*), sebaliknya membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*poverty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*) dan alienasi (*alienation*) (Johan Galtung, 1980).

Pada tahap awal, pembangunan alternatif mengedepankan beberapa keyakinan. *Pertama*, negara merupakan bagian dari problem pembangunan sehingga pembangunan alternatif harus mengeluarkan dan bahkan melawan negara. *Kedua*, rakyat tidak bisa berbuat salah dan bahwa masyarakat adalah perkumpulan yang mandiri. *Ketiga*, tindakan masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk merealisasikan pembangunan alternatif tanpa campur tangan negara (John Friedmann, 1992: 7).

Akan tetapi salah satu penggagas pembangunan alternatif seperti John Friedmann menolak keras tiga pandangan di atas. Bagi Friedmann seperti halnya Korten, pembangunan alternatif sangat berpusat pada rakyat (masyarakat) dan lingkungannya ketimbang pada produksi dan keuntungan, yang ditujukan untuk mendorong kemajuan dan HAM. Dari segi

pendekatan, model pembangunan ala Friedmann menekankan pada pemberdayaan rumah tangga beserta anggotanya dalam tiga segi (sosial, politik dan psikologi). Friedman sama sekali tidak menafikan peran negara. Negara harus kuat bukan dalam arti bersikap otoriter dan arogan, melainkan birokrasi yang responsif, transparan, tanggung-jawab dan didukung berjalannya demokrasi inklusif, di mana kekuasaan negara untuk mengelola problem lebih baik bersifat lokal (Sutoro Eko, 1994: 7).

Model pembangunan alternatif yang digagas para aktivis LSM meskipun masing-masing programnya memiliki titik tekan yang berbeda, namun jika dicermati pada dasarnya ia memiliki sejumlah persamaan. Mengutip pendapat Bjorn Hettne, persamaan itu antara lain bisa dilihat pada orientasinya yang sama-sama untuk memenuhi kebutuhan pokok (*need oriented*) kelompok sasaran, bersifat dari dalam lokal atau tidak asing bagi masyarakat setempat (*endogenous*), bernuansa menghargai lingkungan (*ecologically sound*) dan berdasar pada transformasi struktural (*based on structural transformation*). (Bjorn Hettne, 1983: 4)

Dari ciri-ciri ini, bisa digarisbawahi esensi pembangunan alternatif adalah memberi peran kepada individu bukan sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Konsekuensinya, model pembangunan alternatif memberikan nilai yang sangat tinggi pada insiatif lokal, cenderung memandirikan masyarakat lokal, memihak kepentingan rakyat, melestarikan lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok dan memberdayakan masyarakat dari tekanan struktural ketimpangan sosial-ekonomi. Sesungguhnya, prinsip fundamental bagi pengembangan masyarakat seharusnya dipahami sebagai kebijakan dari bawah, bukan dari atas. Dengan cara seperti ini, masyarakat bisa terbantu dalam merumuskan kebutuhannya sendiri melalui kegiatan pembangunan yang diikuti. Adapun para ahli hanyalah berperan sebagai “pembantu” dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pendekatan pembangunan yang berbasis lokalitas seperti ini diasumsikan menjadi salah satu bentuk keberpihakan secara nyata terhadap kepentingan lokal dan menempatkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) berserta para tenaga ketrampilan dari daerah setempat (*local genius*) di garis depan berbagai kegiatan. Melalui upaya mengakomodasi potensi maupun modal sosial masyarakat sebagai sumber daya pembangunan pada gilirannya diyakini akan menghilangkan marginalisasi, ketimpangan, ketidak-adilan dan memperkuat sektor masyarakat.

Pendekatan pembangunan alternatif dianggap dianggap sebagai respon terhadap kegagalan pola pembangunan konvensional dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan alternatif, kemiskinan dianggap sebagai sebuah kondisi ketidakberdayaan relatif (*relative disempowerment*) sehubungan dengan kesempatan setiap rumah tangga sebagai basis kekuatan sosial (*social power*). Lebih lanjut diasumsikan,

terjadinya keterbelakangan suatu komunitas bukan disebabkan oleh kebodohan dan ketidakmampuan masyarakat akan tetapi akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak asasi kemanusiaan. (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 4). Oleh karena itu, kunci untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan sosial dan politik dari orang-orang miskin sendiri. Di samping itu, perlu dilakukan upaya-upaya mengubah struktur yang mengakibatkan masyarakat tidak berdaya dan membangun model pembangunan yang berpijak pada prinsip demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin kepentingan rakyat banyak (*appropriate economic growth*), kesetaraan jender (*gender equality*) dan keadilan antar generasi (*intergeneration equity*).

Dalam konteks ini, munculnya model pembangunan alternatif yang esensinya sangat mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan humanisme dianggap sebagai koreksi terhadap ketidakpekaan konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan terutama pada dimensi kemanusiaannya. (Vidhyandika Moeljarto dan Sonia Prabowo, 1997:46). Konsep pembangunan alternatif ini berupaya mempromosikan kekuatan manusia, menekankan peran aktif masyarakat, bukan mengabadikan ketergantungan. Konsep ini agaknya turut mewarnai kegiatan pengembangan masyarakat yang digagas LSM bersama kelompok sasaran.

Dalam perspektif pembangunan, aksi-aksi pembangunan alternatif seperti program-program pengembangan masyarakat yang digulirkan oleh LSM memiliki relevansi dengan gagasan pembangunan sosial. Bisa digarisbawahi kegiatan pengembangan masyarakat memiliki kesamaan visi dan orientasi dengan pembangunan sosial, yaitu sama-sama menekankan peran aktif masyarakat. Secara lebih lengkap, Midgley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai:

“...to result in the fulfillment of people's aspirations for personal achievement and happiness, to promote a proper adjustment between individuals and their communities, to foster freedom and security and to engender a sense of belonging and social propose”, yang artinya: “pembangunan sosial adalah kegiatan pembangunan yang menghasilkan pemenuhan keinginan warga untuk kebahagiaan dan prestasi perseorangan, mengembangkan penyesuaian diri secara tepat antara individu dengan masyarakatnya, menciptakan kebebasan dan keamanan serta melahirkan perasaan memiliki dan rencana sosial”. (James Midgley, 1986).

Merujuk interpretasi Hollnsteiner (1986:59), aksi pengembangan masyarakat yang digagas LSM dapat dikategorikan sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat. Indikasi pemberdayaan bisa dilihat dari mayoritas program LSM yang umumnya diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri

melalui kegiatan nyata. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hollnsteiner bahwa pembangunan sosial atau pengembangan masyarakat adalah:

*“...a planned effort to enhance the capacity and potentiality of people to mobilize their enthusiasm to participate in the decision making process on matters having an impact on them and on the implementation of the decision. As such, social development seeks to promote the empowerment of people, instead of perpetuating the dependency-creating relationships between the bureaucrats and the people”.*

Berdasarkan definisi ini bisa dijelaskan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potentialitas warga dalam rangka memobilisasi semangat berpartisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kehidupannya dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Definisi secara tegas menekankan, kegiatan pengembangan masyarakat harus diupayakan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, bukan mempertahankan hubungan ketegantungan antara birokrasi dengan masyarakat. Jika dikaitkan dengan eksistensi program LSM maka hampir semua program LSM ini mengarah pada usaha mengubah atau memperbaiki kondisi sosial masyarakat dari belum mandiri menjadi lebih mandiri dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Program-program pengembangan masyarakat dalam tradisi LSM sejauh ini dianggap telah menterjemahkan pola pembangunan alternatif. Hal ini antara lain dapat disimak dari orientasi program-programnya dalam membangun kondisi yang memungkinkan para warga ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan terhadap sejumlah permasalahan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka serta dapat mengimplementasikan keputusan-keputusan itu melalui kerja sosial yang nyata. Proses mobilisasi masyarakat dilakukan LSM tidak hanya dengan cara mendorong tercapainya perbaikan kondisi sosial, namun yang lebih penting dari itu semua adalah upayanya dalam memperkuat ikatan kemanusiaan dan komunitas. Dengan berpartisipasi pada program pengembangan masyarakat lambat laun akan membantu tumbuhnya *sense of community* (perasaan kemasyarakatan) di kalangan warga -yang pada gilirannya akan memberi makna terhadap eksistensi mereka sebagai manusia- dan mendorong integrasi sosial. Bisa digarisbawahi, gagasan pembangunan alternatif cenderung menekankan *people centered development* (pembangunan berpusat pada masyarakat) serta *community based resource management* (managemen berbasis masyarakat). Dalam kerangka ini, proses perencanaan dan pelaksanaan program-program berada di tangan masyarakat.

Ada beberapa asumsi dasar yang dikembangkan dalam pembangunan alternatif, yang berbeda dengan pembangunan konvensional.

	<b>Pembangunan Konvensional</b>	<b>Pembangunan Alternatif</b>
<b>Asumsi tentang Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berangkat dari pandangan bahwa masyarakat terbelakang, pengetahuannya rendah, tradisional dan bodoh</li> <li>- Untuk memajukan mereka diperlukan pengetahuan dari luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, akan tetapi kemampuan yang tersedia perlu dioptimalkan agar mereka berkembang sesuai dengan pengetahuan mereka</li> <li>- Pengetahuan lokal (<i>local knowledge</i>) dan teknologi tepat guna sebagai basis pengembangan mereka</li> </ul>
<b>Konsekuensi Perencanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan bersifat <i>top down</i> dan sentralistis</li> <li>- Direncanakan oleh tenaga ahli atau akademisi tanpa mempertimbangkan apa yang dimiliki masyarakat</li> <li>- Lebih mengutamakan perencanaan untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan masyarakat diukur menurut kemajuan ekonomi semata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih menekankan pada aspek lokalitas</li> <li>- Perencanaan dilakukan secara otonomi, berdasarkan potensi lokalitas dengan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan</li> <li>- Pemikiran otonomi lebih ditekankan dalam perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing.</li> </ul>
<b>Konsekuensi Perlakuan terhadap masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan birokrat ataupun tenaga ahli dari luar sebagai pihak yang dilayani masyarakat karena mereka dianggap telah berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan birokrat ataupun tenaga ahli dari luar sebagai pengatur kepentingan masyarakat dan sebagai aktor yang melakukan fungsi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat</li> </ul>

<b>Implikasi bagi Kehidupan Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan masyarakat sangat bergantung kepada pemerintah</li> <li>- Memendam konflik semu yang setiap saat bisa menjadi ledakan konflik interest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak awal mengkomodir daya kritis masyarakat</li> <li>- Masyarakat mampu menolak jika terjadi tekanan atau eksploitasi dari luar yang tidak menguntungkan mereka.</li> </ul>
--	---	--

## B. Memperhatikan Dimensi Keberlanjutan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif pembangunan alternatif sangat memperhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya alam. Prinsip keberlanjutan ini dalam konteks pembangunan diterjemahkan melalui pengolahan sumber alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), proses daur ulang (*recycle*) terhadap limbah serta mengolah dan mengelola limbah sehingga membawa dampak negatif bagi ekosistem jika

Konsep *sustainability* berawal pada sikap keprihatinan kaum pencinta lingkungan (*environmentalis*) terhadap konsekuensi jangka panjang dari praktek tekanan yang eksekif terhadap daya dukung alami (*natural support system*). Para aktivis LSM menunjukkan kepedulian yang cukup kuat terhadap perlunya mempertahankan prinsip-prinsip kesinambungan dalam setiap proses pembangunan. Concern ini dibuktikan dengan visi dan misi kebanyakan LSM dalam mempromosikan dan memasyarakatkan program-program pengembangan masyarakat berbasis pada penyelamatan lingkungan hidup serta mengkampanyekan pemanfaatan produk-produk teknologi yang ramah lingkungan (lebih dikenal dengan teknologi tepat guna).

Prinsip berkelanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia, yang dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sejak awal 1980-an bertepatan dengan dikeluarkannya dokumen Strategi Konservasi Bumi (*World Conservation Strategy*) oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*), telah muncul berbagai definisi tentang pembangunan berkelanjutan oleh para pakar maupun organisasi keilmuan. Namun, definisi pembangunan berkelanjutan yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional adalah definisi yang disusun oleh *Brundtland Commission*, yang memahami pembangunan berkelanjutan sebagai praktek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (United Nations World Commission on the Environment and Development 1987, sebagai dikutip oleh Hart, 1995: 4.) Keberlanjutan dalam konteks ini sangat menekankan keterpaduan atau integrasi antara tiga

sistem pokok: lingkungan (environmental, ekonomi, sosial) serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah kualitas kehidupan.

Kerangka berpikir di atas memberi pemahaman bahwa keberlanjutan mencakup keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan ekonomi (*Economic sustainability*) dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Keberlanjutan lingkungan meliputi empat dimensi: keberlanjutan lingkungan alam, sumber daya alam baik yang bisa terbaharui maupun tidak bisa terbaharui), daya dukung alam dan pelayanan alam. Keseimbangan yang wajar antara penggunaan sumber daya alam dengan pembaharuan ekosistem merupakan aspek kunci pada keberlanjutan alam. Pada prinsipnya, kesadaran dalam mempertahankan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dengan pengembalian sumber daya alam menjamin terwujudnya lingkungan yang berkeberlanjutan. (Stanley M Guy dan David L Rogres, 1999:2)

Lain halnya dengan kebanyakan definisi pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh mayoritas kelompok ultra konservasionis (*deep ecologists*). Mereka tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi mengajukannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) yang dimiliki oleh lingkungan alam. Jika praktek pembangunan memperhatikan hal ini maka generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sama, atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.

Sementara itu,, John Martinussen menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah proses di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam terminologi ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat diinterpretasikan sebagai suatu pembangunan yang tidak pernah punah (*development the last, pearce and barbier*). Secara lebih spesifik, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu pembangunan yang memaksimalkan kualitas kehidupan generasi sekarang yang tidak menyebabkan penurunan kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Kualitas hidup mencakup aspek kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan lingkungan alam yang bersih dan sehat serta tingkat kebutuhan sosial yang diinginkan (Suparjan dan Hempri Suyatno: 2003: 171).

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memerlukan tiga aspek: keseimbangan ekologis, keadilan sosial dan aspek ekonomi. Aspek keseimbangan ekologis berkaitan dengan upaya pengurangan dan pencegahan polusi, pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam. Aspek keadilan sosial berkaitan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan lain-lain. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya

memerangi kemiskinan, mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang dan lain-lain.

Secara konseptual, definisi pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brudtland Commission sangat menarik, namun dalam penerapannya ia menghadapi pertanyaan atau kendala terutama menyangkut pengertian tentang kebutuhan (*needs*) yang jelas berbeda antara satu individu atau kelompok masyarakat (bangsa) dengan yang lainnya. Pengertian kebutuhan bagi kelompok masyarakat miskin, misalnya cukup hanya berupa makanan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan seadanya. Sedangkan, bagi kelas menengah ke atas, kebutuhan hidup mereka tidak hanya mencakup lima kebutuhan dasar tersebut tetapi perlu mobil, rumah mewah, dua televisi, telepon (termasuk *hand phone*), VCR dan VCD, dan kebutuhan sekunder atau tersier lainnya. Dengan demikian sangat wajar, jika kaum menengah ke atas yang jumlahnya kurang dari 20% dari total penduduk dunia mengkonsumsi lebih dari 80% pendapatan dunia pada tahun 1995. (Serageldin, 1996). Pada konteks ini, pembangunan berkelanjutan adalah mempertahankan keseimbangan yang sulit antara kebutuhan manusia dalam mengembangkan pola hidup dengan perasaan kesejahteraan di satu sisi dan menjaga sumber daya alam dan eko sistem yang menjadi gantungan hidup dan masa depan kita.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan perlu dipahami secara moderat yang menekankan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam berjalan bersamaan dengan perlindungan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Di sini ada upaya saling memperkuat satu sama lain. Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah hubungan stabil antara aktivitas manusia dan sumber alam, yang tidak mengurangi prospek generasi masa depan dalam menikmati kualitas kehidupan sama baiknya dengan kita sendiri.

Banyak penelitian yang memberikan keyakinan bahwa demokrasi partisipatori atau demokrasi yang tidak didominasi oleh vested interest, adalah pra syarat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Mintzer, 1992). Berangkat dari keyakinan ini, pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan atau pembangunan yang kegiatan eksploitasi sumber-sumber daya alam, tujuan investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan di dalamnya disusun secara konsisten dengan masa depan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kebutuhan generasi masa depan mendapatkan perhatian secara seimbang dengan kebutuhan generasi sekarang. Jadi, kondisi keberlanjutan sosial yang mampu mendukung secara penuh terwujudnya kualitas kehidupan secara adil, sejahtera, sehat dan produktif bagi semua anggota masyarakat pada masa kini dan masa mendatang merupakan kepentingan utama (*core business*) dari pembangunan berkelanjutan.

Untuk memasyarakatkan penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan, Bank Dunia telah melakukan beberapa prakarsa. Sebagai

langkah pertama, Bank Dunia telah menjabarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam bentuk kerangka segitiga Pembangunan Berkelanjutan (*Environmentally Sustainable development Triangle*) (Serageldin and Steer, 1994).

Menurut kerangka tersebut, suatu kegiatan pembangunan dianggap berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomis, ekologis, dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomis jika suatu kegiatan pembangunan dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (*capital maintenance*) dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis jika kegiatan pembangunan tersebut dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Sementara itu, keberlanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. (Rokhmin Dahuri, 2003: 1)

Segitiga pembangunan berkelanjutan di atas bisa dijelaskan bahwa tujuan ekonomis dapat disederhanakan menjadi pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, tujuan ekologis menjadi pengelolaan sumberdaya alam, dan tujuan sosial menjadi pengentasan kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks hubungan antara tujuan ekonomis dan sosial dapat direalisasikan jika didukung oleh empat kebijakan ekonomi: (1) intervensi pemerintah secara terarah (*targeted interventions*), (2) pemerataan pendapatan, (3) penciptaan kesempatan kerja, dan (4) pemberian subsidi bagi kegiatan pembangunan yang memerlukannya.

Sementara itu, pada konteks hubungan antara tujuan ekonomis dan ekologis diperlukan beberapa kebijakan: (1) pengkajian lingkungan (*environmental assessment*) termasuk AMDAL bagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif penting terhadap lingkungan, (2) valuasi ekonomi sumberdaya dan ekosistem alam (*economic valuation of natural resources*), (3) internalisasi eksternalitas, (4) *time and discount rates*, (4) ketidakpastian dan resiko, dan (5) perhitungan pendapatan nasional (*national income account*). Selama ini, kriteria kelayakan suatu proyek pembangunan berdasarkan pada kriteria investasi, seperti *B/C ratio*, *Net Present Value*, dan *Internal Rate of Return* melalui perhitungan *Benefit-Cost Analysis* (BCA).

Adapun kebijakan yang perlu ditempuh dalam konteks hubungan antara tujuan sosial dan ekologis adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam memelihara keselamatan lingkungan dan memberikan layanan konsultasi yang difokuskan dalam menanamkan kesadaran lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan swasta dalam setiap proyek program pembangunan perlu ditingkatkan. Konsultasi antara masyarakat

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan harus ditingkatkan. Dengan cara ini, rakyat akan merasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan dan konsekuensinya mereka akan berupaya semaksimal mungkin dalam menyukseskan kegiatan pembangunan.

### **C. Menekankan Partisipatori**

Gagasan pembangunan alternatif yang dilaksanakan melalui program pengembangan masyarakat sering kali menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA). Konsep PRA ini dipelajari para pekerja sosial dari pakar pengembangan masyarakat seperti Robert Chambers dengan modifikasi sesuai kondisi situasi masyarakat yang dihadapi. Dengan demikian, para aktivis tidak mengimplementasikan secara *taken for granted* sesuai aslinya namun ada penyederhanaan prosesnya sesuai kebutuhan.

Jika dicermati, pemilihan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) cukup relevan dengan kondisi sosial kelompok sasaran yang sangat membutuhkan dorongan dari pihak luar untuk membangkitkan semangat berswakaranya. Sesuai dengan maksudnya, PRA adalah pendekatan dan metode untuk mengembangkan kemampuan warga lokal dalam membagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kehidupan dan kondisi, merencanakan dan berbuat. (Robert Chambers, 1994: 1 ) PRA dianggap sebagai metode dan pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan warga pedesaan, dari dengan dan oleh warga desa. Jadi PRA menekankan analisis, perencanaan dan tindakan.

Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional, Dua diantara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik ini antara lain adalah penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains, dan penelitian-penelitian etnometodologis.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan antara lain: (1) Hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris-analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi obyek (masyarakat lokal); (2) Banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*); (3) Memungkinkan terjadinya "pencurian" terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti (orang luar) sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap orang dalam (masyarakat lokal).. Sementara pendekatan etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis-hermeneutik, dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetap dianggap memiliki kelemahan. Kelemahan itu terletak pada kecenderungannya dalam menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memaafkan realita, tanpa bisa mempengaruhi atau membentuk realita. Sebagai alternatif dari semua itu, kini dimunculkan gagasan yang sering disebut pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah terwujudnya emansipasi/pelibatan

masyarakat. Salah satu metode yang menggunakan pendekatan yang partisipatif ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

PRA bukanlah pendekatan yang *ahistoris* (terlepas dari pendekatan-pendekatan sebelumnya). Pendekatan ini banyak menggunakan metode-metode yang sudah ada, yakni menggunakan cara-cara yang digunakan dalam teori-teori antropologi, komunikasi, sosiologi dan sejenisnya. Menurut pendekatan ini, tujuan harus ditentukan oleh subyek untuk meniadakan penindasan ideologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses *sharing of knowledge* antara peneliti dengan masyarakat di lokasi penelitian. Proses analisa dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisa tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disusun rencana tindakan bersama (oleh karena itu pendekatan ini disebut juga *riset aksi*). Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial..

PRA memang telah terbukti sangat efektif dalam melibatkan masyarakat dalam semua tahapan program; dari identifikasi masalah hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Selain alasan "ideologis" karena kesesuaian dengan azas-azas "musyawarah untuk mufakat", "gotong-royong", "pemberdayaan masyarakat", kekecewaan terhadap pendekatan "top-down" yang banyak digunakan selama ini dalam banyak hal juga ikut mempengaruhi efektifitas PRA.

Sesuai dengan kerangka PRA, program-program LSM berpijak pada konsep *Putting the Last First*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Chambers mengandung gagasan untuk mendahulukan (*first*) pihak yang paling marjinal (*last*) dalam penyusunan suatu keputusan dan program aksi.

Konsep ini sering dikritik sebagai suatu *utopia* yang mengabaikan kompleksitas hubungan dan pola kepentingan di masyarakat. Oleh karena itu LSM juga tidak mengabaikan konsep *Putting the First Last*. Menurut Robert Chambers, orang atau kelompok yang punya *power* cenderung memiliki ketidakmampuan untuk belajar karena mereka sulit berbeda pendapat dan dikoreksi. Dalam pandangan Robert Chambers orang-orang yang punya *power* itu termasuk para profesional, orang yang berpendidikan formal tinggi, kelas menengah atas, laki-laki (terhadap perempuan) dan sebagainya. Orang-orang yang punya *power* ini, paling siap untuk mengembangkan aksi, dan cenderung menyalahkan kelompok lainnya sebagai kelompok yang tidak mampu berpandangan jauh.

Untuk mengembangkan sebuah proses perubahan, maka kelompok yang memiliki *power* ini perlu didorong untuk merubah dirinya sendiri. Gagasan ini dikenal dengan konsep *disempower*. Menurut Chambers, *disempower* pada dasarnya menguntungkan kedua pihak (yang berkuasa dan yang dikuasai), karena pertimbangan:

- *Efektivitas*. Kelompok ‘atas’ bisa melihat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan efektivitas pembangunan dan kemajuan;
- *Pembebasan pikiran*. Kelompok ‘atas’ seringkali merasakan tekanan yang tinggi apabila mereka bersifat sentralistik dan sangat berkuasa karena adanya ketegangan yang tinggi antara kelompok atas dan bawah; Sementara itu, model hubungan yang partisipatif bisa mengembangkan kepercayaan, keterbukaan, dan pikiran yang lebih damai;
- *Pemenuhan kebutuhan dan kesenangan*. Pada dasarnya memberdayakan pihak lain merupakan suatu kebutuhan dan kesenangan bagi kelompok ‘atas’. Apa yang dianggap sebagai pandangan radikal oleh Chambers, yaitu tentang mendorong suatu proses *disempower* secara sukarela oleh kelompok yang paling dominan dan berkuasa, bisa jadi dianggap sebagai suatu hal yang benar-benar naif oleh para pengkritik.

Para pengkritik PRA menganggap bahwa konsep *disempower* mengabaikan adanya heterogenitas di masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial, jender, etnis, agama, dan kelompok kepentingan lainnya. PRA dianggap bersifat naif karena mengabaikan realita bahwa di tingkat masyarakat juga terdapat kekuatan-kekuatan pro *status quo* yang tidak mungkin menyerahkan begitu saja sebagian dari kekuasaannya dengan membiarkan kelompok masyarakat yang biasa didominasinya, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kita seringkali kurang mampu memahami masyarakat dengan segala kompleksitasnya. Akan tetapi, komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama masyarakat dan berpihak pada kelompok-kelompok yang paling lemah, sebenarnya lebih utama ketimbang ‘kepintaran’ kita untuk bisa menganalisis segala sesuatunya tentang kehidupan masyarakat. Bahwa proses perubahan untuk menjadikan suatu tatanan masyarakat yang lebih adil dan demokratis bukan suatu *utopia* melainkan suatu pekerjaan yang lebih membutuhkan keyakinan (*faith*) daripada kecerdasan akademik.

Robert Chambers, tokoh yang mengembangkan PRA tidak menjabarkan pemikirannya tentang bagaimana menggunakan metode PRA secara aplikatif dalam pengembangan proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dia seringkali mengilustrasikan pemikirannya dengan caranya sendiri. Ibaratnya, Chambers menyerahkan sesuatu berbentuk buku sambil mengatakan: “*Nih, buku acuan metode PRA...*” Tentu saja para peserta dengan antusias menerima buku ini, karena berharap bisa memperoleh ‘kitab suci’ PRA asli karena diterima langsung dari penggagas PRA. Namun, ketika membuka buku berjudul “PRA” yang diserahkan oleh Robert Chambers ternyata hanya berisi adalah halaman-halaman buku yang kosong.

Menurut Robert Chambers, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan, metode/teknik apa yang dipergunakan dan prinsip-prinsip apa yang digariskan merupakan proses pembelajaran masing-masing. Kita

dipersilahkan mengisi buku panduan berdasarkan proses pencarian dan penemuan masing-masing. Jadi, metode PRA sendiri tidak memberitahu kita tentang suatu cara yang baku. Metode PRA menganjurkan *keberagaman* dan pengembangan metodenya itu sendiri. PRA menganjurkan proses memperbaiki metode PRA itu sendiri. Pada konteks inilah, komitmen LSM dalam menangani aksi-aksi pengembangan masyarakat dapat dinilai sebagai bagian dalam menerjemahkan cita-cita menumbuhkan semangat partisipasi dan kemandirian masyarakat sebagai menjadi substansi dari PRA.

Dalam konteks penerapan PRA, para pekerja sosial seperti aktivis LSM harus rela menempatkan dirinya sebagai pendamping masyarakat. Mereka tidak menempatkan dirinya sebagai patron atau komandan yang harus selalu didengar dan diikuti oleh warga. Sebagai pendamping masyarakat, para aktivis berupaya membangun kemandirian atau keberdayaan masyarakat. Mereka puas jika masyarakat tidak merasa kehilangan ketika dia keluar dari masyarakat dampungannya. Selama proses pendampingan, para aktivis menghindari sikap mendominasi, karena apabila hal itu dilakukan justru akan menghasilkan ketergantungan masyarakat kepada pendamping. Sebaliknya, dalam setiap tahap kegiatan di masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sejauh mungkin diputuskan dan dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga terdapat proses belajar (*learning society*) serta terbentuk rasa memiliki dan tanggungjawab.

Searah dengan peningkatan kapasitas masyarakat, secara bertahap pendampingan dikurangi. Pada akhirnya pendamping harus meninggalkan lokasi program ketika masyarakat sudah menunjukkan adanya kemandirian.

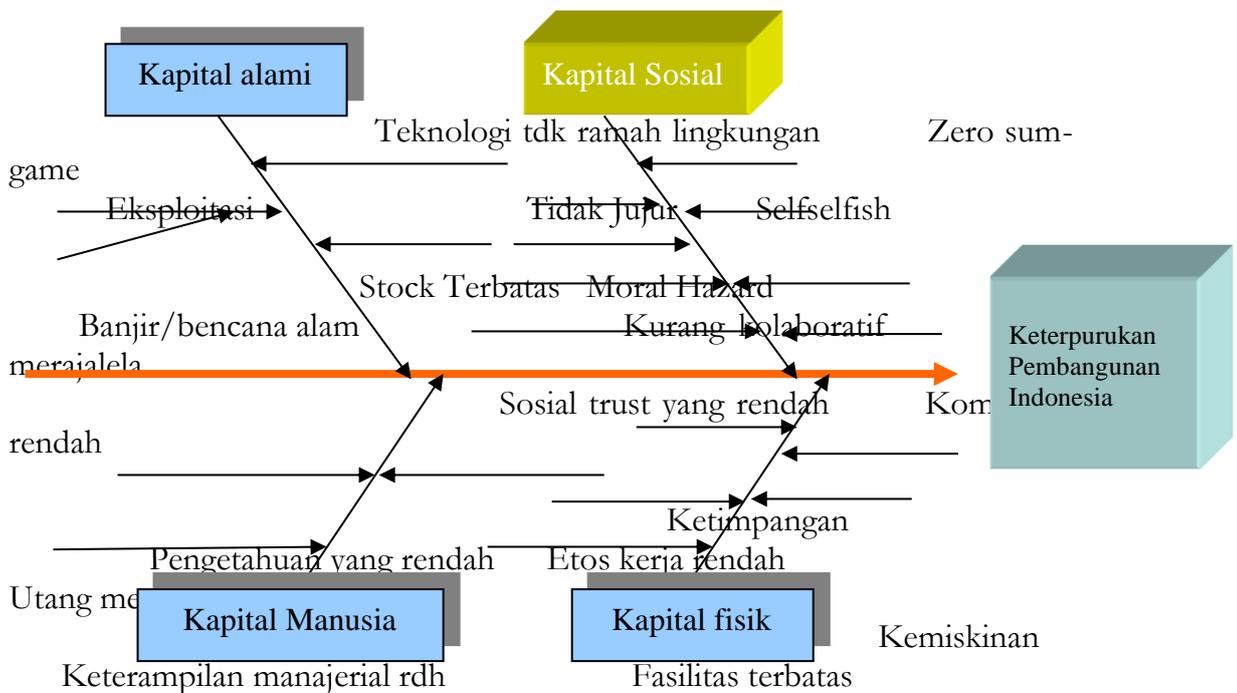
Dari sejumlah pengamatan terungkap bahwa kebanyakan aktivis LSM tidak memaksakan program-program secara sepihak, namun program-program disusun berdasarkan analisis terhadap kebutuhan riil masyarakat. Secara teoritis, proses ini sering disebut dengan *community needs assessment*. Konsep *community needs assessment* dikonotasikan sebagai proses penilaian terhadap situasi masyarakat pada saat ini, perumusan pendapat berdasarkan penilaian terhadap keadaan yang diinginkan atau disukai warga dan membuat keputusan terhadap prioritas status kebutuhan warga. (Keith A. Carter dan Lionel J Beaulieu, 1992: 1). Kebutuhan (*need*) adalah kesenjangan antara situasi yang sedang terjadi dan situasi yang seharusnya terjadi. Sebuah kebutuhan dapat dirasakan oleh perorangan, kelompok atau seluruh anggota masyarakat. Kebutuhan bisa dirasakan secara konkrit seperti kebutuhan akan air dan makanan dan kebutuhan abstrak seperti pengembangan kerukunan anggota masyarakat. Oleh karena itu perlu proses penilaian kebutuhan-kebutuhan tersebut supaya membantu kita menemukan kebutuhan riil warga dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Secara umum ada lima pendekatan yang digunakan ketika para aktivis sosial mengumpulkan informasi tentang kebutuhan warga masyarakat. (1) *the key informan approach*; (2) *the public forum approach*; (3) *the*

*nominal group process techniques*; (4) *the Delphi Technique* dan (5) *the survey approach*. Para pekerja sosial dalam mendapatkan informasi ketika proses perumusan kebutuhan warga biasanya mengkombinasikan beberapa pendekatan tersebut. Informan kunci yang dipilih berasal dari kalangan aparat pedesaan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda dan lain-lain. Para informan kunci tersebut diwawancarai, diberi angket dan dipertemukan dalam sebuah forum pertemuan. Pada tahapan ini para warga disurvei secara langsung tentang apa keinginan mereka yang sebenarnya. Melalui proses ini, data akan dapat dikumpulkan, disusun, ditafsirkan dan mendiskusikan kembali dengan para warga.

#### D. Mengembangkan Modal Sosial

Menurut sejumlah literatur, keberadaan aksi-aksi pembangunan alternatif antara lain melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan dari model pembangunan pro pertumbuhan yang ditawarkan Pemerintah. Secara empiris, model pembangunan pro pertumbuhan cenderung bercorak simplistik. Salah satu indikasinya adalah penekanannya pada upaya-upaya akumulasi modal fisik (*physical capital*) secara sentralistik dan cenderung mengabaikan aspek keterkaitannya dengan kapital-kapital yang lain seperti modal alami (*natural capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). Ketidakeimbangan antar kapital telah melahirkan multikrisis dalam pembangunan selama ini (Grace A.J Rumagit, 2002: 6), sebagaimana diilustrasikan dalam skema berikut:



### **Gambar. Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Ekonomi**

Untuk mengatasi krisis tersebut membutuhkan upaya sinergis-kolaboratif dari berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai sumber daya (modal) yang kita miliki. Di sinilah letak urgensinya upaya-upaya LSM dalam merancang dan melaksanakan program bersama warga masyarakat. Melalui upaya pengembangan kapital sosial (*social capital*) sebagaimana dilakukan LSM ternyata menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan disamping ketiga kapital lainnya.

Selama ini pendekatan model alternatif pembangunan yang dipilih LSM dilaksanakan melalui strategi reaktualisasi pembangunan sosial. Strategi ini dilakukan untuk mereduksi berbagai ketimpangan yang terjadi khususnya ketimpangan personal yang terjadi di masyarakat melalui reaktualisasi modal sosial secara sinergis dan simultan dengan modal fisik, modal manusia dan modal alamiah.

Serangkaian aksi pengembangan masyarakat yang dilakukan LSM patut diapresiasi secara positif karena menunjukkan kesadaran dari elemen *civil society* dalam berbagai peran membangun kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Jika mengikuti alur berpikir Uphoff (1999), LSM setidaknya telah membantu peningkatan modal sosial di kalangan warga dari level yang masih minim ke level yang lebih tinggi (maksimal) seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

#### **Peningkatan Kadar Modal Sosial di Kalangan Warga**

No.	Kadar Modal sosial	
	Dari Rendah (Minimized)	Menjadi Tinggi (Maximized)
1.	Self-interest	Komitmen pada kesejahteraan bersama
2.	Self-aggrandizement	Altruism
3.	Selfishness	Self-sacrifice
4.	Autonomy	Merger of individual interest
5.	Zero Sum-Game	Positive Sum-Games
6.	Interdependent yang berfokus pada kepentingan diri	Positively Interdependent

Sumber: Uphoff (Dasgupra dan Seregeldin, 1999)

Strategi reaktualisasi pembangunan sosial dipilih LSM selama ini dilakukan melalui dua model kegiatan intervensi.

#### **1. Model *Social Action***

Model *social action* menekankan pada gerakan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif (*collective action*). Aktifitas pengembangan masyarakat dilakukan LSM seharusnya dikenal sebagai gerakan moral yang lebih mengutamakan pengembangan kualitas modal sosial seperti: kepatuhan pada sistem norma (*norms*), tata nilai (*values*), sikap (*attitudes*), keyakinan (*beliefs*), budaya bernegara (*civic culture*), saling percaya (*social-trust*), solidaritas dalam bekerjasama (*solidarity cooperation*), perilaku dalam bekerjasama (*cooperative behavior*), peran dan aturan main (*roles and rules*), jaringan kerja (*networks*), hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*), tata cara dan keteladanan (*procedures and precedents*), organisasi sosial (*social organization*), keterkaitan horizontal dan vertikal (*horizontal and vertical linkages*).

Secara kuantitatif, proporsi modal sosial yang diintervensi relatif lebih banyak (kurang lebih 75 persen) dibandingkan ketiga modal yang lain (manusia, alamiah dan fisik).

Pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat merupakan upaya strategis dalam mempercepat peningkatan modal sosial masyarakat. Dalam pendekatan partisipatif ini setiap warga dari kelompok sasaran program selalu dikutsertakan dalam merencanakan, melaksanakan, menikmati dan melestarikan program. Harapannya, pelibatan warga secara aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan program bisa mewujudkan dua hasil. Di satu sisi akan menciptakan program berjalan secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat serta di sisi lain akan mentradisikan semangat berdemokrasi di kalangan mereka (Paulo Viera da Cunha and Maria Valeria Junho Pena, 1997: 1)

## 2. Model *Sustainable*

Aktifitas pengembangan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keesinambungan (*sustainable*). Keesinambungan di sini dimaksudkan sebagai upaya-upaya pengembangan kehidupan masyarakat yang menekankan pada intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal alamiah (*environment*) secara sinergis dan berimbang.

Bisa dikatakan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif umumnya diupayakan oleh para aktivis LSM bersama warga dalam rangka memupuk **modal sosial** yang sebenarnya telah dimiliki masyarakat. Modal sosial (*social capital*) perlu dipupuk mengingat ia menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Dr. Ir. Arif Daryanto, M. Ec 2004). Investasi dalam modal sosial dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan kesehatan menghasilkan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dengan investasi pada modal fisik.

Menurut sejumlah studi, peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya sehingga upaya untuk membangun

modal sosial perlu diprioritaskan. Pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) di dalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan kooperasi) sosial untuk kepentingan bersama.

Aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial sekali didalam membentuk modal sosial, oleh karena ia merupakan intinya dari modal sosial (*core of capital social*). Negara kita sudah merasakan hal itu, bagaimana lunturnya rasa kepercayaan antar komponen bangsa telah menyebabkan krisis multidimensional sampai saat ini. Terjadinya konflik horisontal yang bernuansa SARA seperti di Sampit, Ambon dan Poso, serta tingginya tingkat kriminalitas dan korupsi, sebagai bukti telah memudarnya rasa percaya antar warga. Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut, ditambah lagi dengan semakin banyaknya permasalahan sosial yang bersifat patologis menyebabkan menurunnya kadar modal sosial dalam pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi diinginkan tetap berlanjut maka hubungan, sikap dan pranata sosial dalam masyarakat harus diperbaiki. Pembangunan ekonomi harus bisa mengimbangi perubahan sosial yang terjadi, sehingga ketegangan sosial bisa dihindari. Upaya untuk memaksakan derap pembangunan yang terlalu cepat mungkin secara ekonomi akan sia-sia, karena perubahan kehidupan sosial belum terwujud, padahal perubahan tersebut diperlukan guna memungkinkan masyarakat mengadakan pembangunan yang diperlukan, sehingga masyarakat memperoleh dan menunjang pembangunan ekonomi tersebut.

Orientasi ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan pada sisi lain telah menumbuhkan mental pertumbuhan (*growth mentality*) yang membuat orang mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, dengan tidak memperdulikan orang lain yang sangat membutuhkan materi tersebut tetapi tidak bisa memperolehnya. Pola pikir (*mind-set*) orang berubah untuk mengejar dan mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, karena keyakinan bahwa materi yang banyak akan memberikan kepuasan hidup. Kondisi demikian ini akan membuat orang semakin berorientasi pada dirinya sendiri dan kurang memikirkan kesejahteraan orang lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan masalah sosial, serta kesenjangan ekonomi antara golongan atas dan golongan bawah semakin melebar.

Hanya masyarakat yang memiliki modal sosial yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi. Revitalisasi dan pengembangan modal sosial perlu dilakukan agar masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian. Modal sosial kalau dikelola dengan baik dan benar justru akan lebih mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan (pranata) sosial ekonomi mutlak diperlukan dan mendesak guna mendukung pemenuhan modal sosial dalam pembangunan. Faktor kelembagaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang hal itu memungkinkan adanya pembagian kerja yang

lebih jauh, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan kebebasan untuk memperoleh peluang ekonomi.

Dalam kehidupan nyata, kelembagaan itu dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun dipihak lain, kelembagaan bisa juga menjadi peubah endogen, dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada. Karena itu akhirnya kelembagaan yang ada dalam masyarakat sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga-lembaga yang sudah hilang, tetapi banyak juga lembaga-lembaga baru yang bermunculan sesuai dengan iklim pembangunan.

Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, atau pemerintah. Sehingga lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat ada yang bersifat orisinil (kelembagaan informal) yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun, dan ada pula yang tercipta baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri (kelembagaan formal). Kelembagaan formal maupun informal tersebut sangat berperan sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai *option* dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka **penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat** adalah merupakan suatu syarat pokok.

Munculnya konsep modal sosial dalam pembangunan ekonomi adalah merupakan respon dari para ahli terhadap semakin berkurangnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kerenggangan dalam kehidupan sosial pada akhirnya akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan sosial yang sangat mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karena itu dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif peranan modal sosial menjadi sangat penting.

Menurut Dasgupta dan Serageldin (2000), jaringan sosial (*social networks*) dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi karena di dalamnya mengandung *trust* yang merupakan elemen terpenting dalam jaringan. Pentingnya unsur *trust* ini dalam jaringan sosial juga dikemukakan oleh Fukuyama (1995), dalam hal ini ia lebih memfokuskan modal sosial tersebut terhadap *trust* sebagai faktor kunci mediasi untuk memperkecil *transaction cost* dalam *communities* dan *enterprises* yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif.

Modal sosial mengasumsikan pentingnya hubungan (*relationship*) dalam urusan-urusan ekonomi. Perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga industri baik pada tingkat regional nasional dapat berfungsi secara lebih efisien jika satu sama lain saling menghargai (*mutually respectful*) dan memiliki hubungan kepercayaan (*trusting relationship*). Dalam kerangka ini,

dapat dikatakan bahwa pemupukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena di dalamnya terdapat jaringan, norma, dan kepercayaan.

Modal sosial, seperti diakui oleh World Bank (2003), sangat relevan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini karena modal sosial merupakan resep untuk menaikkan prospek ekonomi masyarakat dan bangsa, termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan secara berkompenten dan akuntabilitas institusi politik. Di samping itu, modal sosial dapat memfasilitasi munculnya pasar bebas dalam perekonomian global. Adanya peningkatan pendidikan misalnya, telah menyebabkan masyarakat di negara maju lebih berkembang. Kemajuan pendidikan membawa mereka ke arah penalaran (*reasoning*) yang bisa menghasilkan berbagai inovasi baru dan akhirnya memunculkan kelas ekonomi baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial ekonomi. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan. Mereka juga mengembangkan hidup hemat dalam rangka memaksimalkan *output* berdasarkan *input* tertentu.

Putnam (1993), dalam Ancok (2003) telah menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi secara positif dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan berjalan baik apabila ciri-ciri berikut ini dimiliki oleh masyarakat: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat, (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa, dan (3) adanya rasa saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat. Putnam dalam penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan di wilayah utara Italia berkorelasi dengan kehadiran ciri-ciri tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah Asia Timur disebabkan oleh adanya kegiatan ekonomi yang bertumpu pada pemupukan modal sosial. Kemajuan negara Cina dalam bidang ekonomi digambarkan oleh Putnam sebagai akibat dari penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan jaringan sosial, khususnya jaringan sosial bisnis antar sesama masyarakat dalam negeri dan masyarakat cina perantauan (*overseas chinese*). Pengembangan ekonomi pedesaan (*village economy*) dalam sebuah sinergi antara satu kegiatan ekonomi di suatu desa dengan desa yang lainnya telah membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara Cina.

Semua ahli sepakat bahwa untuk membangun modal sosial harus dimulai dari pendidikan pada lembaga keluarga dan sekolah. Namun tidak kalah pentingnya lagi adalah pembangunan modal sosial melalui berbagai pelatihan kelompok untuk membangun visi dan misi bersama serta menumbuhkan saling percaya sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan LSM. Cara yang kedua ini tampaknya lebih efektif didalam membangun modal sosial. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa belajar bersama dalam

kelompok (*learning group*) dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Kilpatrick (2002), telah melakukan simulasi bagaimana membangun modal sosial pada keluarga usaha tani di Australia melalui program pelatihan secara reguler. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan secara kelompok tersebut sangat positif secara ekonomi. Mereka mau dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Setiap anggota kelompok mampu mengkombinasikan antara pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang bisa menciptakan usaha tani yang lebih baik lagi. Demikian pula Ancok (2003), yang melakukan observasi terhadap dampak *Leadership Development Program* di PT. Caltex Pacific Indonesia menunjukkan adanya penguatan modal sosial, yang ditandai dengan sesama anggota perusahaan merasa lebih akrab dan melihat orang lain sebagai bagian dari sukses perusahaan.

Di samping kegiatan pendidikan, pemupukan modal sosial bisa juga diupayakan melalui penciptaan hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, para pekerja sosial seperti aktivis LSM kebanyakan menggunakan jalur hubungan kemasyarakatan untuk menyukseskan program-programnya. Dalam konteks ini Bourdieu (1970) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (misalnya paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu, dan lain-lain).

Dalam perspektif yang hampir senada, Coleman (1988) mengatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Menurutnya, modal sosial berbeda dengan aset finansial yang dapat diperoleh dari kredit bank ataupun aset sumber daya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya. Ia hanya dapat diperoleh dan diciptakan dari relasi antar manusia. Modal sosial ini yang melahirkan kontrak sosial dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Modal sosial ini, merujuk pendapat Peterson *et al* (2002), dapat dibedakan dalam tiga tipe: (1) *direct social capital, created by repeated direct transactions between two transaction partners*, (2) *indirect social capital, created by the reputation of each transaction partner in direct transactions with others*, and (3) *identity-based social capital, created by each transaction partner's association with broader norms, values, or characteristics shared or held because of group memberships not related to the direct transaction*.

Selama ini masih banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa mekanisme pasar sebagai satu-satunya *problem solver* untuk segenap masalah dalam pembangunan ekonomi, dan mengabaikan peranan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dinilai North (1990) keliru, sebab peran kelembagaan, baik itu kelembagaan sosial, ekonomi dan politik, tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi. North mengatakan pula bahwa reformasi secara radikal dalam tatanan perekonomian suatu negara tidak akan memberikan hasil yang nyata jika dilakukan hanya dengan memperbaiki kebijakan makroekonomi. Reformasi perekonomian akan

berhasil jika didukung oleh seperangkat kelembagaan yang mampu memberi insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Lebih jauh lagi, Blakely (1994) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses pembentukan kelembagaan (*institution building*). Dengan demikian pembangunan ekonomi memerlukan kelembagaan dan sistem perencanaan yang mampu mengelola proses pembangunan sepanjang waktu. Oleh karena itu, struktur organisasi pembangunan sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat.

Pendekatan kelembagaan dalam pembangunan di Indonesia saat ini sudah mendapat perhatian yang serius dalam rangka mendorong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Telah banyak kelembagaan lokal, regional dan nasional terbentuk baik secara formal maupun informal. Terlebih lagi di daerah pedesaan telah muncul berbagai macam bentuk kelembagaan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan aktifitas kehidupan sosial masyarakat seperti karang taruna, forum RT/RW, gotong royong dan lain-lain.

Masing-masing kelembagaan masyarakat yang ada mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di pedesaan setidaknya dikelompokkan menjadi empat jenis:

1. Lembaga kekerabatan (*kindship institution*), yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan. Jenis lembaga ini antara lain meliputi: lembaga adat, lembaga perkawinan, kelompok kerukunan keluarga dan sebagainya.
2. Kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seperti produksi, permodalan dan pemasaran. Jenis lembaga ini antara lain: kelompok tani, kelompok nelayan, KUD, lumbung padi dan lain-lain.
3. Lembaga politik (*political institution*) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan distribusi kekuasaan dan wewenang dalam mengatur urusan-urusan masyarakat. Jenis lembaga ini antara lain: pemerintahan desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa)
4. Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga pendidikan (sekolah), lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas), lembaga keamanan desa (Siskamling), lembaga rohaniah atau keagamaan, lembaga kepemudaan dan sebagainya.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini dirangkul oleh para aktivis LSM sebagai patner atau mitra dalam menyukseskan proses perencanaan dan pelaksanaan program. Meskipun demikian LSM tetap berinisiatif membentuk sebuah organisasi lokal yang khusus berfungsi dalam menangani berbagai sektor kegiatan.

Bisa dijelaskan, LSM umumnya melakukan sejumlah upaya dalam rangka mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan program-

pogramnya di tengah-tengah kelompok sasaran. Upaya-upaya ini antara lain meliputi:

**(a). Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat**

Para aktivis LSM umumnya menggunakan jalur organisasi dalam merancang dan melaksanakan program-programnya. Dalam proses ini, mereka berusaha mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang sudah ada serta mendirikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di lokasi tempat program dilaksanakan.

Upaya ini dirasakan cukup strategis mengingat kelembagaan masyarakat ini adalah merupakan kolaborasi dari interaksi sosial pada suatu komunitas untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu harus dibuat suatu perekat yang dapat menyatukan antara warga, pemerintahan lokal dan aktivis LSM yang dapat dilakukan melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan sedemikian rupa sehingga mampu memobilisasi semua potensi baik yang berasal dari dalam maupun luar tanpa ada satupun yang merasa dirugikan. Delegasi dari semua pihak harus terwakili dalam struktur kelembagaan, baik itu dilihat secara hirarki maupun departementasi struktur yang dibuat sesederhana mungkin.

**(b). Peningkatan Program Pendidikan dan Pelatihan secara Berkelompok**

Kebanyakan program pendidikan formal sangat bersifat individual dan kurang menekankan pentingnya belajar secara berkelompok.. Sebagai akibatnya, peran serta masyarakat dalam membangun modal sosial tidak berjalan efektif. Padahal modal sosial itu seharusnya muncul dari hasil kerjasama antar individu. Oleh karena itu pembentukan modal sosial hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang melalui mekanisme kerjasama dalam sebuah kelompok. Pola-pola pelatihan seperti *outbound management training* (pelatihan di alam terbuka) telah menunjukkan bahwa kerjasama kelompok ataupun antar kelompok semakin meningkat pada berbagai organisasi sebagai upaya menghidupkan modal sosial.

**(c). Mengoptimalkan dan Mengefektifkan Aktifitas Kelembagaan**

Beberapa saranan dasar sangat diperlukan untuk merealisasikan misi, peran ataupun tugas yang diemban oleh sebuah lembaga sosial seperti LSM. Sarana fisik maupun non fisik ini akan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial yang telah dirancang para aktivis sosial bersama kelompok sasaran. Pembangunan sarana-sarana ini bukan diartikan secara sempit, dalam arti: hanya menekankan selesainya pembangunan sesuai target-target kuantitatif, tetapi yang lebih penting perlu menekankan usaha menumbuhkan hasrat masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara segala fasilitas yang dibangun. Penataan organisasi melalui pembentukan KSM dan pembangunan kantor akan

menjadi sia-sia bila masyarakat tidak mau memanfaatkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran para warga sendiri dalam menghidupkan roda kegiatan KSM dan keberfungsian Kantor KSM melalui pertemuan, musyawarah, rapat warga dan lain-lain. Tanpa disertai munculnya kesadaran untuk berkumpul dan menggunakan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah tentu akan mematikan aktifitas kelembagaan sosial tersebut.

**(d). Memberdayakan dan Memfasilitasi Kelembagaan Masyarakat Informal**

Fenomena modernisasi hendaknya tidak mematikan kehidupan lembaga-lembaga sosial informal yang sudah lama telah terbentuk secara turun temurun. LSM mempunyai komitmen dalam menjaga dan mengembangkan potensi lembaga seperti ini. Oleh karena itu, ia membantu lembaga-lembaga informal yang sudah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (kelompok sasaran) agar tetap berfungsi efektif dalam mengawal perkembangan wilayah ini dan secara tidak langsung menambah akumulasi modal sosial dalam pembangunan. Terlebih lagi bila aktifitas kelembagaan informal itu dapat diberdayakan dan difasilitasi maka jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan dalam interaksi sosial akan semakin tumbuh, yang pada akhirnya bisa meningkatkan modal sosial dalam pembangunan.

Berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dirancang dan dilaksanakan oleh para aktivis LSM dengan satu visi yaitu: untuk menumbuhkan semangat keswadayaan pada individu-individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi partisipan program. Kondisi keswadayaan di sini dimaksudkan sebagai sebuah kondisi di mana anggota masyarakatnya mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar dan mampu memilih berbagai alternatif yang tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Berswadaya secara individual bagi orang kecil (miskin) akan sulit dilaksanakan tetapi secara bersama dalam kelompok cenderung lebih berprospek. (Bambang Ismawan, 2003: 14) Oleh karena itu, prinsip-prinsip swadaya dalam rangka membina orang kecil perlu dilaksanakan melalui pembentukan wadah kelompok-kelompok swadaya, meskipun di dalam masyarakat sudah ada kelompok-kelompok swadaya yang tumbuh dan berkembang secara tradisional. Kelompok-kelompok swadaya tradisional ini umumnya menggunakan cara pengorganisasian sangat sederhana, peraturannya disusun dalam norma-norma yang tak tertulis dan belum mengarah pada pemupukan modal swadaya. Keterbatasan ini menyebabkan kelompok-kelompok tradisional tidak berkemampuan dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang laten. Pada hal, untuk mengatasi masalah kemiskinan yang laten diperlukan unsur-unsur modern, memperkuat komponen yang ada pada kelompok swadaya.

Pada konteks inilah, kehadiran LSM perlu membantu mereka kelompok-kelompok tradisional ini agar memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya dan melaksanakan program-program yang berorientasi secara langsung dalam mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya. Berdasarkan pengamatan, ada empat program yang biasanya dilakukan oleh LSM untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu :

- (1) Program Pengembangan sumber daya manusia, yang dilakukan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) yang diikuti oleh para anggota KSM maupun pengurus KSM. Kegiatan ini mencakup: diklat pengegelolaan kelembagaan kelompok, diklat teknik penanganan program fisik maupun diklat ketrampilan pemeliharaan program .
- (2) Program pengembangan kelembagaan kelompok, yang dilaksanakan dengan membantu para fungsionaris KSM dalam menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
- (3) Program pemupukan modal swadaya, yang dilakukan dengan membangun sistem tabungan dan kredit anggota KSM serta menghubungkan KSM dengan lembaga-lembaga keuangan lokal untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
- (4) Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya. Informasi ini dapat berupa exposure program, penerbitan buku-buku maupun majalah-majalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diyakini akan mendorong terciptanya proses perubahan dalam mekanisme kepemimpinan di lembaga-lembaga informal menuju ke tingkatan yang lebih baik. Program dinilai berhasil jika diindikasikan dengan mulai mulai tumbuhnya jiwa transformatif atau keinginan berubah secara kuat di kalangan pemimpin informal dalam masyarakat setempat. Pemimpin telah berjiwa transformatif jika ia mampu mentransformasi terus menerus seluruh aspek manajemen kelembagaannya agar selalu relevan dengan kondisi persaingan baru. Pemimpin transformasional dianggap sebagai model pemimpin yang tepat untuk terus menerus meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan inovasi guna menaikkan daya saing.

Keberadaan para aktivis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada konteks ini ikut berperan dalam mengembangkan kemampuan keanggotaan masyarakat, keorganisasian dan kelembagaan yang sudah ada. Mereka secara individual maupun bersama-sama menjalankan peran masing-masing dalam mengatasi masalah, merumuskan dan mewujudkan tujuan yang diinginkan. Fokus kegiatan pengembangan

dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kepemimpinan, membangun jaringan, memberi dukungan informasi dan analisis anggota masyarakat, organisasi dan lembaga sosial yang sudah ada. Pola kegiatan sosial seperti ini dalam pemahaman lebih luas bisa dikategorikan sebagai *community capacity building* (pembangunan kapasitas) karena di dalamnya menekankan sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan
- b. Adanya pendekatan multidisiplin lintas sektor dalam merancang dan melaksanakan program
- c. Menekankan perubahan dan inovasi kelembagaan dan teknologi
- d. Menekankan kepada perlunya pembangunan modal sosial melalui ujicoba dan pembelajaran
- e. Menekankan pengembangan ketrampilan dan kinerja dari individu dan lembaga (Sue McGinty, 2002:3).

#### **E. Menghapus Ketimpangan Jender**

Konsep pembangunan alternatif adalah konsep pembangunan yang menekankan terwujudnya tatanan masyarakat yang menerjemahkan prinsip "*inclusive democracy, appropriate growth, gender equity, and intergenerational equity*" (Friedman, 1992). Munculnya gagasan pembangunan alternatif dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan yang melekat pada paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akhir-akhir ini memang menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat (Saptari, 1997: 7).

Bercermin pada kelemahan pembangunan pro pertumbuhan telah mengubah fokus perhatian para pembuat kebijakan dari isu-isu universal yang berorientasi pada kesejahteraan (ditandai dengan memberi perhatian pada program-program yang berorientasi pada keluarga), ke isu-isu yang menekankan peran produktif perempuan. Mulai saat itu permasalahan (isu) perempuan dalam pembangunan menjadi permasalahan internasional. Pada tahun 1972, Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Status Perempuan mengusulkan pada majelis Umum PBB untuk menetapkan tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan Internasional. Isu yang berkembang pada konferensi tersebut adalah pentingnya perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) (Farida, Anik, 2000: 4).

Munculnya pendekatan *Women in Development* (WID) dipengaruhi oleh perspektif feminis liberal, yang menyuarakan adanya persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.

Dengan memperkuat posisi ekonomi perempuan diasumsikan akan meningkatkan status perempuan dalam masyarakat.

Kata kunci WID adalah *integrasi*, yaitu: mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Para penggagas WID (feminis liberal) tidak mempermasalahkan tujuan pembangunan atau proses pembangunan, tetapi hanya menuntut agar perempuan tidak ditinggalkan. Sementara itu menurut Mansour Faqih, munculnya WID didasari oleh pemikiran bahwa perempuan menjadi miskin karena mereka tidak produktif sehingga perlu diciptakan "proyek peningkatan pendapatan" atau *income generating activities* bagi kaum perempuan. Pola pemikiran seperti ini yang mendasari pendekatan "pengentasan kemiskinan". *Kedua*, adalah adalah pemikiran bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan (Farida, Anik, 2000: 4)

Untuk konteks Indonesia, wacana WID diterjemahkan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Program pembangunan yang mencoba mengintegrasikan perempuan (WID) telah dilakukan sejak 22 tahun yang lalu, dengan dibukanya Kantor Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (sekarang menjadi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan).

Sayangnya, berbagai proyek pembangunan dalam WID yang menjadi perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga dana internasional tidak mengubah posisi subordinasi perempuan terhadap laki-laki secara berarti. Malahan, pada banyak kasus perempuan dirugikan oleh proyek-proyek tersebut. Tidak saja jam kerja perempuan bertambah, tetapi tanggung jawab mereka juga bertambah. Beban kerja semakin terasa berat sementara upah yang diperoleh dari proyek WID sangat minim. Dengan demikian kesehatan, nutrisi dan status gizi semakin memburuk. Di pihak lain, posisi tawar tenaga kerja perempuan merosot karena pekerjaan mereka *tersegregasi* secara gender. Akibatnya, pekerja perempuan dikategorikan sebagai *unskilled workers* yang terkonsentrasi pada pekerjaan yang tidak berketerampilan seperti pekerjaan di sektor industri tekstil. Sifat pekerjaan seperti menjadikan kelompok menjadi tidak memiliki *career progression* ( jenjang karier yang jelas).

Konsep WID juga dianggap belum berpihak pada kepentingan perempuan. Meskipun perempuan sudah menduduki posisi strategis (misalnya dalam institusi politik) sebagai hasil dari pendekatan kesamaan, tidak serta merta kebijakan yang diambil berpihak pada perempuan. Bahkan, perempuan yang terjun posisi-posisi politik diharuskan adaptif hidup dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Studi Anik (2000) menyebutkan, bahwa meskipun perempuan sudah mampu menerobos partai politik, tetapi kehadiran mereka di dalam institusi tersebut dianggap tidak lebih dari kelompok pelengkap. Lebih jauh diungkapkan dalam studi tersebut, bahwa perempuan yang masuk dalam institusi politik "dikondisikan" untuk mengikuti dominasi perspektif laki-laki, kalau ingin terus bertahan.

Berangkat dari berbagai kritik di atas mendorong perlunya dilihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan oleh perempuan-kerja produktif, reproduktif, privat (domestik) dan publik- dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan perempuan. Sebagai hasil perkembangan pemikiran ini mulai dilancarkan sebuah pendekatan yang mencoba melihat persoalan hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Sebuah hubungan dimana perempuan secara sistematis disubordinasikan. Pendekatan ini dikenal dengan nama Gender and Development (GAD) atau jender dan pembangunan.

Kata kunci yang melekat dalam pendekatan ini adalah *empowerment* (pemberdayaan). Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan bawah ke atas (*bottom up*). Walaupun istilah ini tidaklah sepi dari kritik, karena istilah ini dimunculkan oleh para feminis Selatan. Tetapi setidaknya pendekatan GAD telah mencoba melihat persoalan perempuan, tidak hanya dari raga perempuan, tetapi terkait dengan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan jender. Mosser lebih jauh menawarkan gagasannya bahwa untuk setiap kegiatan atau program perempuan, hal yang mendasar tidaklah hanya menjawab "kebutuhan praktis jender" (*gender practice need*) sebagaimana ditawarkan WID, tetapi juga "kebutuhan strategis jender" (*gender strategic need*).

Istilah *gender practice need* (selanjutnya disingkat GPN) dan *gender strategic need* (selanjutnya disebut GSN) dikemukakan pertama kali oleh Maxine Molyneux pada tahun 1985. GPN adalah kebutuhan yang diformulasikan dari kondisi kongkrit pengalaman perempuan, dengan posisi jender mereka dalam pembagian kerja secara seksual. Dengan demikian GSN berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia.

Pemenuhan kebutuhan praktis jender perempuan adalah pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena perbedaan jender mereka, yang perlu dicukupi agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya, masalah penyediaan makanan bernutrisi, perbaikan tempat tinggal, peningkatan penghasilan, pekerjaan, pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan (Priyono, Onny S, 1996: 199).

Sementara GSN adalah kebutuhan yang dirumuskan dari analisa subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Molyneux, menjelaskan bahwa GSN mencakup beberapa hal sebagai berikut: penghapusan pembagian kerja secara seksual, pengurangan kewajiban atas kerja-kerja domestik dan perawatan anak, penyingkiran berbagai bentuk diskriminasi, penerapan sarana-sarana yang layak untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Konsep pemenuhan kebutuhan strategis jender muncul karena adanya analisis ketimpangan relasi jender laki-perempuan yang hidup di masyarakat. Fokus kegiatannya adalah pada upaya penyetaraan relasi dan partisipasi perempuan dengan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan bekerja, pendidikan,

latihan, kepemilikan tanah, kekayaan dan kredit, upah yang sama dengan lelaki untuk jenis pekerjaan yang bernilai sama, kebebasan untuk memilih dalam pernikahan dan reproduksi, perlindungan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan suami di rumah. Dengan kata lain GSN lebih berorientasi pada pendekatan *empowerment* (pemberdayaan).

Pendekatan pemberdayaan, menekankan pada fakta bahwa perempuan mengalami penekanan (*oppression*) yang berbeda menurut bangsa, kelas sosial, sejarah penjajahan kolonial dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian perempuan tetap harus menantang struktur dan situasi yang menekannya secara bersama pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya bagi perempuan untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi lelaki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*internal strength*), yang dikenal sebagai "*the right to determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and nonmaterial resources.*" (Priyono, Onny S, 1996: 199).

Dengan pendekatan pemberdayaan, akan lebih menjamin hak-hak reproduksi perempuan. Hal ini berarti perempuan memiliki kebebasan kapan dan berapa anak yang ingin dilahirkan. Pendekatan ini telah mencoba melihat pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Pemberian kebebasan reproduksi pada perempuan yang menyangkut kebebasan memiliki, mengatur dan menentukan jumlah anak berarti ada upaya mengambil alih kembali hak seksualitas pada perempuan, karena selama ini seksualitas dalam masyarakat patriarkhat didominasi oleh laki-laki (Farida, Anik, 2000: 5).

Pendekatan pemberdayaan ini muncul karena kelemahan-kelemahan yang melekat pada empat pendekatan dalam WID (pendekatan kesejahteraan, kesamaan dan anti kemiskinan). Sejauh ini penerapan empat pendekatan ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan GSN.

*Pertama*, pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan kaum perempuan ke dalam pembangunan sebagai ibu yang lebih baik. Pendekatan kebijakan ini berdasarkan pada asumsi bahwa perempuan adalah penerima pasif bantuan pembangunan; bahwa sebagai ibu dan pengasuhan anak adalah peran utama perempuan dalam pembangunan. Pendekatan ini menekankan peran reproduktif perempuan dan kinerja mereka di dalam wilayah domestik.

Pendekatan ini diimplementasikan melalui program-program kesejahteraan atau perbaikan gizi keluarga dan anak balita dengan pemenuhan kebutuhan fisik keluarga atau pemberian bantuan makanan

secara langsung kepada kelompok yang dipandang rawan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana atau kampanye kontrasepsi untuk membatasi jumlah anak dan pengasuhan anak. Kritik terhadap pendekatan ini memperkuat ideology jender; melanggengkan ketergantungan kaum perempuan dan kesenjangan jender. Dengan demikian, pendekatan ini diidentifikasi masih sebatas menjawab kebutuhan GPN.

*Kedua*, pendekatan anti kemiskinan (*the antipoverty approach*). Pendekatan ini muncul karena strategi modernisasi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dinilai gagal memecahkan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, mulai diidentifikasi perempuan miskin sebagai kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian khusus. Pendekatan ini berfokus kepada bagaimana kaum perempuan miskin dapat meningkatkan produktifitas mereka dengan memperoleh pendapatan. Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi-asumsi berikut: (1) kemiskinan dan tidak dimilikinya akses kepada pendapatan yang dialami oleh perempuan miskin karena perempuan tidak mempunyai akses kepada modal; (2) pengangguran dan penghapusan kemiskinan dapat berkurang / terhapuskan apabila perempuan miskin mempunyai akses kepada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi sektor informal; (3) meningkatkan produktifitas perempuan dari rumah tangga-rumah tangga miskin sangat diperlukan untuk menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan ini yang umumnya diterjemahkan melalui kegiatan peningkatan pendapatan keluarga (*income generating activities*) seperti proyek Takesra dan Kukesra yang dikembangkan oleh BKKBN dan kebijakan pengiriman buruh migran.

Upaya ini dilakukan berkaitan dengan tiga peran yang dijalankan perempuan yang semuanya menentukan keberlangsungan hidup rumah tangga, yaitu: mempertahankan kelangsungan hidup (fungsi reproduksi), bekerja di luar rumah dan menaikkan pendapatan (fungsi produksi). Keinginan untuk memutus mata rantai kemiskinan menjadi alasan utama mengapa perempuan bekerja di luar negeri (Farida, Ani, 2000: 11). Namun, pendekatan anti kemiskinan seperti dilakukan dengan mengirim buruh migran ternyata baru dapat menjawab kebutuhan GPN, belum sampai pada pemenuhan GSN. Hal ini karena upaya ini belum memperhatikan relasi jender. Terbukti, para perempuan yang dikirim ke luar negeri cenderung ditempatkan pada bidang pekerjaan perempuan (sektor domestik) misalnya sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak. Sebagai implikasinya, upah mereka rendah sehingga tidak mengubah status sosial meskipun mereka sudah terlibat dalam kegiatan produktif. Bahkan yang lebih jauh, mereka rawan menjadi obyek kekerasan berbasis jender seperti disiksa, diperkosa, diperjual-belikan sebagai pekerja seks hingga mati terbunuh.

Kritik terhadap pendekatan ini: (1) suatu pendekatan ekonomi murni yang hanya berfokus kepada peran ekonomi perempuan; (2) program atau proyek sering dikembangkan tanpa melakukan analisis jender; (3) kemiskinan

perempuan dilihat sebagai suatu masalah keterbelakangan bukan karena posisi subordinat perempuan dalam keluarga dan masyarakat; (4) mempertahankan/ melestarikan sektor informal berarti hanya akan melestarikan kemiskinan; (5) beban kerja perempuan semakin meningkat.

*Ketiga*, pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan kebijakan yang dominan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 80an. Tujuan pendekatan ini adalah mengupayakan agar pembangunan akan lebih efisien dan efektif melalui kontribusi tenagakerja perempuan secara sukarela. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, IMF dan Bank Dunia mengembangkan Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Program/SAP*). Sebagai tanggapan atas program ini, negara-negara mengembangkan program-program yang didasarkan pada asumsi bahwa kaum perempuan memiliki potensi melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan komunitas dan social, di samping peran-peran produktif dan reproduktif mereka. (Menegpp, 2006).

Proyek-proyek yang dikembangkan oleh pendekatan ini adalah proyek padat karya untuk memperbaiki/membangun/membersihkan saluran limbah air dalam komunitas tempat tinggal; dapur umum yang menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak balita dan keluarga. Kritik terhadap pendekatan ini adalah: (1) perempuan hanya dilihat sebagai pemberi pelayanan social atau dilihat karena kemampuannya melaksanakan program-program social; (2) beban kerja perempuan meningkat karena melakukan peran rangkap tiga. Upaya melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan sebagai implementasi dari strategi pendekatan efisiensi ini juga diidentifikasi baru dalam tahapan menjawab kebutuhan GPN.

*Keempat*, pendekatan keadilan (*the equity approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan status perempuan, misalnya dengan mengupayakan kesetaraan perempuan di depan hukum seperti hak perempuan untuk mengajukan cerai, hak perempuan dalam pengasuhan anak, hak perempuan mewarisi kekayaan materiil seperti tanah, rumah atau asset-aset produktif lainnya, hak perempuan atas modal/kredit, hak perempuan sebagai warganegara, hak ekonomi perempuan (upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama). (Menegpp, 2006).

Pendekatan ini dikritik karena ia butuh advokasi politik yang kuat sebab partai-partai politik dan serikat pekerja didominasi oleh laki-laki; proyek-proyek pendekatan ini top down; meskipun hak-hak perempuan telah berhasil diperoleh namun pelaksanaannya sering diabaikan atau tak pernah terlaksana. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap hanya memenuhi kebutuhan GPN.

Belajar dari keterbatasan empat pendekatan di muka muncul pendekatan kelima yang diberi nama pendekatan pemberdayaan (*The empowerment approach*). Pendekatan ini dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman organisasi perempuan di lapis akar rumput. Tujuan pendekatan

ini adalah untuk memberdayakan perempuan melalui kemandirian perempuan dan memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan negosiasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Subordinasi perempuan dilihat tidak hanya sebagai permasalahan yang muncul dari posisi subordinat mereka tapi sebagai hasil dari opresi kolonialisme dan neokolonialisme.

Sebagaimana kelompok tak berdaya lainnya, kaum miskin, termasuk perempuan, harus sadar akan posisi subordinat mereka dan memahami basis kesubordinasian mereka agar mereka memperoleh cara bagaimana merubah posisi mereka. Program pemberdayaan perempuan dilakukan dengan memobilisasi perempuan untuk mengakhiri diskriminasi yang mereka alami dalam sistem pendidikan, penarikan tenaga kerja, promosi karir, akses kepada modal/kredit dan sebagainya. Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam rangka membangun hubungan kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban berlandaskan sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Perwujudan kemitrasejajaran yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan kesetaraan perempuan-laki-laki diperlukan transformasi nilai yang berkaitan dengan perubahan hubungan jender dan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan.

Pendekatan pemberdayaan dianggap dapat menjawab baik kebutuhan GPN maupun kebutuhan GSN. Meskipun ia juga tidak lepas dari beberapa kritikan. Karena pendekatan ini mempersoalkan status quo maka ia sering kali tidak memperoleh dukungan dari pemerintah dan agen-agen pembangunan.

# PENGEMBANGAN MASYARAKAT

WACANA & PRAKTIK

Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) adalah strategi yang didasarkan pada metode *bottom-up* dan lokal. Gagasan alternatif ini didasarkan pada cita-cita untuk mengembangkan, dan merekonstruksi, struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang menekankan pada prinsip keadilan dan program implementasi yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang digunakan dalam model pembangunan alternatif ini adalah pembangunan level lokal, yang menyatu dengan budaya lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari orang-orang lokal—bukan memaksakan model pembangunan dari luar atau dari atas.

Sebagai sebuah pendekatan tentu ada beberapa konsep dasar dan metode penerapan serta strategi-strategi yang harus dijalankan agar program pemberdayaan berbasis-komunitas ini dapat sukses. Untuk tujuan itulah disusun buku ini sebagai salah satu pedoman penting bagi aktivis pengembangan masyarakat pada umumnya dan pendidikan luar sekolah pada khususnya. Penulis membahas berbagai model pembangunan alternatif yang melibatkan banyak pihak. Hadirnya buku ini, selain sebagai referensi penting, juga dapat menjadi “teman dialog” bagi pembaca dan aktivis yang bergerak dalam bidang ini. Bagi para teoretisi dan praktisi pengembangan masyarakat dan pendidikan luar sekolah, buku ini dapat memperkaya wawasan mereka mengenai model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.